



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DISPARITAS
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI CAPAIANNYA
(Model Regresi Data Panel 25 Kabupaten/Kota Tahun 2003 – 2007)**

TESIS

EVAN EVIANTO
0706299593

**FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN MANAJEMEN STRATEGIS SEKTOR PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DISPARITAS
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI CAPAIANNYA
(Model Regresi Data Panel 25 Kabupaten/Kota Tahun 2003 – 2007)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

EVAN EVIANTO
0706299593

**FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN MANAJEMEN STRATEGIS SEKTOR PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2010**

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : EVAN EVIANTO

NPM : 0706299593

Tanda Tangan :

Tanggal : 30 Desember 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : EVAN EVIANTO
NPM : 0706299593
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis :

**ANALISIS DISPARITAS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIANNYA
(Model Regresi Data Panel 25 Kabupaten/Kota Tahun 2003 – 2007)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Darlis Rabai, SE., MA.** (.....)

Ketua Penguji : **Jossy Prananta Moeis, Ph.D.** (.....)

Anggota Penguji: **Surjadi, SE., MA.** (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 30 Desember 2009

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan bagi ALLAH SWT atas anugerah kekuatan fisik, mental dan pikiran yang diberikan kepada penulis sehingga penelitian ini selesai dengan baik.

Selesainya penelitian ini tidak lepas dari bimbingan, petunjuk, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

- Ketua dan Sekretaris Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Bapak Darlis Rabai, SE., MA. selaku pembimbing penulisan tesis
- Kepada Dewan Penguji yang terdiri dari Bapak Jossy P. Moeis, Ph.D selaku Ketua Sidang, Bapak Surjadi, SE., MA. dan Bapak Darlis Rabai, SE., MA. selaku anggota Dewan Penguji bagi penulis
- Segenap dosen dan karyawan di lingkungan Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Pimpinan dan seluruh pegawai pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia angkatan XVII Sore Salemba atas dukungan dan kebersamaannya dalam mendorong semangat bagi penulis
- Kedua orang tua penulis dan istri penulis, Ai Sutini serta anak-anak penulis, Kaka Taqy, Aa Jihad, Ceuceu Shoffa, Ayu Imaniyyah dan Muthi'ah atas doa dan kesabarannya dalam mendukung keberhasilan penulis, dan
- Semua rekan, sahabat, keluarga dan handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

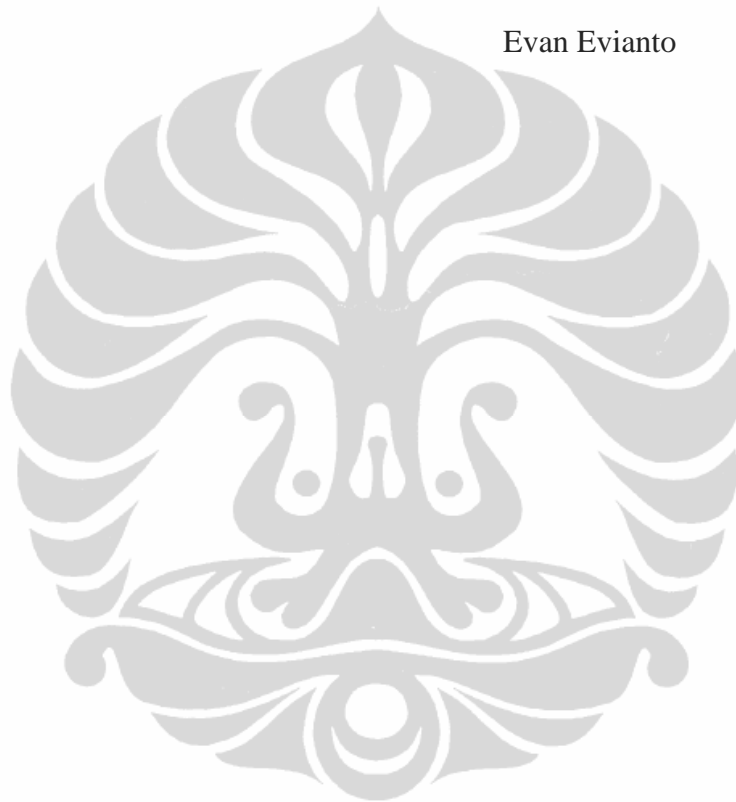
Penulis sadari penelitian ini mengandung banyak kekurangan dan

kelemahan baik dalam format penyajiannya maupun substansi hasil penelitian. Untuk itu penulis membuka diri terhadap saran dan kritik dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan lebih lanjut.

Semoga karya penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, almamater, nusa dan bangsa.

Jakarta, 30 Desember 2009

Evan Evianto



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVAN EVIANTO
NPM : 0706299593
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS DISPARITAS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIANNYA
(Model Regresi Data Panel 25 Kabupaten/Kota Tahun 2003 – 2007)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2009
Yang menyatakan

Evan Evianto

ABSTRAK

Nama : EVAN EVIANTO
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul :

ANALISIS DISPARITAS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIANNYA (Model Regresi Data Panel 25 Kabupaten/Kota Tahun 2003 – 2007)

Tesis ini membahas disparitas indeks pembangunan manusia antar 25 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang dilakukan menggunakan teknik kuantitatif Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Regresi data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2001-2007 di wilayah Provinsi Jawa Barat terjadi ketimpangan yang cukup tinggi di atas 0,5 dengan kecenderungan yang semakin menurun. Hasil analisis Tipologi Klassen berdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB dan LPE, antara tahun 2001-2007 diketahui tidak semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan, sebagian besar adalah tetap pada pola pertumbuhan yang sama. Terdapat kabupaten/kota terus maju, namun ada juga kabupaten/kota yang tetap tertinggal, bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Dan dari pengujian dengan melakukan regresi data panel dengan metode Fixed Effect diketahui Dari persamaan regresi data panel diperoleh data bahwa dari sembilan variabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pencapaian IPM di Wilayah Provinsi Jawa Barat, ternyata hanya lima variabel yang secara signifikan berpengaruh. Kelima variabel tersebut adalah variabel jumlah bangunan sekolah lanjutan pertama, variabel rasio jumlah guru terhadap murid tingkat sekolah lanjutan pertama, variabel jumlah puskesmas, variabel PDRB perkapita serta variabel kepadatan penduduk.

Kata Kunci : IPM, Disparitas, Fixed Effect

ABSTRACT

Name : EVAN EVIANTO
Study Program : Postgraduate Program of Planning and Public Policy
Title :

AN ANALYSIS OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX DISPARITY IN WEST JAVA PROVINCE AND ITS DETERMINANTS (Regression Model Using Panel Data of 25 Districts Year 2003 – 2007)

This research study examines income disparity among 25 districts in West Java Province and its impact to human development index. The tools of analysis are Williamson Index, Klassen typology, and Regression Model using panel data.

Based on Williamson Index, we found that disparity of gross regional domestic product per capita among districts in West Java is relatively high ($>0,5$) but tended to decrease over the period of 2001-2007.

Klassen typology shows that West Java can be classified into four types: high growth and high income, high income but low growth, high growth but low income, low growth and low income. In period 2001-2007, most of the districts have same pattern of growth.

Estimation using fixed effect with cross section weights method could be applied to examined the impact of independent variables consist of education aspects, health aspects, personal income aspects and demography aspect to human development index. It reveals that number of junior school, the ratio between number of teachers to number of students in junior high school, number of Public Health Center, gross regional domestic product per capita, and density of population could significantly affected to Human Development Index.

Keyword: HDI, disparity, fixed effect

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB 1 : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Hipotesis	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
1.7. Sistematika Penulisan	10
BAB 2 : LANDASAN TEORI	
2.1. Konsep Dasar Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	11
2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Daerah	21
2.3. Pembentukan Modal Manusia.....	28
2.4. Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.....	30

BAB 3: GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT	
3.1	Kondisi Umum 38
3.2	Perkembangan Pembangunan Provinsi Jawa Barat 40
3.3	Perkembangan IPM..... 54
3.4	Perkembangan Komponen IPM..... 56
BAB 4 : METODOLOGI PENELITIAN	
4.1.	Metode Pengumpulan Data 59
4.2.	Teknik Analisis..... 59
4.3	Analisis Regresi Data Panel 63
4.4	Pendekatan dan Pemilihan Model 67
4.5	Pengujian Model..... 71
4.6	Kelebihan dan Keterbatasan Model..... 73
BAB 5: PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	
5.1.	Perkembangan Tingkat Kesenjangan Pendapatan 75
5.2.	Tingkat Kemajuan Kabupaten/Kota 86
5.3	Keterkaitan Tingkat Kesenjangan Regional dan Tingkat Kemajuan Kabupaten/Kota dan Disparitas Capaian Indeks Pembangunan Manusia..... 97
5.2.	Hasil Perhitungan Regresi terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemajuan IPM..... 100
BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1	Kesimpulan..... 109
6.2	Saran dan Rekomendasi Kebijakan..... 111

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :	Data IPM, PDRB per kapita dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005	4
Tabel 3.1 :	PDRB Kabuapetn/Kota Tahun 2003-2007 Tanpa Migas Harga Konstan tahun 2000.....	41
Tabel 3.2 :	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007 Harga Konstan tahun 2000.....	42
Tabel 3.3 :	Peranan Nilai Tambah Bruto Sektor Terhadap Total PDRB Setiap Kabupaten/Kota Tahun 2007 (tanpa Migas).....	43
Tabel 3.4 :	Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007.....	44
Tabel 3.5 :	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007.....	45
Tabel 3.6 :	Jumlah Bangunan Sekolah dasar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007	47
Tabel 3.7 :	Jumlah Bangunan Sekolah Lanjutan Pertama Menurut Kabuapten/Kota Tahun 2003-2007.....	48
Tabel 3.8 :	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Dasar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007.....	49
Tabel 3.9 :	Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Lanjutan Pertama Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007.....	50
Tabel 3.10:	Jumlah Puskesmas, Pustu, dan Pusling menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007.....	51
Tabel 3.11 :	Jumlah Dokter Puskesmas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007.....	52
Tabel 3.12 :	Jumlah Bidan Puskesmas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007.....	53

Tabel 3.13:	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007.....	55
Tabel 3.14:	Perkembangan komponen IPM Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007	57
Tabel 3.15	Perkembangan Indeks Komponen IPM Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2007	57
Tabel 4.1 :	Indikator dan Variabel-Variabel Penelitian	66
Tabel 5.1 :	Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat Tahun 2001-2007.....	75
Tabel 5.2:	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Termasuk Migas Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2001-2007	78
Tabel 5.3:	Pengelompokan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001-2007.....	87
Tabel 5.4:	Perkembangan PDRB Jawa Barat 2003-3007 ADHK 2000	90
Tabel 5.5 :	Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB Jawa Barat 2003-2007	91
Tabel 5.6 :	Laju Pertumbuhan Ekonomi Domestik Bruto Provinsi Jawa Barat ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha	92
Tabel 5.7:	Ringkasan Statistik Variabel Regresi	100
Tabel 5.8:	Hasil Estimasi dengan Teknik Regresi Data Panel	102
Tabel 5.9:	Pengujian Masalah Autokorelasi	106
Tabel 5.10:	Variasi Konstanta Antar Kabupaten/Kota (Model Fixed Effect	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 :	Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Tipologi Klassen	57
Gambar 5.1 :	Perkembangan Indeks Williamson 2001-2007.....	71
Gambar 5.2 :	Perkembangan Indeks Williamson tanpa Kota Bandung, Kab. Bekasi dan Kab. Bogor.....	80
Gambar 5.3 :	Tingkat Kemajuan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Menurut Tipologi Klassen Tahun 2007	91
Gambar 5.4 :	Capaian IPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2007	93



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perhitungan Indeks Williamson (CVw)
- Lampiran 2 : Perhitungan Tiologi Klassen
- Lampiran 3 : Output Software Eviews Metode Pooled Least Square
- Lampiran 4 : Output Software Eviews Metode Fixed Effects
- Lampiran 5 : Output Software Eviews Metode Random Effects



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak pemerintahan orde baru (1966-1999), isu pemerataan merupakan isu sentral yang digaungkan oleh pemerintah. Dalam pedoman pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan (Repelita) pemerintah selalu mencantumkan kalimat pemerataan pembangunan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun dalam kenyataannya apa yang dijanjikan oleh pemerintah tidak terwujud. Kesenjangan pembangunan telah menjadikan wilayah-wilayah di Indonesia mengalami pertumbuhan secara tidak merata. Wilayah Indonesia Bagian Timur merupakan wilayah yang mengalami ketimpangan paling tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia di bagian barat.¹

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Ibukota negara, Provinsi DKI Jakarta. Secara geografis Provinsi DKI Jakarta berada di sebelah utara Pulau Jawa. Hal ini berpengaruh pada laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta atau wilayah utara Provinsi Jawa Barat. Secara relatif wilayah utara Jawa Barat lebih maju dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di wilayah selatan Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah provinsi termaju di Indonesia. Namun mengapa ketimpangan di antara kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat bisa terjadi? Faktor apakah yang menyebabkan laju perekonomian yang begitu tinggi akan tetapi tidak memberikan “*spread effect*” yang baik dan merata terhadap semua wilayahnya. Mungkinkah telah terjadi kesalahan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan alokasi sumber daya (*resource allocation*) dan distribusi pendapatan (*income distribution*).²

¹ Tambunan, Tulus T.H., Perekonomian Indonesia (Teori dan Temuan Empiris), Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia (2001), hal. 278

² Musgrave, Richard A dan Musgrave Peggy B. *Public Finance in Theory and Practice, Fifth Edition*, Mc Graw Hill (1989) p.224

Apabila ketimpangan ini terus dibiarkan berjalan seperti apa adanya, maka berbagai dampak negatif yang mungkin timbul bisa terjadi, mulai dari sikap apatis terhadap semua kebijakan pemerintah daerah, tidak mau membayar pajak, sampai timbulnya gejolak masyarakat yang disertai penolakan, pembangkangan maupun perlawanan terhadap kebijakan pemerintah daerah, dan yang lebih ekstrim adalah desakan untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Berdirinya Provinsi Banten di wilayah utara Jawa Barat pada tahun 2002 merupakan sebuah fakta bahwa ketimpangan dalam hal pembangunan akan mendorong wilayah-wilayah di Provinsi Jawa Barat untuk membentuk provinsi baru. Wilayah Banten dengan PDRB yang lebih tinggi dari PDRB rata-rata Provinsi Jawa Barat memilih menjadi provinsi sendiri. Kecenderungan ini pun masih berkembang dengan adanya tuntutan dan wacana membentuk provinsi baru bagi kabupaten/kota di wilayah pantai utara Jawa Barat (Eks Karesidenan Cirebon) serta di wilayah selatan yaitu Tasikmalaya, Ciamis dan beberapa kabupaten/kota lainnya (Kompas)³. Kondisi demikian sudah cukup lama diingatkan oleh Soetama (1986) bahwa ketertinggalan dan perbedaan yang semakin besar mempunyai potensi bagi tumbuh dan berkembangnya kesenjangan sosial yang dapat membahayakan stabilitas dan integritas bangsa dalam konteks ini integrasi daerah.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa masalah ketimpangan dan pemerataan wilayah sangat penting untuk segera ditangani namun dengan keterbatasan sumber daya (dana perimbangan) yang dimiliki, tidak mungkin membangun semua wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan dalam waktu yang sama maka kebijakan yang sedang diupayakan adalah dengan memberikan prioritas pengembangan wilayah kabupaten/kota yang masih tertinggal.

Sejak terbitnya paket peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 tahun 2004, daerah otonom berhak, berwenang dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

³ Kompas.com. 2010, Cirebon jadi Provinsi. 9 Februari 2008.

kecuali pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Desentralisasi fiskal yang secara efektif berlaku sejak 1 Januari 2001 merupakan sebuah momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya serta keunggulan daerah yang dimilikinya.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil pembangunan adalah dengan melihat tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Ukuran yang sering digunakan adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam Laporan Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2004 yang merupakan publikasi bersama BPS, Bappenas dan UNDP disebutkan bahwa salah satu tugas pembangunan yang terpenting adalah menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan pembangunan manusia. IPM dianggap telah dapat mewakili tingkat kesejahteraan penduduk yang ada di Provinsi Jawa Barat, karena sebagaimana dimaklumi bahwa IPM mencakup unsur analisis yang meliputi variabel ekonomi dan non ekonomi. Variabel non ekonomi diukur dari tingkat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat sedangkan variabel ekonomi dilihat dari pendapatan yang menunjukkan daya beli masyarakat, maka dengan asumsi ini kabupaten/kota yang nilai IPM-nya masih rendah dianggap tingkat kesejahteraan penduduknya masih rendah, sehingga perlu mendapat prioritas penanganan yang lebih banyak untuk dapat disejajarkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Peningkatan IPM di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat juga sangat sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat yang telah menjadikan IPM sebagai salah satu alat analisis untuk menilai kemajuan maupun disparitas antar kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat sejak beberapa tahun terakhir. Demikian juga dalam skala nasional IPM adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia. Terbitnya Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah semakin memperkuat bahwa pemerintah daerah harus berupaya keras meningkatkan IPM-nya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008, IPM digunakan sebagai indikator tertinggi dalam Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Otonomi Daerah. IPM disebut sebagai hasil akhir tujuan otonomi daerah.

Sebagai gambaran awal mengenai ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari ketimpangan perolehan pendapatan antar kabupaten/kota yang digambarkan oleh perolehan PDRB per kapita, perbedaan jumlah penduduk yang mencolok, ketersediaan fasilitas dasar seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan sebagainya. Gambaran awal tersebut, khususnya yang berkaitan dengan perolehan PDRB per kapita, jumlah penduduk, pencapaian IPM sampai dengan tahun 2005 tersaji dalam tabel 1.

Tabel 1.1
Data IPM, PDRB Per Kapita dan Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	PDRB perkapita ADHK 2000	IPM
1	Kabupaten Bogor	3.829.053	6.135,00	69,2
2	Kabupaten Sukabumi	2.168.892	3.745,00	68,7
3	Kabupaten Cianjur	2.079.770	3.275,00	66,8
4	Kabupaten Bandung	4.037.274	5.163,00	72,4
5	Kabupaten Garut	2.196.422	3.988,00	68,7
6	Kabupaten Tasikmalaya	1.619.052	2.671,00	70,4
7	Kabupaten Ciamis	1.511.942	3.813,00	69,3
8	Kabupaten Kuningan	1.045.691	3.042,00	68,5
9	Kabupaten Cirebon	2.044.257	3.044,00	66,0
10	Kabupaten Majalengka	1.167.566	2.913,00	66,9
11	Kabupaten Sumedang	1.014.019	4.657,00	70,2
12	Kabupaten Indramayu	1.689.247	9.640,00	63,0
13	Kabupaten Subang	1.380.047	4.374,00	68,2
14	Kabupaten. Purwakarta	753.306	7.003,00	68,6
15	Kabupaten Karawang	1.926.471	6.907,00	66,4
16	Kabupaten. Bekasi	1.983.815	20.113,00	70,4
17	Kota Bogor	891.467	3.970,00	74,3
18	Kota Sukabumi	291.277	4.810,00	72,4
19	Kota Bandung	2.288.570	9.276,00	74,3
20	Kota Cirebon	308.771	15.675,00	73,7
21	Kota Bekasi	1.993.478	5.874,00	74,6
22	Kota Depok	1.374.903	3.438,00	77,1
23	Kota Cimahi	546.879	9.338,00	73,1
24	Kota Tasikmalaya	582.423	5.056,00	72,1
25	Kota Banjar	162.383	3.597,00	69,4
26	Provinsi Jawa Barat	38.886.975	6.308,00	69,9

Sumber : BPS-Bappenas-UNDP (telah diolah kembali)

Dari data PDRB per kapita dan jumlah penduduk seperti diperlihatkan dalam tabel 1 tergambar dengan jelas bahwa 7 kabupaten/kota yang mempunyai PDRB perkapita di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan terdapat 5 kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita tertinggi yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kota Cimahi dan Kota Bandung dengan menguasai 42,27% PDRB Provinsi Jawa Barat, sedangkan sisanya 57,73% PDRB dibagi-bagi kepada 20 kabupaten lainnya. Hal ini menggambarkan kesenjangan yang mencolok.

Selain itu bila kita analisis dari distribusi jumlah penduduk yang terkonsentrasi pada 5 kabupaten/kota, yaitu kabupaten/kota yang menjadi sentra-sentra industri dan perkotaan. Kabupaten Bandung memiliki jumlah penduduk terbesar, kemudian disusul Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi. Hal ini menunjukkan bahwa 37,34% penduduk Provinsi Jawa Barat mendiami 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut dan sisanya 62,66% yang menyebar di 20 Kabupaten/Kota lainnya.

Kategori capaian IPM dikelompokkan dalam 4 (empat) yaitu rendah (IPM di bawah 50), menengah rendah (IPM antara 50-65), menengah tinggi (IPM antara 66-70) dan tinggi (IPM di atas 70). Berdasarkan pengelompokkan tersebut dari data pada tabel 1 terlihat bahwa ada 12 kabupaten/kota dengan kategori IPM tertinggi, 1 kabupaten masuk kategori IPM menengah rendah dan 12 kabupaten/kota termasuk kategori menengah tinggi.

1.2 Perumusan Masalah

Dasar pemikiran terbitnya Paket Perundang-undangan Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan atas Undang-Undang adalah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Universitas Indonesia

Desentralisasi fiskal merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan akselerasi pembangunan nasional. Dengan era baru otonomi daerah ini sepertiga anggaran belanja pemerintah pusat disalurkan ke daerah. Kebijakan ini didasarkan pada asumsi bahwa organisasi pemerintah pada tingkat daerah lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan aktual dari masyarakat setempat, serta tidak mungkin pemerintah di tingkat nasional mampu melayani dan mengurus kepentingan dan urusan masyarakat yang demikian kompleks. Desentralisasi juga dianggap sebagai jawaban atas tuntutan demokratisasi yang begitu besar dimana pemerintah daerah diharapkan lebih responsif dibandingkan pemerintah pusat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan desentralisasi fiskal akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Desentralisasi akan menimbulkan kesenjangan antar daerah baik secara regional maupun nasional. Hal ini disebabkan modal dasar (*endowment*) yang dimiliki oleh masing-masing daerah berbeda. Perbedaan *endowment* masing-masing daerah misalnya meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, kekayaan alam, sumber-sumber PAD akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan perekonomian (PDRB) di masing-masing daerah serta selanjutnya akan berakibat pada perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk.

Faktor pendapatan merupakan salah satu faktor yang membentuk IPM di samping faktor lainnya, tentunya berperan penting dalam mendorong peningkatan IPM. Namun demikian timbul pertanyaan yang cukup menarik apakah pendapatan domestik regional bruto yang tinggi akan secara otomatis menyebabkan IPM yang tinggi? Apakah ketimpangan dalam hal pendapatan domestik regional bruto juga akan menyebabkan pencapaian IPM menjadi timpang? Disamping faktor-faktor apakah yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pencapaian IPM? Permasalahan tersebut cukup menarik untuk diamati.

Oleh karena itu dari uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat ketimpangan (*degree of disparity*) pendapatan di Provinsi Jawa Barat pada periode 2001-2007 dan bagaimana kecenderungannya?
2. Apakah telah terjadi peningkatan kemajuan perekonomian kabupaten/kota pada periode 2001-2007?
3. Faktor sosial dan ekonomi apa saja yang berpengaruh terhadap pencapaian IPM di Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2003-2007?

1.3 Hipotesis

Dari uraian kerangka pemikiran dan perumusan masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan hipotesa sebagai berikut :

1. Diduga tingkat disparitas pendapatan (*degree of disparity*) antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2001-2007 sangat tinggi namun cenderung menurun.
2. Diduga perekonomian seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam tahun 2001-2007 sudah mengalami pertumbuhan atau perkembangan secara merata.
3. Diduga faktor-faktor PDRB per kapita, sarana pendidikan sekolah dasar, sarana pendidikan sekolah lanjutan, rasio guru terhadap murid sekolah dasar, rasio guru terhadap murid sekolah lanjutan pertama, sarana pusat kesehatan masyarakat, jumlah dokter yang ditempatkan di puskesmas, jumlah bidan yang ditempatkan di puskesmas, kepadatan penduduk berpengaruh terhadap pencapaian IPM di Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2007.

Adapun pola hubungan variabelnya adalah sebagai berikut :

1. PDRB per kapita diduga berpengaruh positif terhadap IPM artinya makin tinggi PDRB per kapita di suatu kabupaten/kota maka IPM kabupaten/kota tersebut makin tinggi.
2. Variabel sarana pendidikan sekolah dasar diduga berpengaruh positif terhadap IPM artinya makin tinggi variabel sarana pendidikan sekolah dasar di suatu kabupaten/kota maka IPM kabupaten/kota tersebut makin tinggi.

3. Variabel sarana pendidikan sekolah lanjutan diduga berpengaruh positif terhadap IPM artinya makin tinggi sarana pendidikan sekolah lanjutan di suatu kabupaten/kota maka IPM kabupaten/kota tersebut makin tinggi.
4. Variabel Rasio Guru terhadap Murid Tingkat Sekolah Dasar diduga berpengaruh positif terhadap IPM artinya makin rendah perbandingan guru terhadap murid sekolah dasar di suatu kabupaten/kota maka IPM kabupaten/kota tersebut makin tinggi.
5. Variabel Rasio Guru terhadap Murid Tingkat Sekolah Lanjutan Pertama diduga berpengaruh positif terhadap IPM artinya makin rendah perbandingan guru terhadap murid sekolah lanjutan pertama di suatu kabupaten/kota maka IPM kabupaten/kota tersebut makin tinggi.
6. Variabel jumlah sarana pusat kesehatan masyarakat diduga berpengaruh positif terhadap IPM artinya makin tinggi jumlah sarana pusat kesehatan masyarakat di suatu kabupaten/kota maka IPM kabupaten/kota tersebut makin tinggi.
7. Variabel jumlah dokter yang ditempatkan di puskesmas diduga berpengaruh positif terhadap IPM artinya makin tinggi jumlah dokter yang ditempatkan di puskesmas di suatu kabupaten/kota maka IPM kabupaten/kota tersebut makin tinggi.
8. Variabel jumlah bidan yang ditempatkan di puskesmas diduga berpengaruh positif terhadap IPM artinya makin tinggi jumlah bidan yang ditempatkan di puskesmas di suatu kabupaten/kota maka IPM kabupaten/kota tersebut makin tinggi.
9. Variabel kepadatan penduduk diduga berpengaruh positif ataupun negatif terhadap IPM artinya makin tinggi kepadatan penduduk di suatu kabupaten/kota maka IPM kabupaten/kota tersebut makin tinggi atau rendah.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat serta kecenderungan dalam tahun 2001-2007, selain itu juga akan dilihat dan dibandingkan bagaimana ketimpangan IPM-nya.

2. Mengkaji tingkat kemajuan perekonomian antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat apabila dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan PDRB-nya pada periode tahun 2001-2007.
3. Menganalisis faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pencapaian IPM di 25 kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat antara tahun 2003-2007.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada ketimpangan antar kabupaten/kota yang ada di lingkungan Wilayah Provinsi Jawa Barat. Sementara obyek penelitian adalah PDRB riil perkapita (PDRB perkapita atas harga konstan tahun 2000), laju pertumbuhan ekonomi dan IPM dengan seluruh indikatornya.

Jangka waktu observasi untuk menganalisis tingkat disparitas pendapatan ditentukan selama tujuh tahun yakni antara tahun 2001-2007. Tingkat kemajuan kabupaten/kota akan dianalisis selama tujuh tahun yaitu antara tahun 2001-2007. Sementara itu mengingat adanya kebijakan perubahan jumlah kabupaten/kota, maka untuk menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian IPM akan digunakan data panel atau gabungan data "*cross section*" dari 25 kabupaten/kota selama lima tahun yaitu 2003-2007 sebagai data time seriesnya. Perbedaan tahun yang diobservasi antara analisis tingkat disparitas (2001-2007) dan analisis regresi disebabkan antara tahun 2002 dan 2003 terdapat tiga kabupaten/kota yang berdiri menjadi daerah otonomi baru hasil pemekaran wilayah yaitu Kota Cimahi (2002), Kota Tasikmalaya (2002) serta Kota Banjar (2003).

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, dalam memilih kebijakan dan mengalokasikan anggaran khususnya dana perimbangan provinsi kepada kabupaten/kota yang lebih efektif dalam meningkatkan variabel IPM sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Di samping itu hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan bagi riset masalah sosial dan ekonomi.

Penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan efektivitas pengaruh desentralisasi fiskal dan variabel-variabel lainnya terhadap disparitas pendapatan daerah, tingkat kemajuan daerah dan capaian IPM. Lebih lanjut, penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan dan pemikiran bagi para pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan perekonomian Indonesia dalam bidang fiskal dan kebijakan publik berkaitan dengan desentralisasi fiskal.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penulisan tesis ini, maka penelitian ini terbagi atas enam bab, dengan perincian sebagai berikut;

BAB I: PENDAHULUAN, memuat tentang pendahuluan yang menggambarkan latar belakang penulisan, rumusan masalah penelitian, hipotesis penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI, pada bagian ini penulis akan memaparkan konsep dasar desentralisasi fiskal, disparitas pembangunan dan disparitas pendapatan antarwilayah, pembangunan manusia dan indeks pembangunan manusia (IPM), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

BAB III: GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT, bab ini menjelaskan gambaran umum tentang kondisi umum Provinsi Jawa Barat, Letak strategis, visi dan misi, perkembangan pembangunan yang meliputi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, kependudukan dan aspek kesejahteraan sosial, perkembangan indeks pembangunan manusia pada periode penelitian.

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, tehnik analisis yang digunakan meliputi analisis *weighted coefficient of variation* (indeks williamson), analisis tipologi Klassen dan analisis regresi data panel, selanjutnya akan dipaparkan mengenai metode pendekatan dan pemilihan model regresi data panel, pengujian model dan kelebihan dan keterbatasan model.

Bab V: PEMBAHASAN DAN ANALISA, pembahasan pertama tentang perkembangan tingkat kesenjangan pada periode penelitian, pembahasan kedua tentang tingkat kemajuan kabupaten/kota pada periode penelitian, pembahasan ketiga tentang hasil pengujian penghitungan regresi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN, bab ini akan mengakhiri penulisan penelitian dengan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan juga memberikan saran kebijakan bagi pihak yang berwenang dan bertanggung jawab.



BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Otonomi Daerah Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan suatu proses yang bersifat dinamis. Sebagai wujud nyata terhadap komitmen otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sekaligus kemauan politik Pemerintah untuk melakukan reformasi dan demokratisasi, Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Penggantian UU tersebut tidak terlepas dari terbitnya tiga paket UU di bidang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab.

Sesuai dengan amanat yang dikandung UU Nomor 33 tahun 2004 penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah, dan keserasian hubungan antara daerah dengan Pemerintah Pusat sehingga mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan fungsi alokasi dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Fungsi-fungsi tersebut harus dilaksanakan dengan baik melalui koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antar tingkatan pemerintahan

Menurut Sri Mulyani (2009), desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang penting dan strategis. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang baik dapat mendukung terlaksananya tujuan otonomi daerah dan menjaga keutuhan bangsa dan negara.¹

Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada daerah sebagai konsekuensi logis otonomi daerah. Desentralisasi fiskal menganut prinsip *money follows function* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan. Desentralisasi fiskal dilakukan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

2.1.1 Pengertian dan Konsep Desentralisasi

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 yang dimaksud dengan desentralisasi adalah :

“Penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.”

Menurut World Bank (2000)², desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dan tanggung jawab fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah di bawahnya. Desentralisasi mencakup konsep yang luas, hal ini meliputi desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal dan desentralisasi pasar.

¹ Dirjen Perimbangan Keuangan, Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah 2009, Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia, Mei 2009, hal iv.

² World Bank Institute, “Decentralization Briefing Notes”, 2000.

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan dalam pelaksanaan pembangunan, meningkatnya kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*). Juga dapat berwujud dalam terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, juga sekaligus Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Menurut Sidik (2002), desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum, desentralisasi mencakup aspek-aspek politik (*political decentralization*); administratif (*administrative decentralization*); fiskal (*fiscal decentralization*); dan ekonomi (*economic or market decentralization*)³.

Berbagai argumen yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Tiebout (1956), Oates (1972), Tresch (1981), Breton (1996), Weingast (1995) dan sebagaimana dikutip oleh Litvack et al (1998) yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, karena :

1. Pemerintah daerah sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya;
2. Keputusan pemerintah daerah akan sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasinya.

Menurut hasil penelitian Khaleghian (2003) terhadap 140 negara yang memiliki tingkat pendapatan rendah dan tingkat pendapatan menengah, pada tahun 1980-1997 ditemukan bahwa desentralisasi mempunyai korelasi terhadap semakin baiknya hubungan pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Hal ini

³ Machfud Sidik, "Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional", Seminar Nasional: Public Sector Scorer Card, Jakarta, 2002.

berdampak positif pada semakin baiknya informasi yang diterima masyarakat dan akuntabilitas dari program-program yang dilaksanakan pemerintah lokal.⁴

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut Sidik, pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut:

- Pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan dan *enforcement*;
- SDM yang kuat pada Pemerintah Daerah guna menggantikan peran Pemerintah Pusat;
- Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

2.1.2 Faktor-Faktor Keberhasilan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi alokasi yang meliputi antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan

⁴ Khaleghian, Peyvand, *Decentralization and Public Services : The Case of Immunization*, World Bank, 2003, page 36

masyarakat. Fungsi distribusi meliputi antara lain, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. Fungsi Stabilisasi yang meliputi antara lain pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, desentralisasi fiskal adalah instrumen, bukan suatu tujuan. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan akan tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik. Sebagai tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia adalah desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui transfer ke daerah. Dengan desain desentralisasi fiskal ini maka esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah dititikberatkan pada diskresi (kebebasan) untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Penerimaan negara tetap sebagian besar dikuasai oleh Pemerintah Pusat, dengan tujuan untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berpijak pada dua hal tersebut di atas, strategi kebijakan dari *grand design* desentralisasi fiskal di Indonesia pada prinsipnya adalah bagaimana sistem yang ada saat ini dapat dikembangkan dan diperbaiki untuk disesuaikan dengan normatif dari kebijakan desentralisasi yang seharusnya dimunculkan. Dari perkembangan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, terdapat empat elemen utama desentralisasi fiskal yang harus disempurnakan, yaitu:⁵

1. sistem dana perimbangan (transfer);
2. sistem pajak dan pinjaman daerah;

⁵ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia, Jakarta, 2002

3. sistem administrasi dan anggaran pemerintahan pusat dan daerah; serta
4. penyediaan pelayanan publik dalam konteks penerapan SPM.

Sistem Dana Perimbangan; Masalah strategis pada desentralisasi fiskal di Indonesia adalah pada sistem transfer antar tingkat pemerintahan. Transfer dari pemerintah pusat pada prakteknya masih merupakan sumber pembiayaan dominan pada sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Sampai saat ini, penerapan sistem transfer di Indonesia di cirikan oleh:

- 1) Sering adanya perubahan formula untuk *block grants* (Dana Alokasi Umum) dan juga *conditional grants* (Dana Alokasi Khusus),
- 2) Peningkatan cakupan sektor dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan penerapan *earmarked* pengeluaran dari alokasi DBH yang diterima oleh daerah, dan
- 3) Perubahan total alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta
- 4) belum adanya hubungan antara *transfer* dan *expenditure assignments* atau dalam hal ini target pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Sistem Pajak Lokal dan Pinjaman Daerah; Pembatasan otonomi dari segi penerimaan cenderung berimplikasi pada penetapan retribusi baru, dan juga untuk beberapa daerah, pembatasan atau penundaan mekanisme penerusan pinjaman luar negeri, tidak berarti tidak adanya praktek defisit anggaran. Kondisi yang ada di Indonesia, pemerintah daerah di Indonesia cenderung menetapkan berbagai jenis retribusi untuk mengurangi keterbatasan jenis pajak yang berada di bawah kebijaksanaan pemerintah daerah (Lewis 2003). Praktek penetapan berbagai retribusi oleh pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan penerimaan dari pajak daerah bukan merupakan kejadian yang hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara lain di mana pemerintah daerahnya memiliki otonomi pajak yang relatif rendah juga mengalami peningkatan praktek adopsi retribusi untuk menghasilkan pendapatan tambahan (Bryson 2008). Namun, apakah keleluasaan untuk menentukan tarif pajak atau perluasan pajak daerah vis a vis penurunan alokasi transfer akan mendapatkan dukungan dari daerah, sangat tergantung dari kondisi awal keuangan publik daerah dan juga konsensus politik. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan pemerintah daerah dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer lebih memilih "status quo" dalam penerimaan pembiayaan dari pemerintah pusat (Inanga dan Osei Wusu 2004).

Sementara itu, dari sisi pinjaman daerah, perubahan regulasi dalam bentuk peningkatan batasan defisit anggaran daerah (dan juga batasan akumulasi pinjaman), kemungkinan menandakan bahwa fiskal disiplin belum sepenuhnya berjalan, atau terbatasnya sumber penerimaan untuk penyediaan barang publik, menyebabkan beberapa daerah memiliki anggaran defisit.

Administrasi Pusat dan Penganggaran Daerah; Isu tentang desentralisasi fiskal tidak hanya terbatas pada sistem penerimaan untuk pemerintah daerah, yaitu sistem transfer dan revenue assignments, tetapi juga menyangkut efisiensi dari pengeluaran pemerintah. Efisiensi pada bagian pendapatan tidak akan efektif jika tidak ada disiplin fiskal dari pengeluaran pemerintah dan peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran pusat dan daerah. Kebijakan penganggaran pada pemerintahan pusat dan daerah merupakan reformasi yang relatif baru dilakukan untuk kasus Indonesia (Harun 2007). Perubahan terbaru pada proses administrasi penganggaran di tingkat pusat dan daerah adalah menyatukan proses penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah, yang bertujuan untuk memperkuat 1) akuntabilitas dari pengeluaran (*input*), 2) keterkaitan dengan kinerja pemerintah (*output*), dan 3) keterkaitan dengan pencapaian peningkatan aspek kesejahteraan di masyarakat (*outcome*).

Penyediaan Layanan Publik dan Standar Pelayanan Minimum (SPM); Dalam konteks penyediaan layanan publik, otonomi luas untuk tingkat kabupaten/kota belum dikaitkan dengan skala ekonomis terkait dengan jenis pelayanan publik, hal yang sama terjadi pada pembagian kewenangan untuk propinsi, yang sampai saat ini lebih berfungsi sebagai lapisan representasi unit dan fungsi pemerintah pusat pada tingkat lokal. Untuk itu, terkait dengan isu pemekaran wilayah, kriteria benefit costs dari kebijakan pemekaran juga tidak disertai oleh kebijakan pemerintah pusat untuk tetap mendasarkan administrasi pelayanan berdasarkan cakupan skala ekonomis dari pelayanan publik yang terkait.

2.1.3 Tinjauan Umum Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Tinjauan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 dan Nomor 33 tahun 2004)

Dalam ketentuan umum UU Nomor 25 tahun 1999 yang dimaksud dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara

pemerintahan pusat dan daerah adalah : Suatu system pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata acara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.”

Dalam Ketentuan Umum UU Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah : “ suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.”

2.1.4 Transfer ke Daerah

Kebijakan transfer dilaksanakan dalam rangka (i) terus melaksanakan desentralisasi fiskal untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara konsisten, (ii) mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah, dan antar daerah, (iii) mengurangi kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik di daerah, serta (iv) pengalihan anggaran kementerian/lembaga yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK.

Lebih dari itu, Transfer ke Daerah dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dengan tetap memperhatikan berbagai peraturan perundangan.

Dalam nomenklatur APBN 2009 disebutkan bahwa Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Khusus (DAK). Dalam perspektif Transfer ke Daerah, Dana Perimbangan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh karena antara satu dengan yang lain saling melengkapi.

2.1.5 Sumber Pembiayaan dalam Desentralisasi Fiskal

Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut di hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik.

Peranan pajak dalam pembiayaan Daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat.

b. Dana Perimbangan

Untuk menambah pendapatan Daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara Pusat dan Daerah. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*).

Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada Daerah dengan prosentase tertentu yang diatur dalam perundang-undangan.

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan

Universitas Indonesia

DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini sebenarnya daerah yang *fiscal capacity*-nya lebih besar dari *fiscal needs* hitungan DAU-nya akan negatif.

Variabel-variabel kebutuhan daerah dan potensi ekonomi daerah. Kebutuhan daerah paling sedikit dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi daerah dicerminkan dengan potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, potensi SDA, potensi SDM, dan PDRB.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

e. Pinjaman

Untuk membiayai kebutuhan Daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), Daerah juga dapat

melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan Pusat.

Sumber Pinjaman adalah dari dalam negeri (dari pemerintah pusat, atau dengan penerbitan obligasi) dan dari luar negeri, dengan persetujuan dan melalui Pemerintah Pusat.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka. Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara (Sukirno, 2002).

2.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia (*human capital*), teknologi dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi faktor-faktor non ekonomi seperti budaya, kondisi sosial, kondisi politik dan faktor-faktor non ekonomi lainnya.

Menurut Nafziger (1997), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penduduk (tenaga kerja), pendidikan, pembentukan modal (investasi dan perkembangan teknologi, kewirausahaan (inovasi) dan sumber daya

alam. Pertumbuhan penduduk akan mendorong pertumbuhan tenaga kerja. Semakin besar jumlah tenaga kerja akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan dalam perekonomian. Tenaga Kerja sebagai salah satu factor produksi yang selalu dipakai dalam proses produksi. Peranannya dipengaruhi oleh keterampilan, tingkat pendidikan, daya kreasi tinggi yang dimiliki maka cenderung meningkatkan produktivitasnya. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dalam bentuk meningkatnya output yang dihasilkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, penduduk menurut Thomas Robert Malthus akan menghambat pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk akan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan makanan (output) yang ditawarkan. Pandangan ini telah mengabaikan peranan dari perkembangan teknologi, akumulasi modal, pengendalian tingkat kelahiran yang sebenarnya mampu mengelola jumlah makanan bagi penduduknya. Nafziger juga mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan penduduk atau tenaga kerja adalah faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang lain. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di Jepang, Amerika, Kanada dan Negara-negara Eropa Barat sangat dipengaruhi oleh pembentukan modal dan meningkatnya pengetahuan dan teknologi. Pembentukan modal juga dicerminkan oleh faktor modal dan kapital, sedangkan perkembangan teknologi ditunjukkan oleh pertumbuhan dari keseluruhan produktivitas factor produksi. Faktor kewirausahaan juga berperan penting di tingkat mikro perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi produk yang dilakukan, daya kreasi dan aspek manajerial yang berkembang pesat telah mendukung kinerja perusahaan. Faktor lain yang juga dikemukakan oleh Nafziger adalah sumber daya alam. Negara dengan sumber daya alam yang besar belum tentu memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sebaliknya negara seperti Jepang, Swiss, Singapura dan Israel bertumbuh dengan cepat meskipun jumlah sumber daya alamnya sedikit atau bahkan tidak ada. Sementara itu Saudi Arabia, Kuwait dan Negara dengan sumber daya alam melimpah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi.

Secara tradisional pertumbuhan memiliki peningkatan terus menerus pada GDP atau PDB suatu negara,. Untuk daerah, makna pertumbuhan yang tradisional difokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten atau kota.

Pendapat mengenai definisi pertumbuhan ekonomi menurut beberapa ilmuwan adalah sebagai berikut :

a. Prof Simon Kuznetz ⁶

Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

Definisi ini mempunyai tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien.

Menurut Kuznets, terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Produk Per Kapita

Laju yang tinggi dalam pertumbuhan produk per kapita dan penduduk tidak secara langsung menggambarkan laju yang tinggi di dalam kenaikan produk total.

2. Peningkatan Produktivitas

Pertumbuhan ekonomi terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya masukan sumber tenaga kerja dan modal atau semakin meningkatnya efisiensi, atau kedua-duanya. Kenaikan efisiensi berarti penggunaan output yang lebih besar untuk setiap unit input. Menurut Kuznets, laju kenaikan produktivitas ternyata dapat menjelaskan hampir keseluruhan pertumbuhan produk per kapita di negara maju.

3. Laju Perubahan Struktural yang Tinggi

Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa,

⁶ Jingham, M.L (1983). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, penerjemah D. Guritno, Edisi Sebelas, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum serta perubahan status kerja buruh.

4. Urbanisasi

Pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk di negara maju yang berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Urbanisasi pada umumnya merupakan produk industrialisasi. Skala ekonomi yang timbul dalam skala non agraris sebagai hasil perubahan teknologi menyebabkan perpindahan tenaga kerja dan penduduk secara besar-besaran dari pedesaan ke daerah perkotaan.

5. Ekspansi Negara Maju

Pertumbuhan negara tidak sama. Negara yang satu maju terlebih dahulu dibandingkan dengan negara yang lain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah. Dalam perkembangannya unsur politik atau kekuatan dalam hubungan internasional merupakan faktor penting dalam penyebaran pertumbuhan ekonomi.

Ketergantungan antar negara mengakibatkan pendidikan di negara maju menjadi merata sehingga memperbesar kemampuan mereka untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang ada. Sedangkan dampaknya pada negara berkembang tidak begitu pesat hal ini disebabkan negara berkembang tidak mempunyai kerangka sosial dan politik yang stabil dan fleksibel, yang dapat menampung perubahan struktural yang cepat dan mendorong pertumbuhan di dalam masyarakat.

6. Arus Barang, Modal dan Orang Antar Bangsa

Semakin membaiknya lalu lintas arus barang, arus modal, dan orang akan mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

2.2.2 Disparitas Pendapatan Daerah

Disparitas antar wilayah merupakan perbedaan tingkat pertumbuhan antar wilayah. Setiap negara selalu memiliki perbedaan kemajuan antar daerah. Ada daerah yang tergolong daerah maju namun ada juga yang masih merupakan daerah tertinggal. Hal ini disebabkan banyak faktor diantaranya perbedaan

perkembangan sektor-sektor ekonominya, baik sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi serta sektor jasanya.

Aspek keadilan dan pemerataan dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, tetapi juga dapat ditinjau menurut antar daerah. Secara interpersonal, menunjukkan apakah pendapatan antar individu atau kelompok anggota masyarakat sudah adil dan merata. Sementara itu antar daerah menunjukkan pemerataan yang terjadi baik antar daerah, antar provinsi maupun antar kabupaten/kota.

Pengertian tentang ketimpangan (disparitas) ekonomi banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi antara lain menurut Debraj Ray (1997)⁷ bahwa “ketimpangan ekonomi merupakan dasar dari disparitas individu yang membolehkan memiliki sesuatu barang.

Hirschman bahkan mempopulerkan teori pertumbuhan tidak berimbang⁸. Menurutnya bahwa dengan sengaja tidak menyeimbangkan perekonomian, sesuai dengan strategi yang dirancang sebelumnya adalah cara yang terbaik untuk mencapai pertumbuhan. Investasi pada industri atau sektor-sektor perekonomian yang strategis akan menghasilkan kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi pembangunan ekonomilebih lanjut.

Menurut Tulus Tambunan (2001)⁹ ada sejumlah indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis “*development gap*” atau “disparitas” antardaerah, kabupaten/kota, provinsi atau negara, yaitu :

- a. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto menurut provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Konsumsi rumah tangga per kapita, asumsi yang digunakan adalah *saving behavior* dari masyarakat tidak berubah dan pangsa kredit di dalam pengeluaran tidak berubah;
- c. *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia), secara hipotesis, semakin baik pembangunan wilayah maka semakin tinggi IPM wilayah tersebut

⁷ Debraj Ray. “Economics Development, 1999, hal 170.

⁸ Albert O. Hirschman, “The Strategy of Economics Growth, New Haven Yale, 1958, hal 184.

⁹ Tambunan, TH. Tulus, “Transformasi Ekonomi di Indonesia: teori dan Penemuan Empiris”, Salemba Empat, 2001.

- d. Kontribusi Sektoral terhadap Produk Domestik Regional Bruto; dan
- e. Struktur Fiskal.

2.2.4 Penyebab Disparitas Antarwilayah

Distribusi Produk Domestik Bruto nasional menurut wilayah atau provinsi merupakan indikator utama di antara indikator-indikator lain yang umum digunakan untuk mengukur derajat penyebaran dari hasil pembangunan ekonomi di suatu negara. Produk Domestik Regional Bruto yang relatif sama antardaerah menunjukkan suatu indikasi bahwa distribusi Produk Domestik Bruto nasional relatif merata antardaerah, yang berarti kesenjangan ekonomi antardaerah relatif kecil.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini umumnya diukur dengan pendapatan rata-rata perkapita, maka distribusi Produk Domestik Bruto nasional menurut daerah menjadi indikator yang tidak berarti dalam mengukur ketimpangan dalam pembangunan ekonomi regional jika tidak dikombinasikan dengan tingkat Produk Domestik Regional Bruto rata-rata per kapita.

Faktor-faktor penyebab Ketimpangan¹⁰:

1. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi wilayah. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
2. Alokasi Investasi. Sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi Harrod Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat I dan aju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya I di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan

¹⁰ Tambunan, Tulus TH, Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting, hal 176, Ghalia Indonesia, September 2003.

masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah, karena tidak ada kegiatan2 ekonomi yang produktif seperti industry manufaktur.

3. Tingkat mobilitas Faktor Produksi yang rendah antardaerah. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya tingkat perbedaan tingkat pendapatan per kapita antardaerah sejak perbedaan tersebut.
4. Perbedaan sumber daya alam antardaerah
5. Perbedaan kondisi demografis antardaerah terutama dalam hal jumlah pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja.
Pembagian dana alokasi umum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel tertentu diantaranya variabel jumlah penduduk dan luas wilayah. Dengan demikian tingkat kepadatan penduduk setiap daerah akan menyebabkan perbedaan besaran sumber pembiayaan dari dana alokasi umum.
6. Kurang lancarnya perdagangan antardaerah. Hal ini terutama disebabkan keterbatasan transportasi dan komunikasi. Perdagangan antar daerah meliputi barang jadi, barang modal, input antara, bahan baku material lainnya untuk produksi dan jasa. Jadi tidak lancarnya arus barang dan jasa antardaerah mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu provinsi lewat sisi permintaan dan sisi penawaran.

Hasil penelitian Williamson (1975) menunjukkan bahwa :

- a. Disparitas pendapatan antar daerah akan berkurang dengan meningkatnya perekonomian nasional.
- b. Disparitas antar daerah di negara sedang berkembang lebih tinggi dari disparitas antar daerah di negara maju.

Sedangkan tingkat kesenjangan antar wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Perpindahan tenaga kerja (*labor migration*), perpindahan modal (*capital migration*, kebijakan pemerintah pusat (*central government policy*), dan keterkaitan antar daerah (*interregional linkages*). Setiap faktor tersebut

atau kombinasinya boleh jadi cukup menyebabkan ketimpangan regional menjadi berkurang atau bertambah¹¹.

2.3 Pembentukan Modal Manusia (Human Capital)

Sejarah mencatat bahwa negara yg menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Penekanan pada investasi manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Tanah, tenaga kerja, modal fisik bisa saja mengalami *diminishing returns*, namun pengetahuan tidak. Alfred Marshall pernah mengatakan “*Although nature is subject to diminishing returns, man is subject to increasing returns, knowledge is our most powerful engine of production; it enables us to subdue nature and satisfy our wants*”.

Dalam praktik pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan SDM dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai instrumen atau salah satu faktor produksi saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrument dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghamba maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan.

Pengertian pembentukan modal manusia menurut Harbison (1962) adalah “proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif”.

¹¹ Williamson, Jeffrey G.(1977). Ketidaksamaan Regional dan Proses Pembangunan Nasional: Penggambaran Polanya (terjemahan). Jakarta : LPFEUI

Schultz (1961) mengungkapkan terdapat lima cara pengembangan sumber daya manusia yaitu : (i) fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat; (ii) latihan keterampilan yang ditujukan pada peningkatan kemampuan tenaga kerja; (iii) pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan tinggi; (iv) program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan; (v) migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah. Dalam pengertian yang luas, investasi pada modal manusia berarti pengeluaran di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial pada umumnya.

Konsekuensi peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan dalam rangka peningkatan produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan sumber daya manusia dalam kerangka *production centered development* (Tjokrowinoto, 1996 28-29). Sehingga perspektif pembangunan manusia terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan keterampilan, kesehatan. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial.

Amartya Sen (dalam Todaro, 1995), menegaskan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya diterjemahkan sebagai suatu proses ekspansi dari kebebasan positif yang dinikmati masyarakat. Ia mengamati bahwa masalah riil di Negara Sedang Berkembang adalah menurunnya kualitas kehidupan daripada rendahnya pendapatan. Sen bahkan menginterpretasikan pembangunan sebagai proses yang memperluas entitlement dan kapabilitas manusia untuk hidup sesuai yang diinginkannya

Alternatif lain strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai *people centered development* atau *putting people first* (Korten 1981:201). Artinya manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan tujuan utama dari pembangunan dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting.

Ketimpangan dalam distribusi penduduk ini menimbulkan implikasi cukup penting bagi ketimpangan percepatan pembangunan. Kawasan Barat Indonesia

lebih menarik bagi investor dibanding Kawasan Timur Indonesia. Konsentrasi penduduk yang cukup besar selain punya potensi untuk pasar juga mempunyai potensi persediaan tenaga kerja. Kedua aspek ini adalah hal yang cukup penting dipertimbangkan oleh investor yang ingin menginvestasikan modalnya. Hal lain adalah ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan mereka. Konsentrasi penduduk yang besar menuntut ketersediaan pelayanan publik yang cukup maka tidak heran Kawasan Barat Indonesia lebih lengkap.¹²

2.4 Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan masa hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar kehidupan (*standard of living*).¹³

Masa hidup (*longevity*) diukur dengan angka harapan hidup atau e_0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang dan angka partisipasi sekolah. Serta standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil per kapita, disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas marjinal yang semakin menurun dari pendapatan.

Dengan demikian terdapat tiga indeks yang menjadi komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yaitu Indeks Pendapatan (*Income Index*), Indeks Usia Harapan Hidup (*Life Expectancy Index*), dan Indeks Pendidikan (*Education Index*).

¹² Tambunan, Tulus TH.

¹³ Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hal 73-75

Rumus penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut :

$$\text{HDI} = \frac{1}{3} (\text{income index}) + \frac{1}{3} (\text{life expectancy index}) + \frac{1}{3} (\text{education index}) \quad (2.1)$$

dimana,

$$\text{education index} = \frac{2}{3} (\text{adult literacy index}) + \frac{1}{3} (\text{gross enrollment index}) \quad (2.2)$$

Indeks Pendapatan (*Income Index*) diperoleh dengan mengkonversi PPP (*purchasing power parity*) menjadi pendapatan yang disesuaikan (yang berarti bahwa pendapatan disesuaikan demi memenuhi asumsi utilitas marjinal yang semakin menurun). Yaitu dengan menghitung log natural dari pendapatan saat ini. Kemudian, untuk menemukan indeks pendapatan, kurangi log natural 100 dari log natural pendapatan saat ini, karena diyakini bahwa pendapatan per kapita paling rendah yang mungkin terdapat di semua negara selama generasi yang lalu adalah PPP\$100. Perbedaannya mencerminkan seberapa jauh negara yang bersangkutan telah melampaui pos tujuan yang terendah (*lower goalpost*). Untuk mendapatkan perspektif dari kemajuan ini, dipertimbangkan dalam hubungannya dengan jumlah maksimum pendapatan yang dapat dicapai sebuah negara untuk generasi berikutnya. UNDP mematok angka PPP\$40.000. Setelah itu perbedaan antara log natural \$40.000 dengan log natural \$100 dijadikan pembagi dari selisih log natural pendapatan saat ini dengan log natural \$100. Hasilnya adalah angka indeks yang berkisar antara 0 dan 1.

Rumus perhitungan Indeks Pendapatan

$$\text{income index} = \frac{[\log(\text{PPP income percapita}) - \log(100)]}{[\log(40.000) - \log(100)]} \quad (2.3)$$

Untuk mencari angka Indeks Usia Harapan Hidup, UNDP memulainya dengan usia harapan hidup di negara tersebut, kemudian mengurangnya dengan 25 tahun. Angka 25 tahun tersebut adalah pos tujuan paling rendah, yaitu usia harapan hidup terendah yang mungkin terdapat di semua negara selama generasi

terakhir. Kemudian, UNDP membagi hasilnya dengan 85 tahun dikurangi 25 tahun, atau 60 tahun, yang mencerminkan kisaran usia harapan hidup yang diharapkan selama generasi sebelum dan berikutnya. Hal ini berarti bahwa 85 tahun adalah perkiraan usia harapan hidup yang masuk akal (*reasonable life expectancy*), yang dapat dicoba untuk dicapai oleh sebuah negara bagi generasi yang akan datang.

Rumus perhitungan Indeks Usia Harapan Hidup

$$\text{Life Expectancy Index} = \frac{\text{Life Expectancy} - 25}{85 - 25} \quad (2.4)$$

Indeks Pendidikan (*Education Index*) terdiri dari dua bagian, yaitu indeks kemampuan baca tulis orang dewasa (*adult literacy index*) dan indeks partisipasi sekolah kasar (*gross enrollment index*). Indeks Kemampuan Baca Tulis Orang Dewasa (*adult literacy index*) dihitung dari prosentase orang dewasa yang memiliki kemampuan baca tulis. Sedangkan Indeks Partisipasi Sekolah Bruto (*gross enrollment index*) dihitung dari jumlah penduduk suatu negara atau daerah yang berusia sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah tingkat lanjut terdaftar untuk belajar di sekolah. Indeks partisipasi sekolah kasar dapat melebihi 100%, karena siswa yang berusia tua dapat kembali bersekolah, indeks ini juga dibatasi sampai 100%. Selanjutnya untuk mendapatkan indeks pendidikan (*Education Index*) secara utuh Indeks Kemampuan Baca Tulis Orang Dewasa (*adult literacy index*) dikalikan dua pertiga dan Indeks Partisipasi Sekolah Bruto (*gross enrollment index*) dikalikan dengan sepertiga. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa kemampuan baca tulis adalah karakter fundamental dari orang yang terdidik.

Rumus Perhitungan Indeks Kemampuan Baca Tulis Orang Dewasa

$$\text{Adult Literacy Index} = \frac{\text{Adult Literacy Ratio} - 0}{100 - 0} \quad (2.5)$$

Rumus Perhitungan Indeks Partisipasi Sekolah Bruto

$$\text{Gross Enrollment Index} = \frac{\text{Gross Enrollment Ratio} - 0}{100 - 0} \quad (2.6)$$

Hasil perhitungan IPM selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu tingkat pembangunan manusia rendah (*low human development*) yaitu untuk capaian 0,000 sampai dengan 0,499, tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*) yaitu untuk capaian 0,500 sampai dengan 0,799 dan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*) yaitu untuk capaian 0,800 sampai dengan 1,000.

IPM dapat menjadi indikator diantaranya, kesenjangan antara indeks yang diperoleh dengan angka 100 mencerminkan keteringgalan pembangunan manusia yaitu jarak yang harus ditempuh oleh setiap kabupaten/kota. Perbandingan selama beberapa waktu akan memperlihatkan kepada kita kemajuan atau kurangnya kemajuan suatu kabupaten/kota tertentu. Antar kabupaten/kota juga dapat dibandingkan dan diberi peringkat, dengan demikian IPM dapat berfungsi sebagai pegangan untuk alokasi sumber daya.¹⁴

2.4.2 Kelebihan dan Keterbatasan Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu kelebihan IPM adalah indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar dapat berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia.¹⁵ Indikator Pembangunan Manusia (IPM) jauh melebihi pertumbuhan konvensional. Memang suatu pertumbuhan ekonomi adalah penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya. Namun pertumbuhan bukan merupakan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi hanyalah satu alat yang penting. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusia. Dan selanjutnya bagaimana rakyat menggunakan kapabilitasnya.

Todaro memberikan beberapa catatan terhadap penggunaan IPM sebagai indikator pembangunan yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Bappenas-BPS-UNDP, Laporan Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2004.

¹⁵ Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. hal 75

1. Pembentukan IPM sebagian didorong oleh strategi politik yang didesain untuk memfokuskan perhatian pada aspek pembangunan kesehatan dan pendidikan
2. Ketiga indikator bagus tapi tidak ideal.
3. Nilai IPM suatu negara mungkin membawa dampak yang kurang menguntungkan karena mengalihkan fokus dari masalah ketidakmerataan dalam negara tersebut.
4. Alternatif *Gross National Product* per kapita dan ditambah indikator sosial masih relevan.
5. IPM adalah indikator relatif bukan absolut.

Kendati demikian menurut Todaro, IPM tetap bermanfaat setidaknya untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia antar Negara dan antardaerah.

Keterkaitan antar indikator ada keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung antara pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh hasil penelitian World Bank (1993) dan Asian Development Bank (1997) yang menemukan bahwa tingkat melek huruf yang tinggi, tingkat kematian bayi yang rendah dan tingkat kesenjangan dan kemiskinan yang rendah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat di Asia Timur dan Tenggara.

Pengaruh tidak langsung pembangunan manusia terhadap pertumbuhan melalui konsolidasi demokrasi. Tingkat melek huruf yang tinggi, kesehatan yang baik dan kesamaan kesempatan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan membantu dalam membangun consensus atas tujuan pembangunan. Demokrasi yang partisipatif merupakan alat yang efektif bagi terwujudnya stabilitas politik dan social. Dengan memberdayakan masyarakat dan inisiatif lokal maka efisiensi pilihan investasi dan penyediaan jasa meningkat.

2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM

Menurut Tambunan (2001), IPM dapat juga digunakan sebagai salah satu indikator sosial untuk mengukur tingkat kesenjangan pembangunan antar daerah. Secara hipotetik dapat dikatakan bahwa semakin baik pembangunan di suatu

wilayah semakin tinggi IPM daerah tersebut. Namun data menunjukkan bahwa korelasi antara pendapatan per kapita dan IPM tidak terlalu kuat. Misalnya tahun 1996 Jakarta menduduki posisi teratas dalam IPM dan nomor dua dalam PDRB per kapita. Sementara Kalimantan Timur paling tinggi PDRB per kapitanya tetapi IPM berada pada posisi kedelapan.¹⁶

Dengan demikian kita dapat memaklumi bahwa pada hakekatnya pembangunan manusia yang berkualitas bisa dilakukan percepatan melalui pengembangan komponen-komponen indeksinya, namun demikian tidak semua komponen dapat diperoleh melalui penyediaan fasilitas atau bantuan pemerintah saja, ada komponen IPM, khususnya daya beli yang juga memerlukan upaya-upaya yang serius dari seluruh masyarakat.

Tingkat pendapatan masyarakat yang berkaitan langsung dengan daya beli, diduga mempunyai peran yang sangat dominan dalam peningkatan kualitas hidup manusia yang diukur dengan pencapaian IPM, oleh karena itu pendapatan masyarakat yang sangat timpang akan menyebabkan kualitas hidup yang timpang juga, sehingga pada akhirnya akan mengurangi kualitas hidup manusia dalam suatu wilayah tertentu secara kumulatif. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat pencapaian IPM dipengaruhi oleh faktor pendapatan.

Penelitian Putu Eka Cahyadhi (2005) tentang pelacakan faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Provinsi Bali menunjukkan bahwa IPM sangat dipengaruhi oleh faktor pembangunan ekonomi, faktor pembiayaan pembangunan daerah, faktor kemiskinan, dan faktor kesehatan.

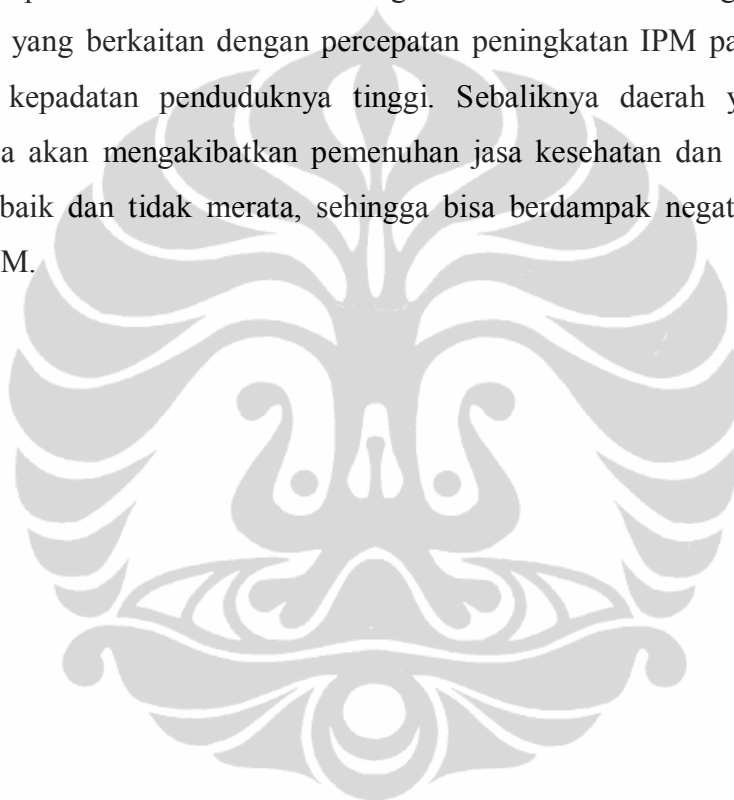
Sedangkan Jaoharul Alam (2006) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa IPM sangat dipengaruhi empat variabel yaitu variabel PDRB, rasio guru terhadap murid pada tingkat sekolah dasar, kepadatan penduduk dan prosentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih.

Dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi IPM. Pemilihan variabel penelitian didasarkan pada tiga aspek yang tercakup dalam IPM yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek pendapatan. Variabel aspek kesehatan meliputi jumlah puskesmas, jumlah dokter

¹⁶ Tambunan (2001), Transformasi Ekonomi di Indonesia, Teori dan Penemuan Empiris.

yang bertugas di puskesmas dan jumlah bidan yang bertugas di puskesmas. Untuk variabel aspek pendidikan akan digunakan variabel jumlah bangunan sekolah dasar, jumlah bangunan sekolah lanjutan pertama, rasio guru terhadap murid tingkat sekolah dasar dan rasio guru terhadap murid tingkat sekolah lanjutan pertama. Sedangkan untuk variabel aspek pendapatan akan digunakan variabel PDRB per kapita.

Kepadatan penduduk menjadi variabel bebas untuk menjadi variabel kontrol, karena pemerintah daerah cenderung untuk melakukan berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan percepatan peningkatan IPM pada daerah-daerah yang kepadatan penduduknya tinggi. Sebaliknya daerah yang padat penduduk juga akan mengakibatkan pemenuhan jasa kesehatan dan pendidikan yang kurang baik dan tidak merata, sehingga bisa berdampak negatif terhadap pencapaian IPM.



BAB 3

GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

3.1 Kondisi Umum

3.1.1 Letak Strategis

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50'- 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' - 108°48' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya:

- sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta;
- sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;
- sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.

Kondisi geografis Jawa Barat yang strategis merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kawasan Utara merupakan daerah berdataran rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah.

Selain itu, Jawa Barat yang memiliki lahan yang subur berasal dari endapan vulkanis serta banyaknya aliran sungai menyebabkan sebagian besar dari luas tanahnya digunakan untuk pertanian. Ini lebih dimungkinkan karena Jawa Barat yang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 190,2 mm, dan rata-rata hari hujan untuk tahun 2005 ini adalah 20 hari.

Provinsi Jawa Barat mencakup wilayah daratan seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Secara topografis, Jawa Barat dapat dibagi menjadi tiga kawasan : daerah dataran rendah di kawasan Utara, daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai di Selatan, dan dataran tinggi bergunung-gunung di kawasan Tengah. Ciri utama daratan "Tanah Pasundan" ini adalah bagian dari busur kepulauan gunung api baik aktif maupun tidak aktif, membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung Utara Pulau Sulawesi.

Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m dpl, wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) di bagian Tengah dengan

ketinggian 10 - 1.500 m dpl, dan wilayah dataran luas (54,03%) di bagian Utara dengan ketinggian 0 – 10 m dpl. Tutupan lahan terluas di Jawa Barat berupa kebun campuran (22,89 % dari luas wilayah Jawa Barat), sawah (20,27%), dan perkebunan (17,41%), sementara hutan primer dan hutan sekunder di Jawa Barat hanya 15,93% dari seluruh luas wilayah Jawa Barat.²⁰

3.1.2 Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008, Visi Pemerintah Daerah tahun 2003-2008, adalah “Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat 2010”. Visi ini memberikan arah pada implementasi visi daerah, yaitu “Jawa Barat dengan Iman dan Takwa, Sebagai Provinsi Termaju dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010”.

Untuk mencapai visi pemerintah daerah tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi, sebagai acuan dalam mendayagunakan potensi daerah, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Jawa Barat;
2. Memantapkan struktur perekonomian regional yang tangguh;
3. Memantapkan kinerja pemerintah daerah;
4. Meningkatkan implementasi pembangunan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang berdasarkan agama dan budaya daerah.

Sebagaimana visi dan misi tersebut, ditetapkan strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta apresiasi terhadap budaya daerah;
2. Memobilisasi sumberdaya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Mendayagunakan penelitian dan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan daerah;

²⁰ Bapeda Jawa Barat. Profil Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2007.

4. Meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia;
5. Mengembangkan ekonomi daerah melalui pengembangan 6 *core businesses* berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah dan antar golongan;
6. Memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi;
7. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;
8. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui keseimbangan penduduk dan lingkungan dalam kesatuan ruang;
10. Memelihara iklim sosial politik yang kondusif;
11. Menguatkan tatanan masyarakat dan lingkungan sosial untuk mendukung terpeliharanya ketertiban umum.

3.2 Perkembangan Pembangunan Provinsi Jawa Barat

3.2.1 Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi

Kontribusi ekonomi Jawa Barat terhadap perekonomian nasional rata-rata, selama tahun 2003 – 2007, adalah 13,8%. Faktor ini pada dasarnya dapat menjadi potensi bagi pengembangan ekonomi Jawa Barat secara lebih baik lagi. Kedekatan dengan pasar, ketersediaan bahan baku dan faktor produksi lain jelas lebih unggul bila dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Pada tahun 2007 perekonomian Jawa Barat atas dasar harga konstan tanpa migas mengalami pertumbuhan positif sebesar 6% dan merupakan pertumbuhan tertinggi, selama periode tahun 2003 – 2007. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Barat pada tahun 2007 diberikan oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 44,51% diikuti sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 20,08%.

Pada kurun waktu 2003-2007, Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang memberikan kontribusi PDRB (tanpa migas) terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Sedangkan Kota Banjar merupakan kabupaten/kota yang memberikan kontribusi PDRB paling kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Tabel 3.1
PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007 Tanpa Migas
Harga Konstan tahun 2000
(dalam milyar rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	22.421,17	23.671,43	25.056,37	26.546,19	28.150,62
2	Kab. Sukabumi	6.451,32	6.707,00	6.997,62	7.276,40	7.582,00
3	Kab. Cianjur	6.318,99	6.569,80	6.820,52	7.048,23	7.345,97
4	Kab. Bandung	20.249,51	21.388,64	22.580,28	23.853,41	25.231,88
5	Kab. Garut	8.093,89	8.418,45	8.768,41	9.128,81	9.563,13
6	Kab. Tasikmalaya	4.035,62	4.177,56	4.337,41	4.511,37	4.706,64
7	Kab. Ciamis	5.396,45	5.631,74	5.889,67	6.115,83	6.422,12
8	Kab. Kuningan	2.953,40	3.072,81	3.198,19	3.330,40	3.470,98
9	Kab. Cirebon	5.768,84	6.038,36	6.343,78	6.670,00	7.028,26
10	Kab. Majalengka	3.179,36	3.314,66	3.462,75	3.610,23	3.785,69
11	Kab. Sumedang	4.133,00	4.311,33	4.506,20	4.694,28	4.911,88
12	Kab. Indramayu	5.374,45	5.597,85	5.835,64	6.132,97	6.477,71
13	Kab. Subang	4.738,85	5.633,68	5.275,92	5.541,65	5.825,30
14	Kab. Purwakarta	5.348,16	5.547,11	5.741,81	5.964,00	6.196,75
15	Kab. Karawang	11.527,68	12.792,67	13.741,57	14.778,60	15.924,32
16	Kab. Bekasi	36.349,81	38.500,75	40.750,99	43.202,97	45.905,99
17	Kota Bogor	3.168,19	3.361,44	3.567,23	3.782,27	4.012,74
18	Kota Sukabumi	1.267,58	1.340,71	1.420,51	1.509,02	1.607,22
19	Kota Bandung	18.490,72	19.874,81	21.370,70	23.043,10	24.941,52
20	Kota Cirebon	4.481,55	4.690,38	4.919,85	5.192,35	5.512,56
21	Kota Bekasi	10.545,46	11.112,52	11.739,95	12.453,01	13.255,15
22	Kota Depok	4.169,76	4.440,88	4.750,03	5.066,13	5.418,25
23	Kota Cimahi	4.694,21	4.898,15	5.121,60	5.368,66	5.638,56
24	Kota Tasikmalaya	2.698,64	2.833,37	2.947,23	3.097,97	3.283,26
25	Kota Banjar	538,48	562,18	588,22	615,94	646,32
	Total	202.395,09	214.488,28	225.732,45	238.533,79	252.844,82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (telah diolah kembali)

Dari sisi laju pertumbuhan PDRB, pada tahun 2007, Kota Bandung merupakan kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 8,24%. Sedangkan Kabupaten Purwakarta merupakan kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan PDRB terkecil yaitu hanya 3,90%. Laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota tanpa migas diuraikan dalam tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007
Harga Konstan tahun 2000
(dalam persen)

No.	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	4,84	5,58	5,85	5,95	6,04
2	Kab. Sukabumi	3,75	3,96	4,33	3,98	4,20
3	Kab. Cianjur	3,68	3,97	3,82	3,34	4,22
4	Kab. Bandung	4,96	5,63	5,57	5,64	5,93
5	Kab. Garut	2,70	4,01	4,16	4,11	4,76
6	Kab. Tasikmalaya	3,44	3,52	3,83	4,01	4,33
7	Kab. Ciamis	4,08	4,36	4,58	3,84	5,01
8	Kab. Kuningan	3,50	4,04	4,08	4,13	4,22
9	Kab. Cirebon	4,04	4,67	5,06	5,14	5,37
10	Kab. Majalengka	3,06	4,26	4,47	4,26	4,86
11	Kab. Sumedang	3,86	4,31	4,52	4,17	4,64
12	Kab. Indramayu	4,74	4,16	4,25	5,10	5,62
13	Kab. Subang	5,22	5,09	5,95	5,04	5,12
14	Kab. Purwakarta	3,01	3,72	3,51	3,87	3,90
15	Kab. Karawang	3,08	10,97	7,42	7,55	7,75
16	Kab. Bekasi	5,50	5,92	5,84	6,02	6,26
17	Kota Bogor	6,07	6,10	6,12	6,03	6,09
18	Kota Sukabumi	5,39	5,77	5,95	6,23	6,51
19	Kota Bandung	7,34	7,49	7,53	7,83	8,24
20	Kota Cirebon	4,27	4,66	4,89	5,54	6,17
21	Kota Bekasi	5,25	5,38	5,65	6,07	6,44
22	Kota Depok	6,26	6,50	6,96	6,65	6,95
23	Kota Cimahi	4,18	4,34	4,56	4,82	5,03
24	Kota Tasikmalaya	4,43	4,99	4,02	5,11	5,98
25	Kota Banjar	0,00	4,40	4,63	4,71	4,93
	Rata-Rata	4,78	5,65	5,56	5,67	6,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (telah diolah kembali)

Ditinjau dari peranan sektor-sektor perekonomian terhadap pembentukan PDRB tanpa migas tahun 2007, terdapat 10 kabupaten yang menjadikan sektor pertanian menjadi sektor andalan yang membentuk PDRB masing-masing Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang.

Sedangkan 8 kabupaten/kota lainnya menjadikan sektor Industri sebagai sektor andalan. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten

Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Cimahi. Sedangkan 6 kabupaten/kota lainnya menjadikan sektor perdagangan sebagai sektor andalan yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Adapun peranan sektor-sektor terhadap PDRB tanpa migas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Peranan Nilai Tambah Bruto Sektor Terhadap Total PDRB
Setiap Kabupaten/Kota Tahun 2007 (tanpa MIGAS)
(dalam persen)

No.	Kabupaten/Kota	Pertanian	Pertambangan	Industri	Perdagangan	Lainnya	Total
1	Kab. Bogor	4,81	1,15	63,72	15,85	14,47	100,00
2	Kab. Sukabumi	33,83	2,94	17,18	22,65	23,40	100,00
3	Kab. Cianjur	42,98	0,14	2,94	24,18	29,76	100,00
4	Kab. Bandung	7,48	0,17	61,15	15,51	15,69	100,00
5	Kab. Garut	47,90	0,13	6,90	25,96	19,11	100,00
6	Kab. Tasikmalaya	47,61	0,26	8,14	21,98	22,01	100,00
7	Kab. Ciamis	32,01	0,38	6,68	24,65	36,28	100,00
8	Kab. Kuningan	33,18	0,92	2,05	19,74	44,11	100,00
9	Kab. Cirebon	30,16	0,42	15,48	20,50	33,44	100,00
10	Kab. Majalengka	34,54	1,94	15,46	17,64	30,42	100,00
11	Kab. Sumedang	29,02	0,14	23,58	25,78	21,48	100,00
12	Kab. Indramayu	37,45	0,22	4,83	34,08	23,42	100,00
13	Kab. Subang	41,87	0,07	13,73	21,42	22,91	100,00
14	Kab. Purwakarta	9,97	0,15	46,90	24,39	18,59	100,00
15	Kab. Karawang	9,08	0,16	56,30	18,48	15,98	100,00
16	Kab. Bekasi	2,03	1,81	79,82	8,52	7,82	100,00
17	Kota Bogor	0,24	0,00	24,69	40,15	34,92	100,00
18	Kota Sukabumi	4,65	0,01	5,07	43,46	46,81	100,00
19	Kota Bandung	0,28	0,00	26,52	39,73	33,47	100,00
20	Kota Cirebon	0,31	0,00	31,92	33,16	34,61	100,00
21	Kota Bekasi	0,85	0,00	46,29	28,57	24,29	100,00
22	Kota Depok	2,47	0,00	37,03	33,67	26,83	100,00
23	Kota Cimahi	0,15	0,00	59,72	19,34	20,79	100,00
24	Kota Tasikmalaya	7,77	0,00	14,58	29,96	47,69	100,00
25	Kota Banjar	17,86	0,33	12,05	32,18	37,58	100,00
	Provinsi Jawa Barat	12,54	0,25	44,51	20,08	22,62	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (telah diolah kembali)

3.2.2 Kependudukan dan Sumberdaya Manusia

3.2.2.1 Penduduk

Selama periode tahun 2001-2007, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 14,99%. Kabupaten Bandung merupakan kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 4.531.263 jiwa. Sedangkan yang kabupaten/kota dengan penduduk terkecil adalah Kota Banjar yaitu 180.744 jiwa. Rincian jumlah penduduk kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat seperti terlihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Penduduk (Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2003-2007

No.	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	3.791.781	3.798.212	4.100.934	4.216.186	4.316.236
2	Kab. Sukabumi	2.168.569	2.188.722	2.224.993	2.240.901	2.258.253
3	Kab. Cianjur	2.041.131	2.058.134	2.098.644	2.125.023	2.149.121
4	Kab. Bandung	4.017.100	4.086.734	4.263.934	4.399.128	4.531.263
5	Kab. Garut	2.187.882	2.203.456	2.321.070	2.375.725	2.429.167
6	Kab. Tasikmalaya	1.597.885	1.616.102	1.693.479	1.743.324	1.792.092
7	Kab. Ciamis	1.509.215	1.507.173	1.542.661	1.565.121	1.586.076
8	Kab. Kuningan	1.034.394	1.040.232	1.096.848	1.118.776	1.140.777
9	Kab. Cirebon	2.038.263	2.054.937	2.107.918	2.134.656	2.162.644
10	Kab. Majalengka	1.153.442	1.160.583	1.191.490	1.197.994	1.204.379
11	Kab. Sumedang	1.014.319	1.025.570	1.067.361	1.089.889	1.112.336
12	Kab. Indramayu	1.653.146	1.658.303	1.760.286	1.778.396	1.795.372
13	Kab. Subang	1.371.005	1.384.310	1.421.973	1.441.191	1.459.077
14	Kab. Purwakarta	745.917	757.745	770.660	784.797	798.272
15	Kab. Karawang	1.882.025	1.899.216	1.985.574	2.031.128	2.073.356
16	Kab. Bekasi	1.858.925	1.915.389	1.953.380	1.991.230	2.032.008
17	Kota Bogor	792.657	866.660	844.778	855.846	866.034
18	Kota Sukabumi	267.807	272.736	287.760	294.646	300.694
19	Kota Bandung	2.228.268	2.232.624	2.315.895	2.340.624	2.364.312
20	Kota Cirebon	272.673	276.924	281.089	285.363	290.450
21	Kota Bekasi	1.845.005	1.914.316	1.994.850	2.040.258	2.084.831
22	Kota Depok	1.309.995	1.324.452	1.373.860	1.393.568	1.412.772
23	Kota Cimahi	487.287	490.482	493.698	506.250	518.985
24	Kota Tasikmalaya	556.077	574.802	594.158	610.456	624.478
25	Kota Banjar	155.654	164.371	173.576	177.118	180.744
	Provinsi Jawa Barat	37.980.422	38.472.185	39.960.869	40.737.594	41.483.729

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (telah diolah kembali)

Sementara itu, kepadatan penduduk di wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007 rata-rata sebanyak 1.417 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Bandung sebanyak 14.081 jiwa/km² sementara kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Ciamis sebanyak 701 jiwa/km². Uraian kepadatan penduduk kabupaten/kota dijabarkan pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2003-2007
(orang/km²)

No.	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	1.274	1.698	1.833	1.885	1.929
2	Kab. Sukabumi	686	693	704	709	715
3	Kab. Cianjur	686	691	705	714	722
4	Kab. Bandung	1.758	1.789	1.866	1.926	1.983
5	Kab. Garut	1.004	1.011	1.065	1.090	1.115
6	Kab. Tasikmalaya	694	702	736	757	779
7	Kab. Ciamis	667	666	682	692	701
8	Kab. Kuningan	1.266	1.273	1.343	1.370	1.397
9	Kab. Cirebon	2.127	2.144	2.200	2.228	2.257
10	Kab. Majalengka	1.079	1.086	1.115	1.121	1.127
11	Kab. Sumedang	954	965	1.004	1.025	1.047
12	Kab. Indramayu	1.010	1.013	1.076	1.087	1.097
13	Kab. Subang	739	746	767	777	787
14	Kab. Purwakarta	985	1.000	1.017	1.036	1.054
15	Kab. Karawang	1.227	1.238	1.294	1.324	1.352
16	Kab. Bekasi	1.745	1.798	1.834	1.869	1.907
17	Kota Bogor	7.273	7.952	7.752	7.853	7.947
18	Kota Sukabumi	5.377	5.476	5.777	5.915	6.037
19	Kota Bandung	13.271	13.297	13.792	13.940	14.081
20	Kota Cirebon	7.376	7.491	7.603	7.719	7.856
21	Kota Bekasi	8.805	9.135	9.520	9.736	9.949
22	Kota Depok	6.172	6.240	6.473	6.566	6.656
23	Kota Cimahi	12.113	12.192	12.272	12.584	12.900
24	Kota Tasikmalaya	3.128	3.233	3.342	3.434	3.512
25	Kota Banjar	1.362	1.438	1.518	1.549	1.581

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (telah diolah kembali)

3.2.2.2 Bidang Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sarana sekolah yang mencukupi akan menunjang tercapainya angka partisipasi siswa. Pemerintah telah mencanangkan untuk menekan jumlah siswa putus sekolah dan meningkatkan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat dengan mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun.

Sumber daya manusia berkualitas merupakan modal bagi sebuah negara untuk mampu bersaing dengan negara lain dalam era globalisasi. Dalam merealisasikan hal tersebut, pemerintah khususnya pemerintah daerah perlu lebih mengedepankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pembangunan yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan baik formal maupun non formal.

Kemajuan di bidang pendidikan tidak terlepas dari upaya-upaya akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun, juga telah direalisasikannya role sharing pendanaan peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar yang pada tahun 2006, 2007 dan 2008 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 614 milyar, dan sisanya sebesar Rp. 236 milyar. Upaya rintisan Wajib Belajar 12 tahun juga telah memasuki tahun pelaksanaan kedua, yang melibatkan kota-kota dengan angka partisipasi di jenjang pendidikan dasar yang sudah optimal.

a. Bangunan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama

Dalam rangka mensukseskan program wajib belajar sembilan tahun maka ketersediaan bangunan sekolah untuk pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan pertama sangat penting. Secara umum bangunan sekolah dasar maupun bangunan sekolah lanjutan pertama di wilayah Provinsi Jawa Barat telah terdistribusi secara merata di seluruh kabupaten/kota, sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.6 dan tabel 3.7.

Tabel 3.6
Jumlah Bangunan Sekolah Dasar Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2003-2007
(dalam satuan unit)

No.	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	1.603	1.633	1.700	1.642	1.624
2	Kab. Sukabumi	1.148	1.178	1.227	1.176	1.176
3	Kab. Cianjur	1.222	1.241	1.292	1.292	1.224
4	Kab. Bandung	2.070	2.175	2.265	2.174	2.174
5	Kab. Garut	1.532	1.541	1.605	1.527	1.526
6	Kab. Tasikmalaya	1.095	1.088	1.133	1.088	1.089
7	Kab. Ciamis	1.066	1.063	1.107	1.061	1.059
8	Kab. Kuningan	705	702	731	692	692
9	Kab. Cirebon	929	930	968	918	902
10	Kab. Majalengka	831	836	870	826	826
11	Kab. Sumedang	615	606	631	603	604
12	Kab. Indramayu	971	878	914	878	880
13	Kab. Subang	856	907	944	882	882
14	Kab. Purwakarta	448	448	466	450	451
15	Kab. Karawang	1.030	1.061	1.104	1.052	1.063
16	Kab. Bekasi	720	742	770	773	773
17	Kota Bogor	300	314	327	312	302
18	Kota Sukabumi	128	123	128	122	122
19	Kota Bandung	929	923	961	936	938
20	Kota Cirebon	154	154	161	155	155
21	Kota Bekasi	596	628	654	647	630
22	Kota Depok	294	344	358	354	362
23	Kota Cimahi	173	184	192	143	143
24	Kota Tasikmalaya	266	265	275	265	265
25	Kota Banjar	91	87	91	87	87

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (telah diolah kembali)

Bila dilihat dari jumlah bangunan sekolah dasar maupun sekolah lanjutan pertama maka Kabupaten Bandung merupakan kabupaten/kota dengan jumlah bangunan sekolah dasar maupun sekolah lanjutan pertama paling banyak pada tahun 2007 yaitu 2.174 unit bangunan sekolah dasar dan 311 unit bangunan sekolah lanjutan pertama. Sedangkan pada tahun 2007, Kota Banjar merupakan kabupaten/kota dengan jumlah bangunan sekolah dasar dan sekolah lanjutan

pertama paling sedikit yaitu 87 unit bangunan sekolah dasar dan 13 unit bangunan sekolah lanjutan pertama.

Tabel 3.7
Jumlah Bangunan Sekolah Lanjutan Pertama
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007
(dalam satuan unit)

No.	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	196	233	259	304	304
2	Kab. Sukabumi	130	141	150	143	144
3	Kab. Cianjur	90	108	120	72	122
4	Kab. Bandung	239	277	308	311	311
5	Kab. Garut	130	134	150	162	155
6	Kab. Tasikmalaya	101	100	111	191	127
7	Kab. Ciamis	95	94	105	103	97
8	Kab. Kuningan	69	72	80	80	80
9	Kab. Cirebon	113	112	125	122	122
10	Kab. Majalengka	57	67	74	69	69
11	Kab. Sumedang	74	78	87	78	81
12	Kab. Indramayu	79	115	128	131	126
13	Kab. Subang	70	82	91	97	97
14	Kab. Purwakarta	41	47	53	51	48
15	Kab. Karawang	90	88	98	89	96
16	Kab. Bekasi	90	130	135	148	148
17	Kota Bogor	76	99	110	104	104
18	Kota Sukabumi	37	33	37	33	33
19	Kota Bandung	170	207	231	212	218
20	Kota Cirebon	40	41	45	39	42
21	Kota Bekasi	140	134	149	182	182
22	Kota Depok	79	124	138	151	137
23	Kota Cimahi	34	33	37	27	34
24	Kota Tasikmalaya	41	43	47	43	43
25	Kota Banjar	13	12	14	13	13

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (telah diolah kembali)

b. Rasio Guru Terhadap Murid

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan tidak saja didukung oleh keberadaan bangunan fisik sekolah semata. Efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di bidang pendidikan juga ditentukan oleh keberadaan guru. Jumlah guru yang memadai akan berdampak

Universitas Indonesia

positif terhadap keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Dan sebaliknya jumlah guru yang tidak memadai akan menghambat pembangunan di bidang pendidikan. Semakin kecil rasio guru terhadap murid maka diduga akan mendukung terhadap keberhasilan bidang pendidikan. Sebaliknya semakin besar rasio guru terhadap murid diduga akan menghambat keberhasilan bidang pendidikan. Rasio guru terhadap murid untuk tingkat sekolah dasar tersaji pada tabel 3.8 sedangkan untuk rasio guru terhadap murid sekolah lanjutan pertama tersaji pada tabel 3.9.

Tabel 3.8
Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Dasar Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2003-2007

No.	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	0,048	0,028	0,038	0,024	0,049
2	Kab. Sukabumi	0,053	0,029	0,042	0,033	0,050
3	Kab. Cianjur	0,056	0,037	0,053	0,053	0,053
4	Kab. Bandung	0,063	0,029	0,042	0,034	0,062
5	Kab. Garut	0,064	0,032	0,045	0,036	0,053
6	Kab. Tasikmalaya	0,088	0,053	0,077	0,053	0,056
7	Kab. Ciamis	0,122	0,063	0,091	0,063	0,062
8	Kab. Kuningan	0,096	0,056	0,083	0,063	0,061
9	Kab. Cirebon	0,057	0,037	0,053	0,030	0,032
10	Kab. Majalengka	0,094	0,048	0,067	0,059	0,057
11	Kab. Sumedang	0,099	0,059	0,083	0,063	0,057
12	Kab. Indramayu	0,061	0,037	0,053	0,038	0,055
13	Kab. Subang	0,073	0,038	0,056	0,040	0,040
14	Kab. Purwakarta	0,071	0,034	0,050	0,043	0,038
15	Kab. Karawang	0,057	0,029	0,042	0,031	0,037
16	Kab. Bekasi	0,045	0,043	0,059	0,029	0,101
17	Kota Bogor	0,067	0,048	0,063	0,063	0,061
18	Kota Sukabumi	0,079	0,020	0,026	0,045	0,050
19	Kota Bandung	0,078	0,048	0,063	0,053	0,058
20	Kota Cirebon	0,074	0,038	0,056	0,043	0,062
21	Kota Bekasi	0,057	0,031	0,053	0,034	0,119
22	Kota Depok	0,058	0,045	0,067	0,036	0,070
23	Kota Cimahi	0,073	0,034	0,053	0,034	0,060
24	Kota Tasikmalaya	0,087	0,048	0,067	0,050	0,067
25	Kota Banjar	0,089	0,045	0,067	0,053	0,065

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (telah diolah kembali)

Pada tahun 2007, rasio guru terhadap murid untuk tingkat sekolah dasar yang terkecil dimiliki Kabupaten Cirebon yaitu 0,032 guru untuk per siswa

sekolah dasar, sedangkan yang tertinggi adalah Kota Bekasi yaitu 0,119 guru untuk per siswa murid sekolah dasar.

Sementara untuk rasio guru terhadap murid untuk tingkat sekolah lanjutan pertama, pada tahun 2007, yang terkecil dimiliki Kota Tasikmalaya yaitu 0,017 guru untuk per siswa sekolah lanjutan pertama. Sedangkan yang tertinggi dimiliki Kota Sukabumi yaitu 0,090 guru per siswa sekolah lanjutan pertama.

Tabel 3.9
Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Lanjutan Pertama
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2003-2007

No.	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	0,028	0,063	0,063	0,059	0,069
2	Kab. Sukabumi	0,024	0,063	0,063	0,053	0,064
3	Kab. Cianjur	0,019	0,063	0,067	0,067	0,045
4	Kab. Bandung	0,025	0,059	0,059	0,063	0,080
5	Kab. Garut	0,025	0,063	0,067	0,053	0,068
6	Kab. Tasikmalaya	0,017	0,077	0,077	0,083	0,085
7	Kab. Ciamis	0,012	0,067	0,067	0,063	0,086
8	Kab. Kuningan	0,009	0,063	0,063	0,042	0,068
9	Kab. Cirebon	0,021	0,048	0,048	0,048	0,071
10	Kab. Majalengka	0,005	0,048	0,050	0,056	0,066
11	Kab. Sumedang	0,011	0,059	0,059	0,056	0,066
12	Kab. Indramayu	0,021	0,056	0,056	0,056	0,082
13	Kab. Subang	0,014	0,036	0,036	0,034	0,046
14	Kab. Purwakarta	0,014	0,036	0,037	0,032	0,054
15	Kab. Karawang	0,018	0,045	0,048	0,040	0,055
16	Kab. Bekasi	0,021	0,048	0,100	0,036	0,069
17	Kota Bogor	0,032	0,050	0,053	0,056	0,074
18	Kota Sukabumi	0,013	0,063	0,063	0,050	0,090
19	Kota Bandung	0,027	0,100	0,100	0,067	0,088
20	Kota Cirebon	0,017	0,063	0,063	0,063	0,072
21	Kota Bekasi	0,023	0,050	0,053	0,067	0,029
22	Kota Depok	0,039	0,071	0,071	0,071	0,050
23	Kota Cimahi	0,019	0,056	0,045	0,045	0,076
24	Kota Tasikmalaya	0,009	0,083	0,071	0,071	0,017
25	Kota Banjar	0,018	0,077	0,067	0,067	0,080

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (telah diolah kembali)

3.2.2.3 Bidang Kesehatan

a. Jumlah Puskesmas, Pustu dan Pusling

Pembangunan kesehatan harus selalu dilakukan mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan fasilitas dan sarana kesehatan. Jumlah Puskesmas yang memadai akan mendorong pelayanan kesehatan.

Tabel 3.10
Jumlah Puskesmas, Pustu dan Pusling menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2003-2007
(dalam satuan unit)

No.	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	200	200	204	196	205
2	Kab. Sukabumi	178	178	205	188	188
3	Kab. Cianjur	174	174	179	180	180
4	Kab. Bandung	218	218	237	235	235
5	Kab. Garut	203	203	205	201	201
6	Kab. Tasikmalaya	209	209	207	209	209
7	Kab. Ciamis	195	195	200	187	187
8	Kab. Kuningan	134	134	127	132	132
9	Kab. Cirebon	154	154	148	175	175
10	Kab. Majalengka	122	122	141	152	152
11	Kab. Sumedang	114	114	117	128	128
12	Kab. Indramayu	145	145	142	153	154
13	Kab. Subang	139	139	145	134	134
14	Kab. Purwakarta	76	76	87	80	80
15	Kab. Karawang	148	148	133	133	133
16	Kab. Bekasi	93	93	96	96	96
17	Kota Bogor	54	54	52	62	54
18	Kota Sukabumi	40	40	49	49	49
19	Kota Bandung	77	77	80	84	84
20	Kota Cirebon	49	49	50	51	51
21	Kota Bekasi	72	72	65	65	65
22	Kota Depok	29	29	38	49	49
23	Kota Cimahi	35	35	15	18	18
24	Kota Tasikmalaya	19	19	45	47	47
25	Kota Banjar	10	10	17	15	15
	Jawa Barat	2.887	2.887	2.984	3.068	3.021

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (telah diolah kembali)

Secara umum perkembangan jumlah puskesmas di Provinsi Jawa Barat dari 2003-2007 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, Kabupaten Bandung

merupakan kabupaten/kota dengan jumlah pukesmas terbanyak yaitu 235 unit, sedangkan Kota Banjar merupakan kabupaten/kota dengan jumlah puskesmas paling sedikit yaitu 15 unit.

b. Jumlah Tenaga Dokter dan Bidan Puskesmas

Kabupaten Bogor merupakan kabupaten/kota yang memiliki jumlah dokter puskesmas paling banyak yaitu 255 orang (tahun 2007). Sedangkan Kota Banjar memiliki jumlah dokter terkecil yaitu 9 orang.

Tabel 3.11
Jumlah Dokter Puskesmas menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2003-2007
(dalam satuan orang)

No.	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	183	245	254	261	255
2	Kab. Sukabumi	92	98	109	114	114
3	Kab. Cianjur	61	80	77	97	58
4	Kab. Bandung	195	185	173	151	121
5	Kab. Garut	113	90	85	95	95
6	Kab. Tasikmalaya	52	52	63	52	52
7	Kab. Ciamis	102	69	62	61	62
8	Kab. Kuningan	46	67	58	61	54
9	Kab. Cirebon	32	71	97	170	112
10	Kab. Majalengka	64	50	41	44	44
11	Kab. Sumedang	63	27	67	63	43
12	Kab. Indramayu	80	113	96	95	50
13	Kab. Subang	68	81	62	57	70
14	Kab. Purwakarta	57	59	59	75	77
15	Kab. Karawang	110	83	91	81	130
16	Kab. Bekasi	55	99	112	106	90
17	Kota Bogor	74	16	129	100	107
18	Kota Sukabumi	29	21	44	50	43
19	Kota Bandung	242	180	171	172	172
20	Kota Cirebon	74	61	80	89	89
21	Kota Bekasi	66	119	162	138	138
22	Kota Depok	80	90	98	89	105
23	Kota Cimahi	136	22	34	42	41
24	Kota Tasikmalaya	36	33	45	43	35
25	Kota Banjar	6	8	9	9	9
Jawa Barat		2.116	2.019	2.278	2.315	2.166

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (telah diolah kembali)

Pada tahun 2007, Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten/kota dengan jumlah bidan puskesmas terbanyak yaitu 716 orang, sedangkan Kota Cimahi merupakan kabupaten/kota dengan jumlah bidan puskesmas yang paling kecil yaitu 33 orang.

Tabel 3.12
Jumlah Bidan Puskesmas menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2003-2007
(dalam satuan orang)

No.	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	452	467	484	537	537
2	Kab. Sukabumi	257	412	238	279	279
3	Kab. Cianjur	280	402	298	265	265
4	Kab. Bandung	588	555	526	528	528
5	Kab. Garut	307	589	341	377	377
6	Kab. Tasikmalaya	304	392	324	230	230
7	Kab. Ciamis	427	611	391	632	632
8	Kab. Kuningan	287	404	326	353	353
9	Kab. Cirebon	259	776	458	716	716
10	Kab. Majalengka	392	542	236	351	351
11	Kab. Sumedang	419	462	232	245	245
12	Kab. Indramayu	341	569	370	401	401
13	Kab. Subang	261	339	288	315	315
14	Kab. Purwakarta	129	228	115	139	139
15	Kab. Karawang	317	469	361	379	379
16	Kab. Bekasi	558	444	274	295	295
17	Kota Bogor	73	102	89	96	96
18	Kota Sukabumi	51	40	39	48	48
19	Kota Bandung	186	216	221	202	402
20	Kota Cirebon	421	61	111	145	145
21	Kota Bekasi	129	155	139	155	155
22	Kota Depok	89	98	91	99	99
23	Kota Cimahi	84	23	30	33	33
24	Kota Tasikmalaya	271	124	188	95	95
25	Kota Banjar	46	46	61	36	36
	Jawa Barat	6.928	8.526	6.231	6.951	7.151

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (telah diolah kembali)

3.3 Perkembangan IPM

Laporan pembangunan manusia yang dipublikasikan oleh Badan PBB untuk Pembangunan Manusia (UNDP) telah mengungkapkan mengenai ukuran kualitas modal manusia. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator indikator lainnya. Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik.

Hasil studi Ramirez (dalam Brata, 2002) menunjukkan bahwa antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi sebetulnya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah, selain adanya peran *civil society* seperti melalui organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Alokasi antar dan dalam lembaga-lembaga tersebut dan perbedaan perilakunya dapat menjadi penyebab perbedaan kinerja pembangunan manusia sekalipun tingkat kinerja ekonominya setara.

Di sisi yang lain tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah juga pada produktivitas dan kreativitas mereka. Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Peningkatan kualitas modal manusia diharapkan juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antardaerah yang merupakan persoalan pelik bagi negara dengan wilayah yang luas dan tingkat keragaman sosial ekonomi yang tinggi.

Menurut Brata (2002), dengan pertimbangan itu maka dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi regional. Hal ini penting karena kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan

membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya.²¹

Tabel 3.13
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2007

No.	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	67,81	68,10	69,20	69,73	70,08
2	Kab. Sukabumi	67,13	67,56	68,70	68,88	69,21
3	Kab. Cianjur	65,58	66,18	66,80	67,10	67,65
4	Kab. Bandung	67,51	68,52	72,40	72,62	72,97
5	Kab. Garut	65,21	66,31	68,70	69,46	69,99
6	Kab. Tasikmalaya	67,06	68,46	70,40	70,86	71,24
7	Kab. Ciamis	69,93	70,89	69,30	69,80	70,14
8	Kab. Kuningan	67,28	68,00	68,50	69,21	69,70
9	Kab. Cirebon	63,00	63,97	66,00	66,32	67,30
10	Kab. Majalengka	67,35	68,01	66,90	68,41	68,94
11	Kab. Sumedang	69,67	70,65	70,20	70,56	71,30
12	Kab. Indramayu	61,90	63,24	63,00	65,26	66,22
13	Kab. Subang	67,42	68,20	68,20	69,86	70,03
14	Kab. Purwakarta	68,19	68,86	68,60	68,86	69,88
15	Kab. Karawang	64,33	65,04	66,40	66,95	68,45
16	Kab. Bekasi	69,78	70,52	70,40	70,72	71,55
17	Kota Bogor	73,96	74,64	74,30	74,57	74,57
18	Kota Sukabumi	73,40	73,96	72,40	73,00	73,66
19	Kota Bandung	77,15	77,17	74,30	74,52	74,86
20	Kota Cirebon	71,00	71,92	73,70	73,80	73,87
21	Kota Bekasi	73,49	74,95	74,60	74,82	75,31
22	Kota Depok	76,13	76,85	77,10	77,67	77,89
23	Kota Cimahi	71,98	73,83	73,10	73,35	74,42
24	Kota Tasikmalaya	69,78	71,05	72,10	72,27	72,75
25	Kota Banjar	70,96	71,52	69,40	69,64	70,17
	Provinsi Jawa Barat	67,87	68,36	69,35	70,32	70,71

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

²¹ Brata, Aloysius Gunadi. Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan (Kajian Ekonomi Negara Berkembang), Volume 7, No.2.2002.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat serius untuk melaksanakan pembangunan manusia. Upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia di wilayah Provinsi Jawa Barat tercantum dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2003-2008. Hal ini dilaksanakan melalui prioritas pembangunan daerah Misi Pertama yaitu prioritas ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditempuh melalui upaya peningkatan pendidikan dan kesehatan, dengan pendekatan siklus hidup dan pemberdayaan masyarakat secara proporsional dalam rangka peningkatan daya saing sumber daya manusia Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah bertekad untuk mencapai angka IPM 80 pada tahun 2010. Perkembangan kualitas sumber daya manusia Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian IPM. Pada Tahun 2007, IPM Jawa Barat mencapai angka 70,71, meningkat sebesar 0,39 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,32. Dalam rentang 2003–2007, IPM Jawa Barat meningkat sebesar 2,84 dari angka 67,87 pada tahun 2003 menjadi 70,71 pada tahun 2007.

Pada tahun 2003 terdapat 12 kabupaten/kota yang mempunyai capaian IPM di bawah capaian rata-rata Provinsi yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang. Dan pada tahun 2007, walaupun capaian IPM Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan, jumlah kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM di bawah rata-rata Provinsi mengalami peningkatan menjadi 13 kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan capaian pembangunan manusia di wilayah Jawa Barat belum terwujud secara merata.

3.4 Perkembangan Komponen IPM

Jika dilihat dari komponen IPM, maka sumbangan terbesar diberikan oleh komponen indeks pendidikan, terutama dari indeks angka melek huruf (*adult literacy index*). Setelah Indeks Pendidikan, Indeks Usia Harapan Hidup

merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar kedua dan yang terakhir adalah Indeks Pendapatan.

Tabel 3.14
Perkembangan Komponen IPM Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2007

Komponen IPM	2003	2004	2005	2006	2007
Angka Harapan Hidup	64,94	65,34	66,57	67,40	67,62
Angka Melek Huruf	93,60	93,96	94,52	94,90	95,63
Rata-Rata Lama Sekolah	7,20	7,37	7,46	7,46	7,82
Paritas Daya Beli	553,70	554,57	556,10	561,10	560,19

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.15
Perkembangan Indeks Komponen IPM Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2007

Indeks	2003	2004	2005	2006	2007
Angka Harapan Hidup	66,57	67,23	69,28	70,67	71,03
Angka Melek Huruf	93,60	93,96	94,52	94,90	95,63
Rata-Rata Lama Sekolah	48,00	49,13	49,73	49,73	52,13
Indeks Pendidikan	78,40	79,02	79,59	79,84	81,13
Paritas Daya Beli	58,63	58,83	59,18	60,34	60,13

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

a. Angka Harapan Hidup

Capaian indeks angka harapan hidup pada tahun 2003 sebesar 66,57 persen meningkat menjadi 71,03 persen pada tahun 2007 atau naik sebesar 4,46 poin. Peningkatan capaian indeks angka harapan hidup tertinggi terjadi pada tahun 2005, yang meningkat 2,05 poin dari tahun 2004. Hal ini diprediksi merupakan dampak keberhasilan dari pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) yang dilakukan pertama kali oleh pemerintah pada tahun 2005.

Namun demikian, angka harapan hidup di Provinsi Jawa Barat masih jauh dari harapan karena data statistik menunjukkan bahwa angka kematian bayi pada tahun 2007 di wilayah Provinsi Jawa Barat masih tergolong tinggi 40,26 persen. Sehingga harus ada upaya yang lebih keras lagi dari pemerintah untuk

menurunkan tingkat kematian bayi dan balita, serta penanganan status gizi balita harus menjadi prioritas.

b. Angka Melek Huruf

Capaian indeks Angka Melek Huruf di Provinsi Jawa Barat selama periode 2003-2007 mengalami perkembangan yang relatif baik, pada tahun 2003 capaian indeks Angka Melek Huruf adalah sebesar 93,60 persen dan meningkat pada tahun 2007 menjadi 95,63 persen atau naik 2,03 poin.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Dalam perhitungan capaian IPM di Jawa Barat, indeks pendidikan tidak memasukkan unsur *Gross Enrollment Index*, tetapi menggunakan *Mean Year Schooling* (Rata-rata Lama Sekolah). Rata-rata Lama Sekolah di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang relatif baik. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2003 sebesar 7,2 tahun dan meningkat menjadi sebesar 7,82 tahun pada tahun 2007. Pencapaian rata-rata lama sekolah yang belum begitu besar kemungkinan disebabkan karena masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun yang tidak sekolah.

Peningkatan komponen Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah ini memberikan dampak positif terhadap kenaikan indeks pendidikan yaitu pada tahun 2003 indeks pendidikan sebesar 78,40 persen meningkat menjadi 81,13 persen di tahun 2007 atau naik sebesar 2,73 poin.

d. Daya Beli

Menurut data Suseda 2003, kemampuan daya beli penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar secara minimal agar dapat hidup secara layak mencapai sebesar Rp553.700 meningkat menjadi sebesar Rp560.190 pada tahun 2007. Dalam kurun waktu tahun 2003-2007, peningkatan dari indeks daya beli penduduk Provinsi Jawa Barat masih relatif kecil, yaitu hanya mencapai sebesar 6,49 poin.

BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan data-data sekunder yang bersifat kuantitatif, yang diperoleh dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi-instansi terkait di Provinsi Jawa Barat seperti Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta Badan Pusat Statistik. Selain itu penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber literatur dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

4.2 Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisa data secara deskriptif dengan menggunakan analisis berupa :

4.2.1 Indeks Williamson

Untuk memahami konvergensi dan divergensi dalam perkembangan suatu wilayah, Williamson mengamati tingkat kesenjangan di berbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda. Williamson menilai tingkat kesenjangan dengan memperkenalkan Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan perkapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional. Jadi, indeks williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standar deviasi. Dengan demikian makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar dan begitupun sebaliknya semakin rendah Indeks Williamson maka akan semakin rendah kesenjangan di wilayah tersebut. Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi.²²

²² Williamson, Jeffrey G. (1977)

Williamson menggunakan indeks ini untuk mengukur tingkat kesenjangan dari berbagai negara dengan tahun yang relatif sama. Dalam melakukan perhitungan Williamson menggunakan data PDB perkapita serta jumlah penduduk dari berbagai negara. Hasil perhitungan ini kemudian digabungkan dengan tingkat perkembangan ekonomi (berdasarkan tingkat PDB) negara-negara tersebut dari Kuznets. Berdasarkan penggabungan kedua perhitungan tersebut, Williamson menyatakan bahwa ada hubungan sistematis antara tingkat pembangunan nasional dan ketidaksamaan regional.

Rumus Perhitungan Indeks Williamson :

$$IW = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \cdot P_i}{P}} \quad (4.1)$$

dimana,

IW adalah Indeks Ketimpangan regional

Y_i adalah pendapatan regional atau PDRB per kapita kabupaten/kota ke i di wilayah Provinsi Jawa Barat

Y adalah pendapatan regional atau PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat

P_i adalah jumlah penduduk pertengahan tahun kabupaten/kota ke i

P adalah jumlah penduduk pertengahan tahun Provinsi Jawa Barat

Rumus Indeks Williamson ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar atau sama dengan nol dan lebih kecil dari satu. Ekstrimnya jika angka indeks sama dengan nol maka menandakan tidak terjadi ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sementara bila angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukkan adanya ketimpangan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

HT. Oshima (dalam Sutawijaya, 2004:46) menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah ketimpangan dalam masyarakat ada

Universitas Indonesia

pada ketimpangan taraf rendah, sedang, atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut; ketimpangan taraf rendah bila indeks Williamson $< 0,35$, ketimpangan taraf sedang bila indeks Williamson antara $0,35 - 0,50$ dan ketimpangan taraf tinggi bila indeks Williamson $> 0,5$.²³

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui sebaran distribusi pendapatan di Kabupaten Semarang. Berbagai kecenderungan bisa terjadi dalam masalah kesenjangan antar daerah (IW), ada daerah yang mempunyai tren kesenjangan yang menurun, ada yang makin meningkat dan ada yang berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Melalui perhitungan IW pada periode 2001-2007 di wilayah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menunjukkan tren atau kecenderungan kesenjangan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam periode tersebut, sehingga akan tergambar suatu gambaran pola ketidakmerataan antar waktu yang terjadi, dengan menggunakan metode yang sama akan dianalisis variasi pencapaian IPM setiap kabupaten/kota untuk melihat disparitas atau kesenjangan IPM.

Untuk melengkapi hasil penghitungan indeks ini serta untuk menggambarkan tingkat perkembangan pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara horizontal pada masing-masing kabupaten/kota, maka digunakan alat analisis lain yaitu Tipologi Klassen

4.2.2 Tipologi Klassen

Alat analisis tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebagai sumbu horisontal.

Syafrizal (dalam Sutarno dan Kuncoro, 2003) memetakan daerah dalam hal ini kabupaten/kota yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi/golongan, yaitu: kabupaten/kota yang maju dan cepat tumbuh (*high*

²³ Wijayanto, Dani Yus (2005). Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Semarang (Tahun 1999-2003). UNNES. Semarang. Hal.30.

growth and high income), kabupaten/kota maju tapi tertekan (*high income but low growth*), kabupaten/kota yang berkembang cepat (*high growth but low income*), dan kabupaten/kota yang relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Penggolongan suatu daerah dilakukan berdasarkan perbandingan antara laju pertumbuhan ekonomi (LPE) kabupaten/kota terhadap laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi dan PDRB per kapita kabupaten/kota terhadap angka PDRB per kapita rata-rata Provinsi.

Berdasarkan Tipologi Klassen ada empat kelompok daerah kabupaten/kota dalam perkembangan pembangunan antar kabupaten/kota, yaitu :

Gambar 4.1
Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Tipologi Klassen

	Kuadran III	Kuadran I
Pertumbuhan	Kabupaten/Kota Yang Berkembang Cepat LPE _i > LPE rata-rata Prov PDRB _i < PDRB rata-rata Prov	Kabupaten/Kota Maju dan Cepat Tumbuh LPE _i > LPE rata-rata Prov PDRB _i > PDRB rata-rata Prov
	Kuadran IV	Kuadran II
	Kabupaten/Kota Relatif Tertinggal LPE _i < LPE Rata-rata Prov PDRB _i < PDRB rata-rata Prov	Kabupaten/Kota Maju tetapi Tertekan LPE _i < LPE rata-rata Prov PDRB _i > PDRB rata-rata Prov
	PDRB per kapita	

Sumber : Syafrizal (dalam Sutarno dan Kuncoro, 2003)

Berdasarkan tipologi Klassen, kabupaten/kota yang ada akan dihitung dan dibandingkan LPE dan PDRB per kapita masing-masing dengan LPE dan PDRB per kapita rata-rata Provinsi Jawa Barat. Hasil dari perhitungan tersebut akan menghasilkan 4 kuadran kelompok kabupaten/kota berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan PDRB per kapitanya.

Kuadran I adalah **Kabupaten/Kota Maju dan Cepat Tumbuh** (*high growth and high income*) yaitu kabupaten/kota yang laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota.

Kuadran II adalah **Kabupaten/Kota Maju tetapi Tertekan** (*high income but low growth*), yaitu kabupaten/kota yang PDRB per kapita lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota, tetapi laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota.

Kuadran III adalah **Kabupaten/Kota yang Berkembang Cepat** yaitu kabupaten/kota yang laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota, tetapi PDRB per kapitanya lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota.

Kuadran IV adalah **Kabupaten/Kota yang Relatif Tertinggal** yaitu kabupaten/kota laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota.

Hasil pengelompokkan kabupaten/kota ini juga akan digunakan untuk membandingkan tingkat pencapaian IPM dari masing-masing kabupaten/kota. Apakah pada kabupaten/kota yang termasuk kategori maju dan tumbuh cepat, tingkat pencapaian IPM-nya juga tinggi atau sebaliknya. Demikian juga apakah pada kabupaten/kota yang relatif tertinggal, pencapaian IPM-nya juga rendah dibandingkan pencapaian IPM pada tipologi kabupaten/kota lainnya.

Setelah gambaran mengenai variasi pencapaian IPM pada masing-masing tipe kabupaten/kota diperoleh, maka untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPM digunakan analisis regresi linier berganda.

4.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis Regresi data panel digunakan untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi pencapaian IPM di 25 Kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat selama periode 2003-2007. Hal ini dilakukan mengingat pengamatan terhadap IPM baru berkembang dan menjadi perhatian pemerintah pada akhir dekade sembilan puluhan, sehingga data yang tersedia sangat terbatas.

Menurut Baltagi (1995) dalam Khusaini (2002) keuntungan menggunakan data panel adalah :

1. Mampu mengontrol heterogenitas individu
2. Banyak memperoleh informasi lebih bervariasi, mengurangi koleniaritas antar variabel, meningkatkan degree of freedom dan lebih efisien
3. Lebih baik untuk studi *dynamics of adjustment*.
4. Mampu lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diatasi dalam data cross section murni atau data time series murni.
5. Dapat menguji dan mengembangkan model perilaku yang lebih kompleks

Putu Eka Cahyadi (2005) bentuk model penelitian yang dibuat adalah

$$\mathbf{IPM = f(IPK, IPEND, IKES, IDEM)}$$

Dimana :

IPM = IPM Kabupaten/kota

IPK = Indikator Perekonomian Kabupaten/kota

IPEND = Indikator Pendidikan Kabupaten/kota

IKES = Indikator Kesehatan Kabupaten/kota

IDEM = Indikator Demografi

Sementara itu, Alam (2005) mengembangkan model di atas menjadi :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7$$

Dimana :

Y = IPM

X₁ = PDRB per kapita

X₂ = sarana pendidikan dasar

X₃ = rasio guru terhadap murid

X₄ = jumlah sarana kesehatan

X₅ = jumlah tenaga medis

X₆ = kepadatan penduduk

X₇ = jumlah RT terhadap akses air bersih

Penulis mengembangkan model penelitian berdasarkan kedua model tersebut. Dalam penelitian ini kami menempatkan IPM sebagai variabel terikat, sedangkan beberapa variabel bebasnya adalah variabel yang diduga berpengaruh terhadap IPM, maka model regresi yang akan dikembangkan adalah

Y = IPM Kabupaten/kota
 X₁ = Jumlah Bangunan Sekolah Dasar
 X₂ = Jumlah Bangunan Sekolah Lanjutan Pertama
 X₃ = Rasio Guru terhadap murid pada tingkat sekolah dasar
 X₄ = Rasio Guru terhadap murid pada tingkat sekolah lanjutan pertama
 X₅ = Jumlah Puskesmas
 X₆ = Jumlah Dokter yang bertugas di Puskesmas
 X₇ = Jumlah Bidan yang bertugas di Puskesmas dan Bidan Desa
 X₈ = PDRB perkapita kabupaten/kota ADHK 2000
 X₉ = Kepadatan Penduduk di Kabupaten/kota.

Definisi variabel-variabel tersebut secara operasional adalah sebagai berikut, yaitu :

1. IPM adalah Indeks komposit yang digunakan sebagai alat ukur yang menggambarkan pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan daya beli. Dihitung dari rata-rata indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.
2. Jumlah Bangunan Sekolah Dasar adalah jumlah bangunan sekolah tingkat dasar yang meliputi bangunan sekolah dasar dan bangunan madrasah ibtidaiyah.
3. Jumlah Bangunan Sekolah Lanjutan Pertama adalah jumlah bangunan sekolah tingkat lanjutan pertama yang meliputi bangunan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sekolah menengah pertama dan bangunan madrasah tsanawiyah.

4. Rasio Guru terhadap Murid pada Tingkat Sekolah Dasar adalah perbandingan jumlah guru sekolah dasar dan guru madrasah ibtidaiyah terhadap jumlah murid sekolah dasar dan murid madrasah ibtidaiyah.
5. Rasio Guru terhadap Murid pada Tingkat Sekolah Lanjutan Pertama adalah perbandingan jumlah guru sekolah lanjutan tingkat pertama dan guru madrasah ibtidaiyah terhadap jumlah murid sekolah dasar dan murid madrasah ibtidaiyah.

Tabel 4.1
Indikator dan Variabel-Variabel Penelitian

Indikator	Variabel	Satuan	Notasi Penulisan	Keterangan
IPM	IPM	0-100	IPM	Variabel Terikat (Y)
Aspek Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar	Unit	SARSD	Variabel Bebas 1 (X ₂)
	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	Unit	SARSLP	Variabel Bebas 2 (X ₃)
	Rasio Guru per Murid Sekolah Dasar	Guru per murid	MRGSD	Variabel Bebas 3 (X ₄)
	Rasio Guru per Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	Guru per murid	MRGSLP	Variabel Bebas 4 (X ₅)
Aspek Kesehatan	Jumlah Puskesmas	unit	PUSKES	Variabel Bebas 5 (X ₆)
	Jumlah Dokter di puskesmas	orang	DOKPUS	Variabel Bebas 6 (X ₇)
	Jumlah Bidan Puskesmas	orang	BIDPUS	Variabel Bebas 7 (X ₈)
Aspek Pendapatan	PDRB per kapita	Rupiah	PDRBKP	Variabel Bebas 8 (X ₁)
Aspek Kependudukan	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	DTPDK	Variabel Bebas 9 (X ₉)

6. Jumlah Puskesmas adalah jumlah sarana kesehatan umum berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling.
7. Jumlah Dokter yang Bertugas di Puskesmas adalah jumlah tenaga dokter umum dan dokter gigi yang ditempatkan di Puskesmas.
8. Jumlah Bidan yang Bertugas di Puskesmas dan Bidan Desa adalah jumlah tenaga bidan yang ditempatkan di Puskesmas maupun bidan desa.
9. PDRB per kapita adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada atas dasar harga konstan tahun 2000.
10. Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota adalah jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota dibandingkan dengan luas wilayah.

Dalam penelitian ini, penulis memilih variabel bebas yang digunakan untuk mewakili (*proxy*) aspek pendidikan yaitu jumlah bangunan sekolah dasar, jumlah bangunan sekolah lanjutan pertama, rasio guru terhadap murid pada tingkat sekolah dasar dan rasio guru terhadap murid pada tingkat sekolah lanjutan pertama. Hal ini didasarkan program yang dilaksanakan oleh pemerintah di bidang pendidikan yaitu Program Pendidikan Dasar 9 Tahun atau lulus sekolah lanjutan tingkat pertama.

4.4 Pendekatan dan Pemilihan Model

Dalam analisis model regresi data panel ada tiga pendekatan yaitu (1) *Pooled Least Squares*, (2) Pendekatan *Fixed Effect* (Efek Tetap), dan (3) Pendekatan *Random Effect* (Efek Acak)²⁴

4.4.1 *Pooled Least Squared*

Dalam pendekatan ini estimasi model regresi dengan data panel tidak memperhatikan dimensi waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu.

²⁴ Widarjono, Agus (2007). *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi*. hal 249-262.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_i X_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4.1)$$

Dimana :

Y_i = Variabel terikat untuk pengamatan ke i periode t (IPM)

β_0 = konstanta atau intercept

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_t$ = koefisien regresi

$X_1, X_2, X_3, \dots, X_t$ = Variabel bebas (variabel sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap pencapaian IPM)

Untuk menduga parameter dari persamaan regresi data panel digunakan metode OLS (*Ordinary Least Squares*) yaitu dengan mengoptimumkan jumlah kuadrat dari residual yang merupakan jarak dari nilai pengamatan dengan garis regresi.

4.4.2 *Fixed Effect*

Kelemahan asumsi pada metode *Pooled Least Squares* adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan konstan antarobjek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Model ini dikenal dengan model regresi *fixed effect* (efek tetap). Efek Tetap di sini maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). Pada model fixed effect ini dimasukan variabel dummy dengan tujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model sebenarnya.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_i X_{it} + d_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4.2)$$

4.4.3 *Random Effect*

Dimasukkannya variabel dummy di dalam model *Fixed Effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Namun hal ini berdampak pada berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Dalam pendekatan *Random Effect*, model regresi data panel diestimasi dengan mengasumsikan dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu serta bersifat random (stokastik).

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \epsilon_{it} \quad (4.3)$$

4.4.4 **Pemilihan Model**

Untuk menguji model mana yang paling cocok dengan karakteristik data sehingga mendapatkan estimator yang *unbiased*, maka biasanya dilakukan dua macam pengujian yaitu uji F dan uji Hausman

a. Pengujian F untuk pemilihan model *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect*

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan FE lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy dengan melihat *Sum Squared Residual*.

$$F_{n+T-2, NT-N-T} = \frac{(SSR_1 - SSR_2) / (N+T-2)}{(SSR_2) / (NT-N-T)} \quad (4.4)$$

Dimana :

SSR_1 = Sum Squared Residual Model *Pooled Least Square*

SSR_2 = Sum Squared Residual Model *Fixed Effect*

N=Jumlah kabupaten/kota

T = Jumlah waktu

dan

H_0 : Pooled Least Squared

H_1 : Fixed Effect

Jika dari hasil perhitungan tersebut F uji lebih besar dari F tabel, maka model yang cocok untuk karakteristik data yang ada adalah model *Fixed Effect*.

b. Uji Lagrange Multiplier untuk pemilihan model Pooled Least Square atau Random Effect

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari model *Pooled Least Square*. Uji LM didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Adapun rumus yang digunakan dalam Uji LM adalah sebagai berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (T\bar{\hat{e}}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_t \hat{e}_{it}^2} - 1 \right]^2 \quad (4.5)$$

Dimana :

N adalah banyaknya cross section

T adalah banyaknya series

\hat{e} adalah *residual pooled least square*

dan

H_0 : *Pooled Least Squared*

H_1 : *Random Effect*

Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-squares maka menolak hipotesis nul. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode Random Effect dibanding dengan metode Pooled Least Square. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai kritis maka kita menerima hipotesis nul, artinya estimasi yang tepat adalah dengan menggunakan metode *Pooled Least Square*.

c. Uji Hausman untuk pemilihan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*

Pengujian Hausman untuk menentukan pemilihan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Uji Hausman mengikuti distribusi chi-squares dengan derajat kebebasan sebanyak variabel independen. Adapun rumus yang digunakan dalam Uji Hausman adalah sebagai berikut :

$$H = Q' \text{Var} (Q)^{-1} Q \quad (4.6)$$

Dimana :

$$Q = (\beta_{fe} - \beta_{re})$$

$$\text{Var} (Q) = \text{Var} (\beta_{fe}) - \text{Var}(\beta_{re})$$

Bila nilai Hausman $>$ Chi-Square maka metode *Fixed Effect* lebih baik untuk mengestimasi data panel dibandingkan metode *Random Effect*.

Bila data yang digunakan dalam pengujian merupakan sebagian kecil sampel dari populasi maka akan didapatkan error terms e_{it} yang bersifat random sehingga model *Random Effect* lebih tepat dibandingkan *Fixed Effect*. Namun bila data yang digunakan dalam pengujian adalah populasi maka *Fixed Effect* akan lebih tepat dari *Random Effect*.

4.5 Pengujian Model

Pengujian model ini lebih diarahkan kepada uji model dan uji asumsi pada model regresi data panel, sedangkan untuk Indeks Williamson dan Tipologi Klassen sudah cukup jelas dapat dilihat dari hasil analisis, pengujian model dimaksud meliputi:

- a) Uji Parsial (uji t), dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam model regresi benar-benar mempunyai pengaruh yang berarti terhadap variabel terikatnya. Statistik uji yang digunakan adalah statistik t hitung yang merupakan rasio antara koefisien regresi terhadap standard errornya. Dalam hal ini digunakan p-value (probabilitas menerima H_0) atau dapat juga disebut signifikansi t yang dibandingkan dengan taraf uji

α . Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.

- b) Uji Hipotesis Koefisien Regresi secara menyeluruh (uji F). Uji F ini dilakukan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance* = ANOVA). Uji F dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{1 - R^2 / (n - k)} \quad (4.7)$$

Bila $F \text{ hitung} > F \text{ kritis}$, maka kita menolak H_0 dan sebaliknya jika $F \text{ hitung} < F \text{ kritis}$ maka menerima H_0 .

- c) Uji Perubahan Struktural Model Regresi (Uji Chow). Uji Chow ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik F dengan formula sebagai berikut:

$$F[(K, n_1 + n_2 - 2k)] = \frac{(RSS_R - RSS_{UR})/k}{(RSS_{UR})/(n_1 + n_2 - 2k)} \quad (4.8)$$

Software Eviews telah menyediakan fasilitas untuk melakukan uji Chow.

- d) Uji asumsi Ordinary Least Squares (OLS), meliputi :

(1) Heterokedastisitas

Heteroskedstisitas berarti variasi error peramalan tidak sama untuk semua pengamatan [$E(u^2_i) = \sigma^2_i$]. Dengan software Eviews dapat dideteksi dengan menggunakan uji statistik white heteroscedasticity dengan hipotetesis : nilai white test akan mengikuti distribusi chi square dengan degree of freedom sebanyak variabel bebasnya.

H_0 = Homoskedastisitas

H_1 = Heteroskedastisitas

Jika nilai $n \cdot R \leq x^2$ keputusannya adalah terima H_0 .

Jika dalam suatu model regresi ada masalah heteroskedastisitas sementara hasil pengujian parsial (uji t) dan uji keseluruhan (uji F)

menunjukkan bahwa pengaruhnya signifikan maka masalah tersebut tidak perlu di atasi.

Untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti transformasi ke dalam bentuk *double log*, *weighted least squares* atau menggunakan *Generalized Least Square (GLS)*, atau pada Eviews telah disediakan fasilitas Metode White.

(2) Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya keterkaitan yang kuat antar variabel bebas. Untuk mendeteksinya dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya R^2 yang cukup tinggi, hasil pengujian overall signifikan namun hasil pengujian parsial semua atau beberapa tidak signifikan.

Untuk mengatasinya : tidak perlu diatasi karena estimatornya masih bersifat *Best Linier Unbiased Estimate (BLUE)* (dengan catatan seluruh hasil pengujian signifikan), mengeluarkan variabel bebas yang menyebabkan multikolinieritas.

(3) Autokorelasi

Autokorelasi berarti adanya korelasi antara data-data pengamatan, munculnya suatu data dipengaruhi data sebelumnya. Kondisi ini umumnya terjadi pada data *time series*, sementara pada data *cross section* tidak terjadi.

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat digunakan statistik Durbin Watson (DW stat) dengan aturan sebagai berikut :

Auto (+)	Grey	Tidak Ada	Grey	Auto (-)
0	d_L	$d_u - 2$	$4 - d_u$	$4 - d_L$

4.6. Kelebihan dan Keterbatasan Model

Kelebihan IW adalah mudah dan praktis untuk melihat adanya ketimpangan atau disparitas antar region maupun wilayah dalam satu region tertentu, sedangkan kelemahan indeks ini adalah karena bersifat agregat, sehingga tidak dapat diketahui daerah mana saja yang memberikan kontribusi terhadap disparitas.

Namun demikian karena tujuan penulisan itu sendiri hanya untuk melihat tingkat disparitas yang terjadi di Wilayah Provinsi Jawa Barat, maka penggunaan indeks ini sudah cukup untuk digunakan.

Mengingat IW hanya mampu memberikan gambaran tentang terjadinya ketimpangan secara agregat dari tahun ke tahun, akan tetapi tidak bisa memberikan gambaran mengenai variasi kemajuan atau pertumbuhan perekonomian masing-masing kabupaten/kota, maka untuk mencoba mengungkap tingkat kesejahteraan setiap kabupaten/kota dari sisi pertumbuhan PDRB per kapita dan LPE-nya, digunakan tipologi Klassen.

Tipologi Klassen mempunyai kelebihan dapat mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB-nya sehingga dapat dilihat tingkat kemajuan berdasarkan perkembangan pendapatan dan LPE masing-masing kabupaten/kota. Kelemahan alat analisis ini adalah karena terlalu sederhana, sehingga tidak dapat mengungkap tingkat kesejahteraan secara menyeluruh.

Pendekatan mengenai tingkat kesejahteraan yang dianalisa dengan menggunakan model Tipologi Klassen hanyalah pendekatan dari sisi ekonomi, belum mencakup variabel lain, khususnya variabel sosial. Di sisi lain akhir-akhir ini para pemerhati kesejahteraan manusia telah mensyaratkan agar penilaian tingkat kesejahteraan manusia mencakup variabel ekonomi dan non ekonomi, salah satu ukuran yang sedang digalakkan adalah IPM. Kelemahan kedua metode dicoba disempurnakan dengan model ketiga yaitu regresi data panel yang akan mencoba mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IPM.

BAB 5 PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Perkembangan Tingkat Kesenjangan Pendapatan

Dasar perhitungan Indeks Williamson adalah berupa persamaan probabilitas antara: $0 < IW < 1$, yang berarti apabila nilai IW mendekati 0, maka tingkat kesenjangan pendapatan antardaerah juga semakin kecil (tingkat pemerataan semakin baik), sedangkan apabila nilai IW mendekati 1 maka tingkat kesenjangan pendapatan antardaerah semakin besar (tingkat pemerataan pendapatan semakin buruk). Dalam beberapa kasus, dapat juga disimpulkan bahwa semakin kecil nilai IW-nya (mendekati 0) berarti semakin homogen wilayah-wilayah yang dianalisis, sedangkan semakin besar nilai IW-nya (mendekati 1) berarti semakin seragam keunggulan komparatif dan daya saing dari masing-masing wilayah relatif terhadap wilayah yang jauh lebih besar tersebut sebagai batasan analisis.

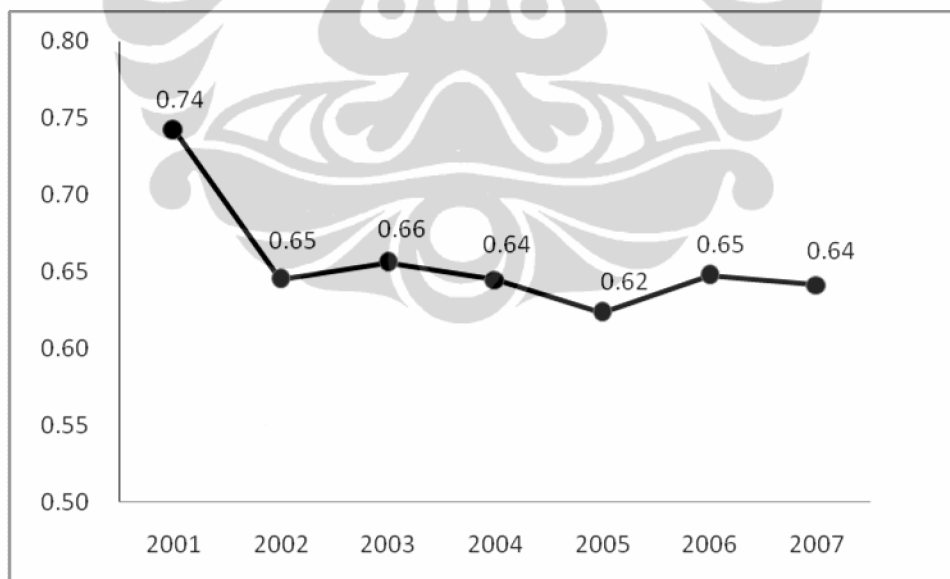
Tabel 5.1
Tabel Perkembangan Indeks Williamson
Provinsi Jawa Barat
Tahun 2001 – 2007

Tahun	Nilai IW
2001	0,74
2002	0,65
2003	0,66
2004	0,64
2005	0,62
2006	0,65
2007	0,64

Sumber : BPS (telah diolah kembali)

Dari hasil analisis, ternyata selama periode 2001-2007, tingkat kesenjangan antara kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2001 tingkat kesenjangan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 0,74, dan pada tahun 2002 turun menjadi 0,65, di tahun 2003 tingkat kesenjangan naik dari tahun sebelumnya (2002) menjadi 0,66. Pada tahun 2004 tingkat kesenjangan kembali turun dibandingkan tahun 2003 yaitu menjadi 0,64. Di tahun 2005 tingkat kesenjangan kembali turun dibandingkan 2004 yaitu menjadi 0,62. Tingkat kesenjangan kembali meningkat di tahun 2006, dari 0,62 di tahun 2005 menjadi 0,65 di tahun 2006. Dan pada tahun 2007 tingkat kesenjangan menurun dibandingkan tahun 2006 menjadi 0,64.

Gambar 5.1
Perkembangan Indeks Williamson
Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2001-2007



Sumber : BPS (telah diolah kembali)

Pada awal penerapan desentralisasi fiskal, tahun 2001, tingkat kesenjangan pendapatan antardaerah di wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat

Universitas Indonesia

kesenjangan yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya yaitu 0,74. Artinya pada awal penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengakibatkan tingkat kesenjangan pendapatan antara kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dimengerti karena sebagai sebuah kebijakan baru dalam pembangunan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat maka tingkat kesiapan masing-masing pemerintah daerah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah berbeda-beda. Hal ini bahkan sempat menjadi kekhawatiran beberapa pihak dan IMF (*Interantional Monetary Fund*) dalam proses penyusunan *Letter of Intent* pada tahun 2000. Salah satu alasan timbulnya kekhawatiran tersebut adalah sebuah pendapat yang menyatakan bahwa dorongan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia lebih karena keinginan masyarakat untuk mendapatkan otonomi atas sumber daya alam, politik, dan hukum di wilayahnya masing-masing. Dorongan ini berbeda dengan di banyak negara, khususnya negara maju, yaitu desentralisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memperoleh pelayanan umum yang lebih baik dari pemerintah.²⁵

Tahun 2001 juga merupakan sebuah awal dari transformasi bagi Indonesia, dari negara yang paling tersentralisasi di dunia menjadi negara paling terdesentralisasi di dunia. Sejak tahun 2001, pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam penyediaan layanan publik, sehingga pemerintah daerah harus mengembangkan kemampuannya secara dramatis. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota masing-masing dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal pengelolaan keuangan publik, kinerja fiskal yang meliputi pengelolaan pajak daerah dan retribusi serta penerimaan asli daerah lainnya, penyediaan layanan publik bagi masyarakat, dan peningkatan iklim investasi di daerah masing-masing.²⁶

Pada tahun 2002, tingkat kesenjangan regional antara kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat menurun dibandingkan tahun 2001, hal ini ditunjukkan dari menurunnya Indeks Williamson tahun 2001 sebesar 0,74 menjadi

²⁵ Rafinus, Bobby H (2001). Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Ekonomi Makro. Majalah Perencanaan Pembangunan. Edisi 23 Tahun 2001.

²⁶ The World Bank (2008). Mengoptimalkan Desentralisasi bagi Pembangunan: Metodologi Kerangka Kerja Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (LGPM). Jakarta 2008. Hal.2

sebesar 0,65 di tahun 2002. Di tahun kedua pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi tata kelola dan kelembagaan (*governance*) pelaksanaan desentralisasi fiskal telah mengalami perbaikan-perbaikan. Beberapa peraturan operasional baik berupa petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Salah satu contoh aturan tata kelola (*governance*) yang diterbitkan pemerintah pada saat itu adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 ini, di lingkungan pemerintah daerah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya penganggaran di lingkup pemerintah daerah mulai mengarah ke anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), pemerintah daerah memiliki kewajiban akuntabilitas pelaksanaan bidang keuangan dalam bentuk neraca, perubahan dari *single entry accounting system* ke *double entry accounting system* dan sebagainya. Perbaikan dari sisi tata kelola mendorong terciptanya perbaikan kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Tabel 5.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Termasuk Migas
Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2001 – 2007

LPE	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Rata-Rata Kabupaten/Kota	3,69	4,62	3,96	5,71	4,88	5,47	5,78
Provinsi	3,89	3,94	4,67	4,77	5,60	6,02	6,41

Sumber : BPS (PDRB Kabupaten/Kota Indonesia, 2001-2007)

Pada tahun 2002, laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Barat meningkat dari 3,89% di tahun 2001 menjadi 3,94% di tahun 2002 atau meningkat 0,05 poin. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat meningkat lebih tinggi yaitu 3,69% di tahun 2001 menjadi 4,62% di tahun 2002 atau meningkat 0,93 poin. Bila dikaitkan dengan penemuan Williamson, bahwa tingkat kesenjangan antar daerah akan berkurang dengan meningkatnya perekonomian nasional, maka hal tersebut berlaku pada tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2002. Seiring meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kesenjangan antar daerah pun berkurang dari 0,74 menjadi 0,65.

Pada tahun 2003, tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat kembali meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2002. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya Indeks Williamson yaitu 0,65 di tahun 2002 menjadi 0,66 di tahun 2003. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari 3,94% di tahun 2002 menjadi 4,67% di tahun 2003, namun rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan yaitu 4,62% di tahun 2002 menjadi 3,96% di tahun 2003. Hal ini disebabkan pada tahun 2003 terdapat 12 kabupaten/kota yang mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2002 yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bekasi. Seluruh kabupaten/kota yang mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 dibandingkan tahun 2002 kecuali Kabupaten Purwakarta dan Kota Bekasi adalah merupakan kabupaten/kota yang PDRB kabupaten/kota masing-masing didominasi oleh sektor pertanian. Dimana peranan nilai tambah bruto dari sektor pertanian terhadap PDRB sepuluh kabupaten tersebut rata-rata di atas 30% dari PDRB kabupaten/kota. Pada tahun 2003, laju pertumbuhan sektor pertanian di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,09%.

Pada tahun 2004, tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat lebih rendah dari tahun sebelumnya, hal ini ditunjukkan dari Indeks Williamson tahun 2004 yaitu sebesar 0,64 dibandingkan 0,66 di tahun 2003. Bila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 untuk Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 4,77% atau lebih tinggi 0,10 poin dari tahun 2003 yaitu 4,67%. Dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi pada tahun 2004 mengalami peningkatan, dari 3,96% di tahun 2003 menjadi 5,71% di tahun 2004 atau naik 1,75 poin. Hal ini tidak terlepas membaiknya laju pertumbuhan sektor pertanian. Pada tahun 2004, sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,98%. Kinerja sektor pertanian pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun 2003, dimana sektor ini mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,09%.

Pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak dua kali yaitu pada bulan Maret dan bulan Oktober. Hal ini memberikan dampak yaitu terjadinya perlambatan pada perekonomian nasional terutama pada sisi permintaan agregat. Sedangkan pada sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi seluruh sektor perekonomian mengalami pertumbuhan positif. Kondisi ini berdampak secara nasional terutama pada sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang merupakan sektor perekonomian yang banyak menyerap tenaga kerja, banyak menyumbang pajak dan devisa bagi perekonomian serta memiliki kaitan *backward dan forward linkage* yang tinggi mengalami perlambatan.²⁷

Secara regional, kondisi perekonomian nasional yang melambat berdampak pula terhadap pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Sebanyak sembilan daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2004. Daerah-daerah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten

²⁷ Bank Indonesia (2005). Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2005. Jakarta. Hal 38-59

Purwakarta, Kabupaten Bekasi, dan Kota Tasikmalaya. Bahkan untuk Kabupaten Indramayu perekonomian mengalami pertumbuhan negatif 7,82%. Hal ini berdampak pada rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (termasuk minyak dan gas) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang mengalami perlambatan dari 5,71% di tahun 2004 menjadi 4,88% di tahun 2005. Walaupun bila memperhitungkan pertumbuhan perekonomian tanpa minyak dan gas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu pada tahun 2005, tetap tumbuh positif sebesar 4,25%.

Pada tahun 2005, laju pertumbuhan ekonomi (termasuk minyak dan gas) Provinsi Jawa Barat secara umum mengalami akselerasi, yaitu naik dari pertumbuhan 4,77% di tahun 2004 menjadi 5,60% di tahun 2005. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini berdampak pada menurunnya tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya angka Indeks Williamson, dari 0,64 di tahun 2004 menjadi 0,62 di tahun 2005.

Pertumbuhan ekonomi pada 2006 masih dalam tren membaik, meskipun daya beli masyarakat menurun pasca kenaikan harga BBM di Oktober 2005. Dalam periode pelaku ekonomi masih melakukan penyesuaian terhadap dampak kenaikan harga BBM tersebut, perekonomian pada 2006 masih tumbuh 5,5% atau hanya sedikit menurun dibandingkan pertumbuhan pada 2005 sebesar 5,7%.²⁸

Sementara itu perekonomian Jawa Barat memiliki kondisi yang berbeda dengan kondisi perekonomian nasional yang mengalami perlambatan. Pada tahun 2006, laju pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Jawa Barat mengalami percepatan dan tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2006 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 6,02%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2005 yaitu sebesar 5,6%. Demikian pula dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2006 juga mengalami percepatan bila dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005. Rata-rata laju

²⁸ Bank Indonesia (2006). Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2006. Jakarta. Hal 42-61

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 sebesar 5,47%, meningkat 0,59 poin dibandingkan tahun 2005 sebesar 4,88%.

Pada tahun 2006, tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat meningkat dibandingkan dengan tahun 2005. Ini ditunjukkan dengan naiknya Indeks Williamson dari 0,62 di tahun 2005 menjadi 0,65 di tahun 2006. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor perekonomian tidak merata. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan positif adalah sektor Industri Pengolahan (8,51%), sektor Listrik, Air dan Gas (1,87%), sektor Bangunan/Konstruksi (4,26%), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (7,09%), sektor Perhubungan dan Telekomunikasi (7,88%), sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (0,64%) dan sektor Jasa-Jasa (8,20%). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan negatif adalah sektor Pertanian (-0,06%) dan sektor Penggalan dan Pertambangan (-2,46%).

Sesuai dengan data yang ditunjukkan pada tabel 3.3, diketahui bahwa sektor-sektor andalan yang membentuk PDRB pada tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan dampak perekonomian regional Provinsi Jawa Barat yang tumbuh positif terhadap laju pertumbuhan perekonomian kabupaten/kota. Sebanyak sebelas daerah mengandalkan pertumbuhan perekonomian dari pertumbuhan sektor pertanian. Dimana kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB kesebelas daerah tersebut di atas 29% dari keseluruhan PDRB kabupaten/kota. Pertumbuhan sektor pertanian yang tumbuh negatif akan berdampak pada perlambatan bagi laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut secara keseluruhan.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2007 semakin membaik bila dibandingkan dengan tahun 2006. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2007 mencapai 6,32%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,5%. Akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2007, terutama, berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang mencatat pertumbuhan

tinggi. Sementara dari sisi penawaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pertanian.²⁹

Iklim perekonomian yang membaik berdampak positif juga terhadap perekonomian regional Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2007, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 6,41%, lebih tinggi dari perekonomian nasional dan lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi tahun 2006. Sektor-sektor perekonomian pada tahun 2007 di Jawa Barat mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor Penggalian dan Pertambangan yang mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini berdampak pada meningkatnya rata-rata laju perekonomian ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, dari 5,47% di tahun 2006 menjadi 5,78% di tahun 2007 atau meningkat 0,31 poin. Pada tahun 2007, seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat kecuali Kabupaten Karawang, mengalami akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2006. Kabupaten Karawang merupakan satu-satunya daerah yang mengalami perlambatan, dimana laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (termasuk minyak dan gas) pada tahun 2007 yaitu 7,11% lebih rendah dari tahun 2006 yaitu sebesar 7,52%. Namun bila laju pertumbuhan ekonomi dengan tidak memasukkan minyak dan gas, Kabupaten Karawang tetap mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi, yaitu 7,55% di tahun 2006 meningkat menjadi 7,75% di tahun 2007.

Perekonomian yang tumbuh positif berdampak positif terhadap tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2007 tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2006. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya Indeks Williamson, dimana Indeks Williamson pada tahun 2006 adalah sebesar 0,65 turun menjadi 0,64 di tahun 2007.

Salah satu faktor penyebab kesenjangan atau ketimpangan antar wilayah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu memiliki kecenderungan perekonomian yang tumbuh

²⁹ Bank Indonesia (2007). Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2007. Jakarta. Hal 5.

pesat. Dan sebaliknya bagi daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari daerah dengan konsentrasi ekonomi yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan mampu menggerakkan sektor-sektor perekonomian, dan pada akhirnya akan mendatangkan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi dibandingkan dengan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Selain itu, jumlah penduduk dan luas wilayah dijadikan sebagai variabel dalam menghitung pembagian DAU oleh pemerintah. Dengan demikian tingkat kepadatan penduduk sebuah daerah yang tinggi akan menyebabkan besaran DAU yang diterima menjadi lebih tinggi secara relatif dibandingkan dengan daerah lain yang tingkat kepadatan penduduknya lebih rendah.³⁰

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Beberapa faktor strategis yang mempengaruhi adalah lokasinya yang relatif dekat dengan ibukota negara yaitu DKI Jakarta yang merupakan pusat bisnis Indonesia. Perkembangan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya pada daerah-daerah sekitar DKI Jakarta seperti Bogor, Bekasi, Depok adalah menjadi daerah penting bagi DKI Jakarta. Bahkan ketiga wilayah tersebut telah menjadi aglomerasi dengan DKI Jakarta.³¹ Selain Kota Bandung sebagai pusat administrasi dan perekonomian di Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi merupakan tiga daerah yang memiliki kontribusi yang tertinggi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat.

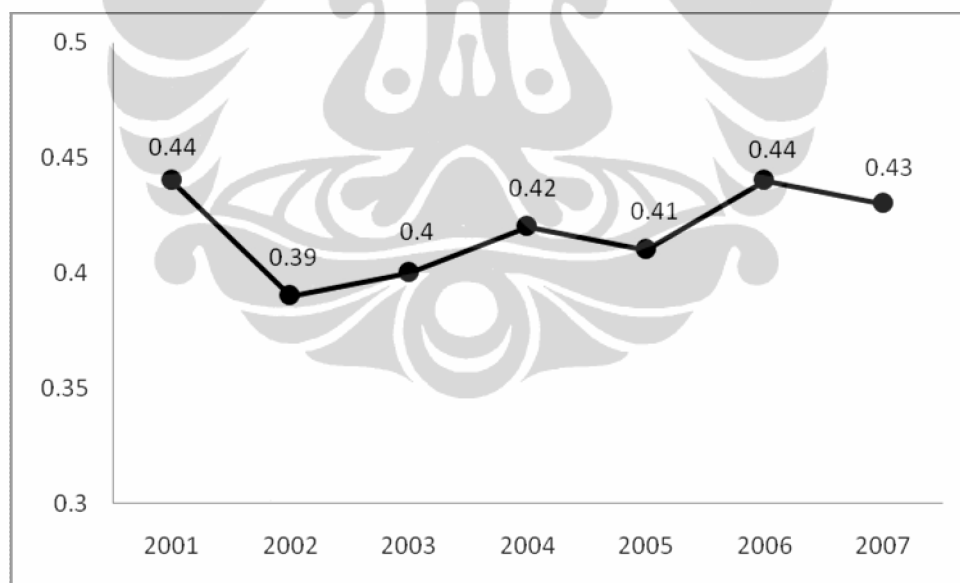
Tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah sangat dipengaruhi oleh distribusi PDRB di antara daerah-daerah dalam satu wilayah. Dari 25 kabupaten/kota yang dianalisis terdapat 3 (tiga) daerah yang mendominasi distribusi PDRB di wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2001 ketiga daerah tersebut menguasai 37,94% dari total PDRB Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pada tahun 2005,

³⁰ Tambunan, TH. Tulus (2001).

³¹ Bappeda Jawa Barat (2008). Statistik Pembangunan Gubernur Jawa Barat 2003-2008. Bandung. Hal.18.

dimana tingkat kesenjangan berada pada posisi terendah dalam periode observasi, ketiga daerah tersebut menguasai 36,34% dari total PDRB Provinsi Jawa Barat, sedangkan di tahun 2007 ketiga daerah tersebut menguasai 37,45% dari total PDRB Provinsi Jawa Barat. Hal ini seperti yang ditunjukkan pada gambar bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Barat tanpa ketiga kabupaten/kota tersebut yaitu berkisar antara IW 0,39 sampai dengan 0,44. Hal ini menunjukkan tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat tanpa Kota Bandung, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kesenjangan dengan memperhitungkan keseluruhan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Gambar 5.2
Perkembangan Indeks Williamson
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tanpa Kota Bandung, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi



Sumber : BPS (telah diolah kembali)

Dari pengujian dengan teknik analisis Indeks Williamson dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode 2001-2007, memiliki tingkat kesenjangan yang fluktuatif.

Meskipun bila dibandingkan antara awal dan akhir periode yang diamati terjadi penurunan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

- b) Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif akan berdampak mengurangi tingkat kesenjangan. Sebaliknya perlambatan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap meningkatnya tingkat kesenjangan.

5.2. Tingkat Kemajuan Kabupaten/Kota

Tipologi Klassen merupakan alat bantu untuk mengukur disparitas (kesenjangan antar wilayah) dengan menggunakan variabel wilayah dan jumlah penduduk. Tipologi Klassen membagi pengelompokan berdasarkan pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga terbentuk kelompok wilayah dengan karakteristik kabupaten/kota yang maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*), kabupaten/kota maju tapi tertekan (*high income but low growth*), kabupaten/kota yang berkembang cepat (*high growth but low income*), dan kabupaten/kota yang relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Dalam analisis ini masing-masing kabupaten/kota dikelompokkan pada empat kuadran yaitu :

Kuadran I adalah kabupaten/kota yang maju dan tumbuh cepat yaitu kabupaten/kota yang laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kuadran II adalah kabupaten/kota maju tetapi tertekan yaitu kabupaten/kota yang laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, sedangkan PDRB per kapitanya lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kuadran III adalah kabupaten/kota yang berkembang cepat, yaitu kabupaten/kota yang laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, tetapi PDRB per kapita lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kuadran IV adalah wilayah kabupaten/kota yang relatif tertinggal, yaitu kabupaten/kota yang laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita-nya lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 5.3
Pengelompokan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2001-2007

No.	Kab/Kota	Tipologi Klassen						
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Kab. Bogor	IV	II	I	I	I	I	I
2	Kab. Sukabumi	II	IV	IV	IV	IV	IV	IV
3	Kab. Cianjur	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
4	Kab. Bandung	I	III	III	III	III	II	II
5	Kab. Garut	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
6	Kab. Tasikmalaya	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
7	Kab. Ciamis	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
8	Kab. Kuningan	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
9	Kab. Cirebon	II	IV	IV	IV	IV	IV	IV
10	Kab. Majalengka	II	IV	IV	IV	IV	IV	IV
11	Kab. Sumedang	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
12	Kab. Indramayu	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
13	Kab. Subang	IV	III	III	IV	III	III	III
14	Kab. Purwakarta	II	II	II	II	II	II	II
15	Kab. Karawang	I	I	II	I	I	I	I
16	Kab. Bekasi	II	II	I	I	I	I	I
17	Kota Bogor	III	III	III	III	III	III	III
18	Kota Sukabumi	III	III	III	III	III	III	III
19	Kota Bandung	I	I	I	I	I	I	I
20	Kota Cirebon	II	II	II	II	II	II	I
21	Kota Bekasi	I	I	I	II	I	I	I
22	Kota Depok	III	III	III	III	III	III	III
23	Kota Cimahi	N/A	N/A	II	II	II	II	II
24	Kota Tasikmalaya	N/A	N/A	IV	IV	IV	IV	IV
25	Kota Banjar	N/A	N/A	N/A	IV	IV	IV	IV

Sumber : BPS (telah diolah kembali)

Keterangan : N/A = *not applicable* (data tidak tersedia)

Dari pengolahan data sebagaimana yang tersaji dalam tabel 5.2 bahwa karakteristik kemajuan atau tingkat kesejahteraan kabupaten/kota sangat bervariasi apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi, hal ini berbeda dengan dugaan awal pada hipotesis bahwa setiap kabupaten/kota diduga mengalami pertumbuhan perekonomian.

Adapun variasi pertumbuhan kesejahteraan kabupaten/kota secara lengkap dapat diuraikan menjadi:

1. Kabupaten/kota yang relatif stabil dalam tipologi yang sama
 - a. Kabupaten/kota yang maju dan tumbuh cepat (*high growth and high income*) dan tetap pada kuadran I (Kabupaten/Kota yang maju dan tumbuh cepat). Hal ini menunjukkan kestabilan dalam laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Di samping itu PDRB per kapita dari kabupaten/kota dari daerah-daerah ini selalu relatif lebih tinggi dari rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu: Kota Bandung.
Kota Bandung yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat selama periode yang diamati selalu berada pada tipologi Kabupaten/Kota yang Maju dan tumbuh cepat. Kedudukan Kota Bandung sebagai ibukota administrasi pemerintahan dan pusat perekonomian menyebabkan Kota Bandung memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Beberapa faktor strategis yang mempengaruhi adalah ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, keberadaan perguruan-perguruan tinggi ternama yang terkait dengan perkembangan bangsa, dan lain-lain. Kontribusi Kota Bandung terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat rata-rata di atas 10%.
 - b. Kabupaten/kota dalam kuadran II atau kabupaten/kota yang maju tetapi tertekan (*high income but low growth*) dan masih tetap dalam status yang sama selama periode yang diamati terdiri dari dua kabupaten/kota yaitu : Kabupaten Purwakarta dan Kota Cimahi. Baik Kabupaten Purwakarta maupun Kota Cimahi merupakan dua daerah di wilayah Jawa Barat yang menjadikan sektor Industri Pengolahan sebagai sektor andalan dalam

menciptakan PDRB masing-masing. Walaupun selalu tumbuh positif, laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan selalu lebih kecil dari sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

- c. Kabupaten/kota dalam kuadran III yaitu kabupaten/kota yang berkembang cepat (*high growth but low income*), terdiri dari tiga kabupaten/kota yaitu : Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Depok.

Kota Bogor adalah merupakan daerah yang menjadi penyangga bagi ibukota Jakarta dan juga sebagai daerah tujuan wisata. Kota Bogor menjadikan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebagai sektor andalan. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Bogor pada tahun 2007 yaitu sebesar 40,15%. Demikian juga dengan Kota Sukabumi, daerah ini menjadikan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebagai sektor andalan dalam menciptakan PDRB. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Sukabumi pada tahun 2007 yaitu sebesar 43,46%. Sementara itu Kota Depok yang berbatasan langsung dengan wilayah ibukota menjadikan sektor Industri sebagai sektor andalan. Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Depok pada tahun 2007 adalah sebesar 37,03%.

- d. Kabupaten/kota pada kuadran IV yaitu kabupaten/kota yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) dan tidak mengalami kemajuan (tetap masuk kabupaten/kota yang relatif tertinggal) terdiri dari dua belas kabupaten/kota yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Selain Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, kabupaten-kabupaten yang termasuk ke dalam kabupaten/kota yang relatif tertinggal tersebut menjadikan sektor Pertanian sebagai sektor andalan. Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB masing-masing kabupaten/kota tersebut pada tahun 2007 berkisar 29,02% hingga 47,90%.

Sedangkan Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar menjadikan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebagai sektor unggulan dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 29,96% (Kota Tasikmalaya) dan 32,18% (Kota Banjar). Hal ini kemungkinan besar sangat terkait dengan adanya obyek tujuan wisata yang cukup ramai dikunjungi wisatawan yang berlokasi dengan kedua kota tersebut yaitu Pangandaran.

Hal yang menarik adalah sepuluh dari dua belas kabupaten yang termasuk ke dalam kelompok kabupaten/kota yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) merupakan daerah yang menjadikan sektor pertanian sebagai sektor unggulan. Bila dilihat dari besarnya realisasi PDRB menurut lapangan usaha dari sektor Pertanian selama tahun 2003-2007 mengalami fluktuasi (Tabel 5.3).

Tabel 5.4
Perkembangan PDRB Jawa Barat 2003-2007
Atas Dasar Harga Konstan 2000
(dalam trilyun rupiah)

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	32,40	34,46	34,94	34,73	35,69
Penggalian & Pertambangan	8,23	7,71	7,20	7,02	6,49
Industri Pengolahan	93,93	96,98	105,33	114,30	122,70
Listrik, Gas & Air Bersih	4,92	5,34	5,65	5,76	5,76
Bangunan /konstruksi	5,98	6,60	7,78	8,11	8,93
Perdagangan, Hotel & Restoran	42,76	45,53	47,26	50,61	54,79
Pengangkutan dan Komunikasi	9,38	10,31	10,33	11,14	12,27
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6,97	7,25	7,72	7,67	8,65
Jasa-jasa	14,94	15,84	16,82	18,20	18,73
PDRB	219,53	230,00	242,94	257,54	274,01

Sumber : BPS (PDRB Menurut Lapangan Usaha)

Sedangkan bila dilihat dari kontribusi sektor Pertanian terhadap total PDRB Provinsi Jawa Barat, seperti ditunjukkan pada Tabel 5.4, kontribusi sektor Pertanian mengalami tren yang semakin menurun. Pada tahun 2004, peranan sektor Pertanian sempat mengalami kenaikan, dari 14,76% di tahun 2003 menjadi 14,98% di tahun 2004. Namun terus menurun di tahun 2005 hingga 2007, dimana peran sektor pertanian pada tahun 2007 menjadi 13,03%.

Tabel 5.5
Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB Jawa Barat
2003-2007
Atas Dasar Harga Konstan 2000
(dalam prosen)

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	14,76	14,98	14,38	13,49	13,03
Penggalian & Pertambangan	3,75	3,35	2,96	2,73	2,37
Industri Pengolahan	42,79	42,17	43,36	44,38	44,78
Listrik, Gas & Air Bersih	2,24	2,32	2,33	2,24	2,10
Bangunan /konstruksi	2,72	2,87	3,20	3,15	3,26
Perdagangan, Hotel & Restoran	19,48	19,80	19,45	19,65	20,00
Pengangkutan dan Komunikasi	4,27	4,48	4,25	4,33	4,48
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,17	3,15	3,18	2,98	3,16
Jasa-jasa	6,81	6,89	6,92	7,07	6,84
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS (PDRB Menurut Lapangan Usaha)

Bila dilihat dari sisi laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha (tabel 5.5), laju pertumbuhan sektor Pertanian selama periode 2003-2007 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2003 dan 2006 bahkan sektor Pertanian mengalami pertumbuhan negatif. Secara keseluruhan, selama periode 2003-2007, pertumbuhan sektor Pertanian selalu lebih rendah dari pertumbuhan sektor Industri Pengolahan. Jadi walaupun dari sisi nilai, sektor Pertanian cukup besar, namun dari sisi kontribusi dan laju pertumbuhan sektor Pertanian relatif lebih kecil dibandingkan dengan

Universitas Indonesia

sektor Industri Pengolahan. Hal ini yang menyebabkan kabupaten/kota yang menjadikan sektor Pertanian sebagai sektor unggulan selalu memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil dibandingkan kabupaten/kota yang bertumpu pada sektor Industri Pengolahan. Di samping itu juga terdapat kendala-kendala teknis yang dijumpai di lapangan dalam pengembangan sektor Pertanian, seperti masalah iklim, alih fungsi lahan pertanian dan lain sebagainya. Dengan demikian kabupaten/kota yang menjadikan sektor pertanian sebagai sektor unggulan perlu melakukan transformasi struktural dari sektor Pertanian ke sektor Industri Pengolahan yang berbasis pertanian.

Tabel 5.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Domestik Regional Bruto
Provinsi Jawa Barat ADHK 2000
Menurut Lapangan Usaha

SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	-0,09	6,11	1,41	-0,34	2,49
Penggalian & Pertambangan	0,59	-6,40	-6,63	-2,25	-7,03
Industri Pengolahan	6,17	3,84	8,62	8,51	7,35
Listrik, Gas & Air Bersih	1,11	8,53	5,84	-3,93	5,95
Bangunan /konstruksi	7,25	10,31	17,85	5,81	8,44
Perdagangan, Hotel & Restoran	1,43	5,15	3,80	7,32	8,03
Pengangkutan dan Komunikasi	9,97	10,20	0,20	7,88	10,12
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	8,89	4,01	5,20	0,64	12,68
Jasa-jasa	11,27	11,01	6,22	0,64	2,90
PDRB	4,67	4,77	5,60	6,02	6,41

Sumber : BPS (PDRB Menurut Lapangan Usaha)

2. Kabupaten/kota yang menunjukkan adanya kemajuan atau peningkatan dalam pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi, sehingga tipologinya berubah dari kabupaten/kota maju tapi tertekan (kuadran II) menjadi kabupaten/kota yang maju dan tumbuh cepat (kuadran I). Kabupaten/kota yang mengalami kemajuan seperti ini meliputi tiga kabupaten/kota yaitu : Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Cirebon.

Bila dilihat dari sektor unggulan, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi menjadikan sektor Industri Pengolahan sebagai sektor unggulan yang berperan membentuk PDRB masing-masing kabupaten tersebut. Peran sektor Industri Pengolahan bagi PDRB Kabupaten Bogor tahun 2007 mencapai 63,72%, sedangkan bagi PDRB Kabupaten Bekasi sebesar 79,82%. Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan yang relatif baik dalam kurun waktu 2003-2007, memberikan dampak positif bagi perekonomian dua daerah tersebut. Sehingga bila dilihat dari tipologi kemajuan daerah, kedua kabupaten tersebut bisa tergolong kabupaten/kota yang maju dan tumbuh pesat.

Sedangkan Kota Cirebon, menjadikan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebagai sektor unggulan. Laju pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang relatif baik selama kurun waktu 2003-2007, memberikan dampak pada kemajuan Kota Cirebon.

3. Kabupaten/kota yang mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan pertumbuhan PDRB atau Laju pertumbuhan ekonomi yaitu:
 - a. Kabupaten yang pada awal periode observasi berada pada tipologi kabupaten/kota yang relatif tertinggal (kuadran IV) selanjutnya mengalami kemajuan menjadi kabupaten/kota yang berkembang cepat (kuadran III), kemudian menjadi kabupaten/kota yang relatif tertinggal (kuadran IV) namun pada akhir periode observasi kembali menjadi kabupaten/kota yang berkembang cepat (kuadran III) yaitu : Kabupaten Subang.

Pada tahun 2004, tipologi kemajuan Kabupaten Subang berubah dari kabupaten/kota yang berkembang cepat (kuadran III) di tahun 2003 menjadi kabupaten/kota yang relatif tertinggal (kuadran IV). Hal ini disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan PDRB dari Sektor Pertanian dari 12,27% tahun 2003 menjadi 11,52% tahun 2004, serta menurunnya laju pertumbuhan PDRB dari sektor industri Pengolahan sub sektor penggalian dari 3,83% tahun 2003 menjadi 0,78% di tahun 2004, sehingga menyebabkan industri pengolahan mengalami laju pertumbuhan negatif yaitu -4,55% selama tahun 2004, dan berdampak pada menurunnya

laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang dari 5,22% di tahun 2003 menjadi 5,14% di tahun 2004.³²

- b. Kabupaten/kota yang pada awal periode observasi termasuk pada kategori kabupaten/kota yang maju dan tumbuh cepat (kuadran I), kemudian menjadi kabupaten/kota yang maju tapi tertekan (kuadran II) namun selanjutnya kembali menjadi kabupaten/kota yang maju dan tumbuh cepat (kuadran I), kabupaten/kota dengan kemajuan seperti ini meliputi dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi.

Pada awal periode observasi Kabupaten Karawang termasuk ke dalam kabupaten/kota yang maju dan tumbuh cepat namun pada tahun 2003 tingkat kemajuan Kabupaten Karawang menjadi kelompok kabupaten/kota yang maju tapi tertekan. Hal ini disebabkan karena dua sektor yaitu Pertanian dan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih mengalami pertumbuhan negatif, hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi sekitar 4,8% pada subsektor tanaman bahan makanan yang didominasi padi. Pertumbuhan negatif juga terjadi pada sektor Listrik dan Air Bersih yaitu subsektor listrik yang mengalami penurunan produksi sebesar -10,10% sehingga menyebabkan turunnya kontribusinya. Penurunan kedua sektor ini berdampak pada rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Demikian halnya dengan Kota Bekasi, pada awal periode observasi Kota Bekasi termasuk ke dalam kabupaten/kota yang maju dan tumbuh cepat namun pada tahun 2004 tingkat kemajuan Kota Bekasi menjadi kelompok kabupaten/kota yang maju tapi tertekan. Hal ini disebabkan karena terjadinya pertumbuhan negatif pada Sektor Pertanian khususnya pada Subsektor Tanaman Bahan Makanan yang menurun produksinya sekitar -0,02% dan subsektor Peternakan dan Hasil-hasilnya sebesar -4,87% sehingga menyebabkan turunnya kontribusinya. Penurunan kedua subsektor ini berdampak pada rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Kota

³² BPS Kabupaten Subang. PDRB Kab. Subang Menurut Lapangan Usaha 2004-2007. Oktober 2008

Bekasi dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

4. Kabupaten/kota yang mengalami kemunduran/penurunan kesejahteraan dari kabupaten/kota yang maju dan tumbuh cepat (kuadran I), turun menjadi kabupaten/kota yang berkembang cepat (kuadran III) dan akhirnya menjadi menjadi kabupaten/kota yang maju tapi tertekan (kuadran II). Kabupaten/kota dengan tingkat kemajuan seperti ini adalah Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung merupakan daerah yang menjadikan sektor Industri Pengolahan sebagai sektor unggulan. Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2007 mencapai 61,15%. Pada tahun 2002, Kabupaten Bandung mengalami pemekaran wilayah, yaitu dengan berdirinya Kota Cimahi. Sentra-sentra industri terletak di wilayah Kota Cimahi, yang tadinya menjadi penyumbang bagi perekonomian Kabupaten Bandung kini berkurang. Dampaknya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten yang sebelum dimekarkan selalu diatas 10% per tahun, kini menjadi berkurang dan selalu di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan bila diperhatikan pada gambar 5.3 baik Kabupaten Bandung sebagai daerah induk maupun Kota Cimahi sebagai daerah otonomi baru sama-sama termasuk pada kelompok kabupaten/kota yang maju tapi tertekan.

Dan secara umum dari analisis dengan tipologi Klassen ditemukan bahwa daerah-daerah yang merupakan hasil pemekaran selalu berada pada kelompok yang sama dengan daerah induk. Selain Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung yang termasuk kabupaten/kota yang maju tapi tertekan (kuadran II), begitu pula dengan Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis serta Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya yang termasuk pada kabupaten/kota yang relatif tertinggal.

Gambar 5.3
Tingkat Kemajuan Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat
Menurut Tipologi Klassen Tahun 2007

<p align="center">Kuadran III Kabupaten/Kota yang Berkembang Cepat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Subang - Kota Bogor - Kota Sukabumi - Kota Depok <p align="center">PDRB per kapita</p>	<p align="center">Kuadran I Kabupaten/Kota yang Maju dan Tumbuh Cepat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bogor - Kabupaten Karawang - Kabupaten Bekasi - Kota Bandung - Kota Cirebon - Kota Bekasi <p align="center">Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)</p>
<p align="center">Kuadran IV Kabupaten/Kota yang Relatif Tertinggal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Sukabumi - Kabupaten Cianjur - Kabupaten Garut - Kabupaten Tasikmalaya - Kabupaten Ciamis - Kabupaten Kuningan - Kabupaten Cirebon - Kabupaten Majalengka - Kabupaten Sumedang - Kabupaten Indramayu - Kota Tasikmalaya - Kota Banjar 	<p align="center">Kuadran II Kabupaten/Kota yang Maju tapi Tertekan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bandung - Kabupaten Purwakarta - Kota Cimahi

Sumber : BPS (PDRB Menurut Lapangan Usaha)

5.3 Keterkaitan Tingkat Kesenjangan Regional dan Tingkat Kemajuan Kabupaten/Kota dan Disparitas Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Hasil analisis tingkat kesenjangan regional dengan menggunakan perhitungan Indeks Williamson adalah Indeks Williamson antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat lebih besar dari nol, atau dapat dikatakan tingkat kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota yang besar. Sementara itu hasil analisis dengan menggunakan tipologi Klassen juga menunjukkan bahwa pada periode yang diobservasi, 2001-2007, kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami tingkat kemajuan yang beragam.

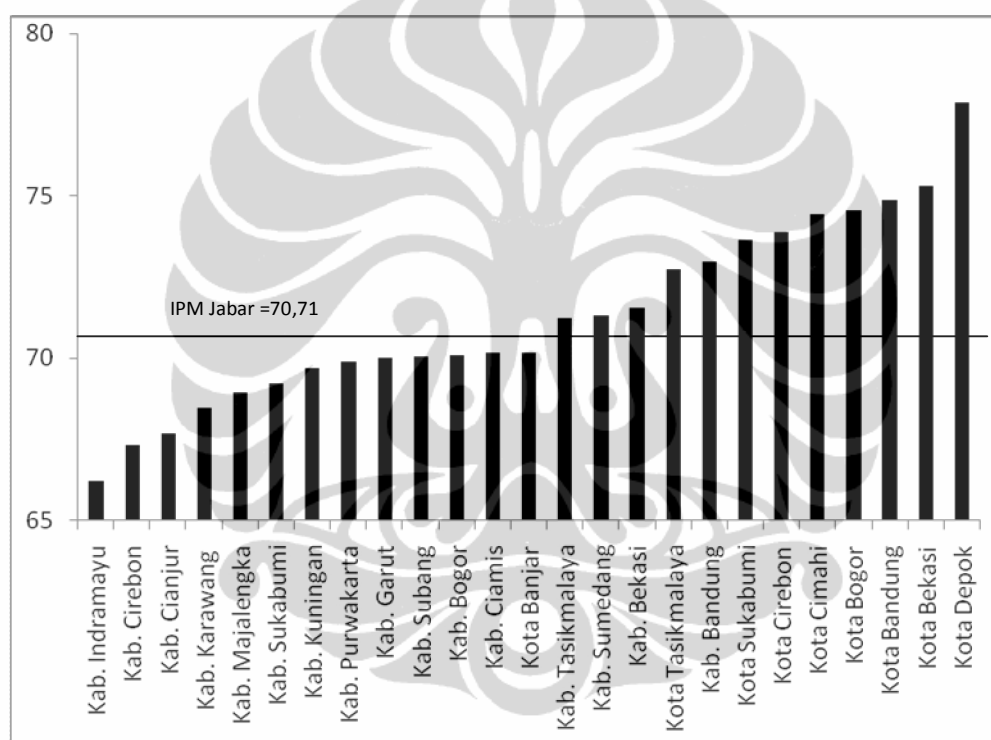
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa IPM adalah Indeks komposit yang digunakan sebagai alat ukur yang menggambarkan pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan daya beli. IPM adalah alternatif indikator kesejahteraan masyarakat selain indikator pertumbuhan ekonomi yang sudah sering digunakan dalam mengukur kinerja perekonomian. Pemakaian indikator laju pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto per kapita sering menyesatkan. Terkadang tingginya pertumbuhan ekonomi justru tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada seperti pengangguran dan kemiskinan.

Capaian IPM Provinsi Jawa Barat seperti tersaji pada Tabel 3.13, untuk periode 2003-2007 mengalami tren yang terus meningkat. Pada tahun 2003 capaian IPM Provinsi Jawa Barat, sebesar 67,87 dan naik 0,49 poin menjadi 68,36 di tahun 2004. Pada tahun 2005, capaian IPM meningkat menjadi 69,35 atau naik 0,97 poin dari capaian tahun 2004. Selanjutnya capaian IPM tahun 2006 naik menjadi 70,32 dan 70,71 pada tahun 2007.

Pada tahun 2003, capaian IPM tertinggi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dicapai oleh Kota Bandung yaitu 77,15, sedangkan kabupaten/kota dengan capaian paling rendah adalah Kabupaten Indramayu yaitu 61,90. Pada tahun 2004, Kota Bandung juga merupakan kabupaten/kota dengan capaian IPM tertinggi di wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu 77,17, dan Kabupaten Indramayu tetap yang terendah yaitu 63,24. Tahun 2005 terjadi pergeseran untuk kabupaten/kota dengan capaian IPM tertinggi, dari Kota Bandung ke Kota Depok. Capaian IPM Kota Depok tahun 2005 adalah sebesar 77,10, sedangkan Kabupaten

Indramayu tetap merupakan kabupaten/kota dengan capaian IPM terendah yaitu 63,00. Tahun 2006 dan 2007 berturut-turut Kota Depok menjadi kabupaten/kota dengan capaian IPM tertinggi yaitu 77,67 di tahun 2006 dan 77,89 di tahun 2007. Dan di tahun 2006 dan 2007, Kabupaten Indramayu tetap merupakan kabupaten/kota dengan capaian IPM terendah yaitu 65,26 di tahun 2006 dan 66,22 di tahun 2007.

Gambar 5.4
Capaian IPM Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2007



Sumber : BPS

Bila dikaitkan dengan hasil analisis tingkat kemajuan daerah dengan menggunakan tipologi Klassen untuk tahun 2007, maka dapat diuraikan sebagai berikut bahwa :

- Kabupaten/kota yang termasuk kelompok kabupaten/kota yang maju dan tumbuh cepat, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Cirebon memiliki capaian IPM di atas capaian IPM Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang termasuk

kelompok kabupaten/kota yang maju dan tumbuh cepat memiliki capaian IPM yang lebih rendah dari capaian IPM Provinsi Jawa Barat.

- b. Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi yang termasuk kelompok kabupaten/kota maju tetapi tertekan memiliki capaian IPM yang lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Kabupaten Purwakarta yang juga termasuk kelompok kabupaten/kota maju tetapi tertekan memiliki capaian IPM yang lebih rendah dari capaian IPM Provinsi Jawa Barat.
- c. Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Depok yang merupakan kabupaten/kota yang termasuk kelompok kabupaten/kota yang berkembang cepat memiliki capaian IPM yang lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Kabupaten Subang yang juga termasuk kelompok kabupaten/kota yang berkembang cepat memiliki capaian IPM yang lebih rendah dari capaian IPM Provinsi Jawa Barat.
- d. Dan sebagian besar kabupaten/kota yang termasuk kabupaten/kota yang relatif tertinggal memiliki capaian IPM yang lebih rendah dari capaian IPM Provinsi Jawa Barat, kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kota Banjar. Sedangkan tiga kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Sumedang yang juga termasuk kelompok kabupaten/kota tertinggal, memiliki capaian IPM yang lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Jawa Barat.

Hasil capaian wilayah perkotaan pada tahun 2007 menunjukkan capaian IPM yang lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Jawa Barat. Hal ini terlihat dari capaian IPM tahun 2007, dimana seluruh daerah kota kecuali Kota Banjar memiliki capaian IPM yang lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Jawa Barat. Hal ini bisa jadi disebabkan infrastruktur di wilayah perkotaan yang secara umum lebih baik dibandingkan dengan wilayah pedesaan, sehingga akses kepada pusat layanan kesehatan, pendidikan dan pusat-pusat perekonomian lebih baik dibandingkan wilayah pedesaan.

5.4 Hasil Perhitungan Regresi terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemajuan IPM

Dalam mencari faktor-faktor yang mempengaruhi (determinan) tingkat kemajuan IPM di wilayah Provinsi Jawa Barat, akan dilakukan dengan teknik regresi data panel. Pada regresi ini terdapat sepuluh variabel regresi. Yaitu IPM sebagai variabel terikat (dependent variable) dan sembilan variabel bebas yaitu Jumlah Gedung Sekolah Dasar, Jumlah Gedung Sekolah Lanjutan Pertama, Rasio Guru SD terhadap Murid SD, Rasio Guru SLP terhadap Murid SLP, Jumlah Puskesmas, Jumlah Dokter Puskesmas, Jumlah Bidan Puskesmas, PDRB per kapita, dan Kepadatan Penduduk

Tabel 5.7
Ringkasan Statistik Variabel Regresi

Variabel Regresi	Obs.	2003	2004	2005	2006	2007
		mean	mean	mean	mean	mean
		std. dev	std. dev	std. dev	std. dev	std. dev
Indeks Pembangunan Manusia	25	69,08	69,94	70,19	70,74	71,29
		3,84	3,79	3,27	3,04	2,85
Jumlah Gedung Sekolah Dasar	25	790,88	802,04	834,96	802,52	797,96
		505,76	518,00	539,39	520,34	517,26
Jumlah Gedung Sekolah Lanjutan Pertama	25	91,76	104,16	115,28	117,64	117,32
		53,20	62,93	69,73	78,07	75,77
Rasio Guru SD terhadap Murid SD	25	0,07	0,04	0,06	0,05	0,06
		0,02	0,01	0,02	0,01	0,02
Rasio Guru SLP terhadap Murid SLP	25	0,02	0,06	0,06	0,05	0,07
		0,01	0,01	0,02	0,01	0,02
Jumlah Puskesmas	25	115,48	115,48	119,36	120,76	120,84
		66,39	66,39	67,71	65,62	66,41
Jumlah Dokter Puskesmas	25	84,64	80,76	91,12	93,24	86,64
		54,78	56,18	53,76	53,78	52,19
Jumlah Bidan Puskesmas	25	277,12	341,04	249,24	278,04	286,04
		153,04	215,84	141,38	185,53	186,42
PDRB per kapita	25	5.568,29	5.781,87	5.888,99	6.103,42	6.334,52
		4.179,19	4.308,15	4.497,38	4.683,43	4.894,96
Kepadatan Penduduk	25	3.252,48	3.334,96	3.424,92	3.490,27	3.547,61
		3.778,90	3.836,00	3.916,29	3.988,27	4.053,98

Sumber : BPS (telah diolah kembali)

5.4.1 Hasil Pemilihan Model

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk memilih model *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect* (FE) akan diuji melalui uji F. Walaupun pemilihan antara *model pooled* atau *fixed* secara sederhana dapat dilakukan melalui pengamatan pada tingkat perbedaan atau ketimpangan dalam variabel bebasnya. Namun untuk kepastiannya tetap dilakukan uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan FE lebih baik dari model regresi data panel tanpa *variabel dummy* dengan melihat *Sum Square Residual* (SSR).

Jika dari hasil perhitungan tersebut F_{uji} lebih besar dari F_{tabel} , maka model yang cocok untuk karakteristik data yang ada adalah model efek tetap (FE).

Bila dibandingkan antara hasil regresi dengan menggunakan metode *Pooled Least Squares* sebagaimana yang tersaji pada tabel 5.6 dengan hasil regresi dengan menggunakan metode *Fixed Effect* FE1, maka tampak hasil regresi dengan menggunakan metode *Fixed Effect* lebih baik dari metode *Pooled Least Squares*. $Adj.(R^2)$ pada hasil regresi metode *Fixed Effect* yaitu 0,908958 lebih besar dibandingkan dengan $Adj.(R^2)$ metode *Pooled Least Squares* yaitu 0.698341. Artinya secara keseluruhan model regresi dengan metode *Fixed Effect* lebih baik menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya dibandingkan metode *Pooled Least Squares*.

Namun demikian untuk memastikan bahwa hasil regresi metode *Fixed Effect* lebih baik dari regresi metode *Pooled Least Squares* maka akan dilakukan uji F. Dari hasil estimasi Regresi metode *Pooled Least Squares* dan *Fixed Effect*, kemudian kami uji dengan menggunakan formula uji F dan menghasilkan output sebagai berikut :

R^2_{PLS} : 0,720236
 R^2_{FE} : 0,933187
 N : 25
 T : 5
 F_{uji} : 12,35067
 $F_{24;93}$: 1,84
 Kesimpulan : $F_{uji} > F_{24;93}$

Tabel 5.8
Hasil Estimasi dengan Teknik Regresi

Independent Variables	Pooled Least Square	Fixed Effect 1	Fixed Effect 2	Fixed Effect 3
Constanta	68,11550*** (66,63640)	67,36275*** (16,01279)	64,64927*** (29,69194)	64,60664*** (32,09332)
SARSD	-0,002499* (-1,903144)	-0,00333 (-0,793766)		
SARSLP	0,034424*** (5,174021)	0,022457* (3,319679)	0,021442*** (4,121975)	0,021613*** (4,360065)
MRGSD	23,19931** (2,373263)	-0,537008 (-0,070172)		
MRGSLP	25,48509*** (2,861531)	16,25659** (2,440209)	15,95254*** (3,426224)	15,67295*** (3,643361)
PUSKES	-0,009973 (-1,168956)	0,022555 (1,552340)	0,022276** (2,120503)	0,023004** (2,544420)
DOKPUS	-0,008555 (-1,409373)	0,003001 (0,666237)	0,002520 (0,708622)	
BIDPUS	-0,004687*** (-3,049967)	-0,000487 (-0,370248)		
PDRBKP	1,79E-08 (0,417930)	5,77E-07* (1,824147)	5,89E-07** (2,610650)	5,84E-07** (2,573574)
DTPDK	0,000273*** (3,789333)	-0,001150 (-1,506418)	-0,001155** (-3,270357)	-0,001096*** (-3,312208)
Adjusted R ²	0.698341	0,908958	0.911197	0,911821
Jumlah Observasi	125	125	125	125
F - statistic	32.89557***	38,51555***	43.41164***	45,21484***

Catatan : Angka di dalam kurung adalah t-statistics

***signifikan pada level 1%, **signifikan pada level 5%,

dan * signifikan pada level 10%

Hasil uji F menunjukkan bahwa F_{uji} (12,35067) lebih besar dari F statistik (1,84), dengan demikian dapat disimpulkan hasil regresi dengan menggunakan metode *Fixed Effect* lebih baik dari metode *Pooled Least Squares*.

Selanjutnya apakah metode *Fixed Effect* akan menghasilkan model yang lebih baik dibandingkan dengan metode *Random Effect*. Walaupun pemilihan antara metode *Fixed Effect* dengan metode *Random Effect* secara sederhana dapat dilakukan melalui pengamatan pada data yang diobservasi. Bila data yang digunakan adalah populasi maka metode *Fixed Effect* akan lebih baik dari metode *Random Effect*. Termasuk pada penelitian ini, data yang digunakan adalah populasi sehingga metode *Fixed Effect* akan lebih baik dibandingkan metode *Random Effect*.

Namun untuk kepastiannya tetap dilakukan uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Random Effect* lebih baik. Dengan menggunakan software Eviews diperoleh hasil nilai uji Hausman sebesar 310,1235. Sementara nilai kritis chi-square dengan *degree of freedom* 9, pada $\alpha=5\%$ adalah sebesar 16,91898. Dengan demikian nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah metode *Fixed Effect*.

5.4.2 Uji Parsial, Uji Model dan Uji koefisien determinasi

Dari hasil pengujian terhadap variabel-variabel bebas yang diduga dapat menjelaskan variasi pencapaian IPM kab/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, ternyata dari sembilan variabel bebas yang dicoba koefisien regresinya dengan menggunakan metode *Fixed Effect*, banyak yang tidak signifikan menjelaskan perubahan IPM pada taraf nyata (α) = 5%, disamping itu persamaan yang dihasilkan setelah dilakukan uji asumsi masih mengandung masalah heteroskedastisitas, dimana banyak probability t yang tidak signifikan walaupun *probability* (Fstat) nya signifikan (tersaji dalam lampiran).

Regresi dengan menggunakan metode *Fixed Effect* ternyata menghasilkan bahwa hanya variabel jumlah bangunan sekolah lanjutan pertama, variabel rasio guru terhadap murid sekolah lanjutan pertama dan variabel rasio guru terhadap

murid sekolah lanjutan pertama yang signifikan menjelaskan variabel IPM pada taraf $\alpha=5\%$, sedangkan variabel jumlah bangunan sekolah dasar, variabel rasio guru terhadap murid sekolah dasar, variabel jumlah puskesmas, variabel jumlah dokter di puskesmas, variabel jumlah bidan puskesmas, variabel PDRB per kapita serta variabel kepadatan penduduk (variabel kontrol) tidak signifikan.

Selain itu terdapat beberapa variabel yang tanda koefisiennya berubah yang seharusnya positif menjadi negatif seperti variabel jumlah bangunan sekolah dasar, variabel rasio guru terhadap murid sekolah dasar dan variabel jumlah bidan puskesmas. Informasi tersebut menunjukkan bahwa pada persamaan regresi diduga masih mengandung permasalahan multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

Dengan demikian, maka untuk memperoleh model yang tidak bias, salah satu pemecahan yang sering dilakukan untuk mengatasi multikoleniaritas adalah dengan mengeluarkan variabel yang diduga sangat berkorelasi, dengan resiko kehilangan informasi dari variabel tersebut.

Maka dalam penelitian ini kami mencoba untuk mencari variabel mana yang paling layak untuk dikeluarkan dari model.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

- a. Mengeluarkan variabel yang tanda koefisiennya tidak sesuai dengan yang seharusnya yaitu variabel jumlah bangunan sekolah dasar, variabel rasio guru terhadap murid sekolah dasar dan jumlah bidan puskesmas dan (model *Fixed Effect 2*).
- b. Mengeluarkan variabel yang tidak signifikan pada $\alpha=5\%$, setelah langkah pertama di atas kecuali variabel kepadatan penduduk sebagai variabel kontrol yaitu variabel jumlah dokter di puskesmas. Kemudian melakukan perlakuan *white cross section* untuk menghilangkan adanya pelanggaran asumsi persamaan yang mengandung heteroskedastisitas (model *Fixed Effect 3*).

Setelah dilakukan regresi terhadap ketiga model tersebut diperoleh output Eviews sebagai berikut :

Dari regresi metode *Fixed Effect* 1 diperoleh hasil bahwa ada tiga variabel bebas yaitu variabel jumlah bangunan tingkat sekolah lanjutan pertama, variabel rasio guru terhadap murid sekolah lanjutan pertama dan variabel jumlah puskesmas yang signifikan berpengaruh terhadap variasi perubahan IPM pada taraf nyata $\alpha = 5\%$, (probability t di bawah 0,05) dan tiga variabel lainnya yaitu, variabel jumlah dokter di puskesmas, variabel PDRB per kapita dan variabel kepadatan penduduk tidak signifikan, sementara probability (F stat) nya signifikan, dengan tingkat kepercayaan 91,12%% (Adj. $R^2 = 0,911197$).

Dari regresi metode *Fixed Effect* 2 diperoleh hasil bahwa terdapat lima (seluruh) variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian IPM pada taraf nyata $\alpha = 5\%$, (probability t di bawah 0,05) yaitu variabel bebas yaitu variabel jumlah bangunan tingkat sekolah lanjutan pertama, variabel rasio guru terhadap murid sekolah lanjutan pertama, variabel jumlah puskesmas, variabel PDRB per kapita dan variabel kepadatan penduduk. Sementara probability (Fstat)nya signifikan, dengan tingkat kepercayaan 91,18% (Adj. $R^2 = 0,911821$).

Pada metode *Fixed Effect* 2, telah dilakukan penyembuhan masalah heteroskedastisitas dengan memberikan perlakuan *white cross section*. Dengan demikian metode *Fixed Effect* 2 bisa diasumsikan telah lolos dari permasalahan heterokedastisitas. Dengan demikian dari perbandingan hasil regresi tersebut terlihat bahwa model yang paling layak dipilih untuk dilanjutkan pada tahap pengujian berikutnya adalah model yang ketiga, karena variabel yang signifikan lebih banyak dan juga telah bebas dari masalah heteroskedastisitas, sehingga model tersebut menjadi :

$$\text{IPM} = \beta_0 + \beta_1 \text{SARSLP} - \beta_2 \text{MRGSLP} + \beta_3 \text{PUSKES} + \beta_4 \text{PDBKP} + \beta_5 \text{DTPDK}$$

Dimana :

IPM = IPM Kabupaten/kota;

SARSLP = Jumlah Bangunan Sekolah Dasar;

MRGSLP = Rasio Guru terhadap murid pada sekolah lanjutan pertama;

PUSKES = Jumlah Puskesmas;

PDBKP = PDRB perkapita kabupaten/kota ADHK 2000;

DTPDK = Kepadatan Penduduk di Kabupaten/kota.

Pengujian asumsi yang terakhir adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah autokorelasi. Dengan menggunakan formula yang telah diuraikan dengan metode penelitian, uji autokorelasi dilakukan dengan cara membandingkan nilai Durbin-Watson statistik (D_{wstat}) hasil regresi dengan angka dalam tabel Durbin-Watson. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah observasi ($n=125$) dan variabel bebas ($k=5$), maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9
Pengujian Masalah Autokorelasi

Jumlah Observasi	125
d_L	1,618
d_U	1,791
$(4-d_U)$	2,209
DWstat	1,145
$0 < DW < d_U$	$0 < 1,180 < 1,618$
Kesimpulan	Terdapat autokorelasi positif

Hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa pada model terdapat pelanggaran asumsi OLS karena mengandung masalah autokorelasi. Namun demikian masalah autokorelasi dalam regresi data panel dapat diabaikan jika *data series*-nya lebih sedikit atau *crosssection*-nya lebih dominan daripada data series. Dan dalam penelitian ini, pengujian regresi data panel menggunakan data panel dengan 5 data series dan 25 data *crosssection*. Sehingga masalah autokorelasi serial pada error panel data dapat diabaikan.

Dengan demikian model secara keseluruhan telah bebas dari masalah-masalah pengganggu, sehingga dapat dikategorikan sebagai model yang BLUE. Hasil persamaan regresi terhadap lima variabel yang ada setelah dilakukan berbagai uji asumsi serta telah diberikan perlakuan *white heteroscedasticity-consistent standard error and covariance*.

Hasil pengujian dengan menggunakan regresi data panel terlihat pada output Eviews yang menunjukkan bahwa dari variabel yang diasumsikan berpengaruh terhadap variasi pencapaian IPM meliputi lima variabel yaitu variabel jumlah bangunan sekolah lanjutan pertama, variabel rasio guru terhadap murid, variabel jumlah puskesmas, variabel PDRB per kapita serta variabel kepadatan penduduk. Kelima variabel bebas tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap variabel IPM pada taraf nyata $\alpha = 5\%$, dengan tingkat kepercayaan 91,18%.

Intepretasi terhadap persamaan regresi tersebut berdasarkan nilai koefisiennya adalah sebagai berikut :

- a) Setiap kenaikan satu persen unit bangunan gedung sekolah lanjutan pertama akan menyebabkan naiknya IPM sebesar 0,021613%.
- b) Setiap kenaikan satu persen rasio guru per jumlah murid sekolah lanjutan pertama akan meningkatkan angka IPM sebesar 15,67295%.
- c) Setiap kenaikan satu persen jumlah unit bangunan puskesmas maka akan berdampak pada kenaikan IPM sebesar 0,023004%.
- d) Setiap kenaikan satu persen PDRB per kapita maka akan berdampak pada kenaikan IPM sebesar 0,00000584%.
- e) Setiap kenaikan satu persen tingkat kepadatan penduduk akan menurunkan angka IPM sebesar 0,0010096%.

Bila dilihat dari variasi intersep atau konstanta antar kabupaten/kota dapat dianalisa dari tabel 5.8. Dari tabel tersebut diketahui bahwa perbedaan intersep antar kabupaten/kota relatif bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan IPM antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat relatif tinggi atau relatif heterogen. Intersep tertinggi terjadi di Kota Cimahi dan yang terendah adalah Kabupaten Bekasi.

Tabel 5.10
Variasi Konstanta Antar Kabupaten/Kota
(Model Fixed Effect)

No,	Kabupaten/Kota	Koefisien Regresi
1	Kab, Bogor	-8,468012
2	Kab, Sukabumi	-5,591812
3	Kab, Cianjur	-6,181584
4	Kab, Bandung	-9,094921
5	Kab, Garut	-6,423986
6	Kab, Tasikmalaya	-4,285465
7	Kab, Ciamis	-3,566697
8	Kab, Kuningan	-1,776148
9	Kab, Cirebon	-5,667305
10	Kab, Majalengka	-2,511288
11	Kab, Sumedang	-0,785111
12	Kab, Indramayu	-8,259924
13	Kab, Subang	-2,843578
14	Kab, Purwakarta	-2,384827
15	Kab, Karawang	-6,854372
16	Kab, Bekasi	-10,09895
17	Kota Bogor	11,60619
18	Kota Sukabumi	9,375873
19	Kota Bandung	12,98412
20	Kota Cirebon	3,397475
21	Kota Bekasi	11,22111
22	Kota Depok	12,95973
23	Kota Cimahi	14,29933
24	Kota Tasikmalaya	5,163617
25	Kota Banjar	3,786540

Variasi IPM antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat cenderung heterogen, Hal ini mengindikasikan bahwa IPM dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk PDRB perkapita, PDRB dan distribusi merupakan faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi capaian IPM selain faktor variabel pendidikan, kesehatan dan variabel kependudukan. Seperti yang tergambar dari hasil regresi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap IPM di wilayah Provinsi Jawa Barat selama periode pengamatan.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal yang secara efektif mulai dilaksanakan pada tahun 2001 telah menyebabkan terjadinya ketimpangan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan distribusi pendapatan (PDRB) dengan menggunakan Indeks Williamson. Dimana hasilnya diperoleh nilai Indeks Williamson yang menggambarkan tingkat kesenjangan regional lebih besar dari nol.

Dari hasil analisis, ternyata selama periode 2001-2007, tingkat kesenjangan antara kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2001 tingkat kesenjangan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 0,74, dan pada tahun 2002 turun menjadi 0,65, di tahun 2003 tingkat kesenjangan naik dari tahun sebelumnya (2002) menjadi 0,66. Pada tahun 2004 tingkat kesenjangan kembali turun dibandingkan tahun 2003 yaitu menjadi 0,64. Di tahun 2005 tingkat kesenjangan kembali turun dibandingkan 2004 yaitu menjadi 0,62. Tingkat kesenjangan kembali meningkat di tahun 2006, dari 0,62 di tahun 2005 menjadi 0,65 di tahun 2006. Dan pada tahun 2007 tingkat kesenjangan menurun dibandingkan tahun 2006 menjadi 0,64.

Dalam rangka mengatasi ketimpangan terjadi, tingkat kemajuan kabupaten/kota selanjutnya diidentifikasi dengan menggunakan tipologi Klassen. Hasil identifikasi kemajuan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan tipologi Klassen menunjukkan bahwa 6 (enam) kabupaten/kota merupakan daerah maju dan tumbuh cepat, 4 (empat) kabupaten/kota merupakan kabupaten/kota yang berkembang cepat, 3 (tiga) kabupaten/kota merupakan daerah yang maju tetapi tertekan dan sisanya 12 (dua belas) kabupaten/kota merupakan kabupaten/kota yang relatif tertinggal.

Setelah diidentifikasi kesejahteraan dari sisi pendapatan (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi maka dilanjutkan dengan analisa tingkat kesejahteraan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan ukuran yang lebih luas, dalam hal ini variabel analisa yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian bentuk program yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan sosial dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian IPM.

Dari perhitungan ketiga metode tersebut, secara keseluruhan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pada periode 2001-2007 di wilayah Provinsi Jawa Barat terjadi kesenjangan antar kabupaten/kota. Pola ketimpangan yang terjadi bersifat fluktuatif. Hal ini diperlihatkan oleh hasil perhitungan Indeks Williamson dari tahun 2001-2007. Dan hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang disajikan di awal penelitian.
- 2) Salah satu penyebab tingginya angka Indeks Williamson adalah terutama disebabkan oleh terlalu dominannya beberapa kabupaten/kota tertentu dalam menguasai perolehan PDRB, terbukti dari hasil pengujian, apabila kabupaten/kota tersebut dikeluarkan dari perhitungan maka persebaran PDRB relatif merata dan angka Indeks Williamson jauh lebih kecil.
- 3) Disparitas pendapatan yang cukup tinggi ternyata menyebabkan disparitas yang tinggi juga pada IPM. PDRB merupakan salah satu faktor dominan yang berpengaruh terhadap perkembangan IPM, di samping dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain khususnya faktor sosial seperti pendidikan dan kesehatan.
- 4) Upaya pemerataan pembangunan daerah juga diarahkan agar semua kabupaten/kota dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang sama, atau paling tidak pada saat yang sama dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Namun dari hasil analisis Tipologi Klassen berdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB dan LPE, antara tahun 2001-2007 diketahui tidak semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan, sebagian besar adalah tetap pada pola pertumbuhan yang sama. Terdapat kabupaten/kota terus maju, namun ada juga kabupaten/kota yang tetap tertinggal, bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan.

- 5) Dari hasil analisis Tipologi Klassen diketahui bahwa sepuluh dari dua belas kabupaten/kota yang termasuk ke dalam kelompok kabupaten/kota yang relatif tertinggal merupakan kabupaten/kota yang menjadikan sektor pertanian sebagai sektor unggulan.
- 6) Bila dilihat dari capaian maka tingkat capaian IPM kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat sangat heterogen. Dan dari hasil pengamatan daerah perkotaan cenderung memiliki capaian IPM yang lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan daerah perdesaan. Hal ini disebabkan infrastruktur di perkotaan pada umumnya lebih baik dari daerah perdesaan. Sehingga akses masyarakat terhadap sarana kesehatan, pendidikan dan pusat perekonomian lebih baik dibanding masyarakat perdesaan.
- 7) Dari persamaan regresi data panel diperoleh data bahwa dari sembilan variabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pencapaian IPM di Wilayah Provinsi Jawa Barat, ternyata hanya lima variabel yang secara signifikan berpengaruh. Kelima variabel tersebut adalah variabel jumlah bangunan sekolah lanjutan pertama, variabel rasio jumlah guru terhadap murid tingkat sekolah lanjutan pertama, variabel jumlah puskesmas, variabel PDRB perkapita serta variabel kepadatan penduduk.

6.2 Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Atas kesimpulan penelitian di atas, terdapat saran-saran dan rekomendasi kebijakan :

- 1) Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan merumuskan program yang tepat dalam rangka meningkatkan kerja sama pemerintah kabupaten/kota. Sehingga arus perekonomian antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi lebih baik, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- 2) Mendorong pelaksanaan transformasi bagi kabupaten/kota yang menjadikan sektor pertanian sebagai sektor unggulan, dari sektor Pertanian menuju sektor Industri Pengolahan yang berbasis pertanian.

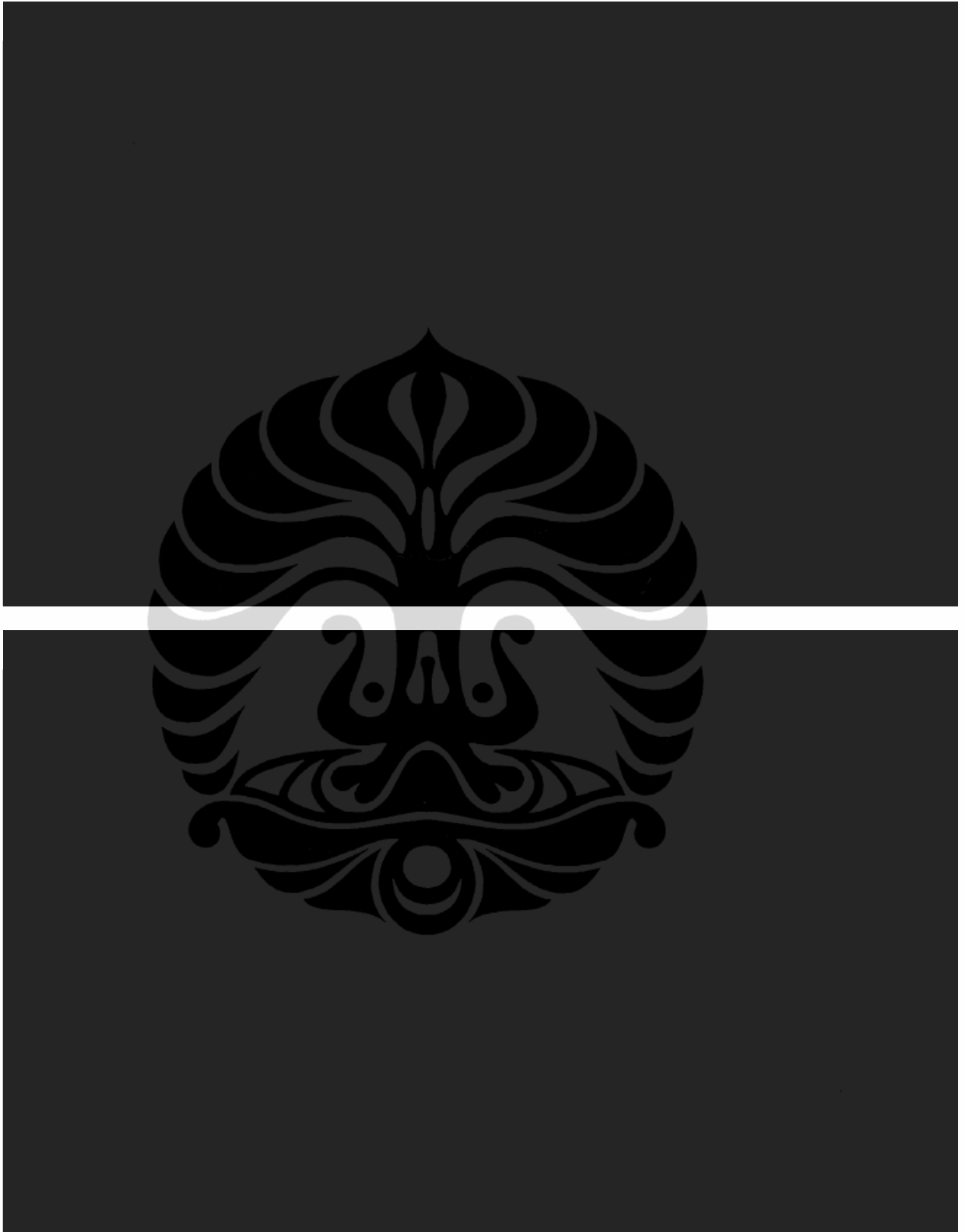
- 3) Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kebijakan alokasi dana dekonsentrasi seyogyanya mendorong peningkatan sarana dan prasarana untuk layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan pada kabupaten/kota yang memiliki karakteristik perdesaan. Sehingga diharapkan antara wilayah perkotaan dan perdesaan tingkat capaian menjadi lebih merata.
- 4) Mengingat variabel jumlah guru terhadap murid sekolah lanjutan pertama merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap peningkatan IPM, maka Pemerintah Daerah seyogyanya mendorong pemenuhan jumlah guru sekolah lanjutan pertama yang ideal.
- 5) Untuk menyempurnakan hasil penelitian perlu dilakukan penelitian lanjutan khususnya mengenai penyebab disparitas pendapatan yang sangat tinggi, penyebab masih banyaknya kabupaten/kota tertinggal kesejahteraan ekonominya, serta bentuk program yang cocok untuk memperbaiki faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian IPM di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- 6) Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model linier, sehingga perlu dilakukan dengan model lain yang tidak linier untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat.

DAFTAR REFERENSI

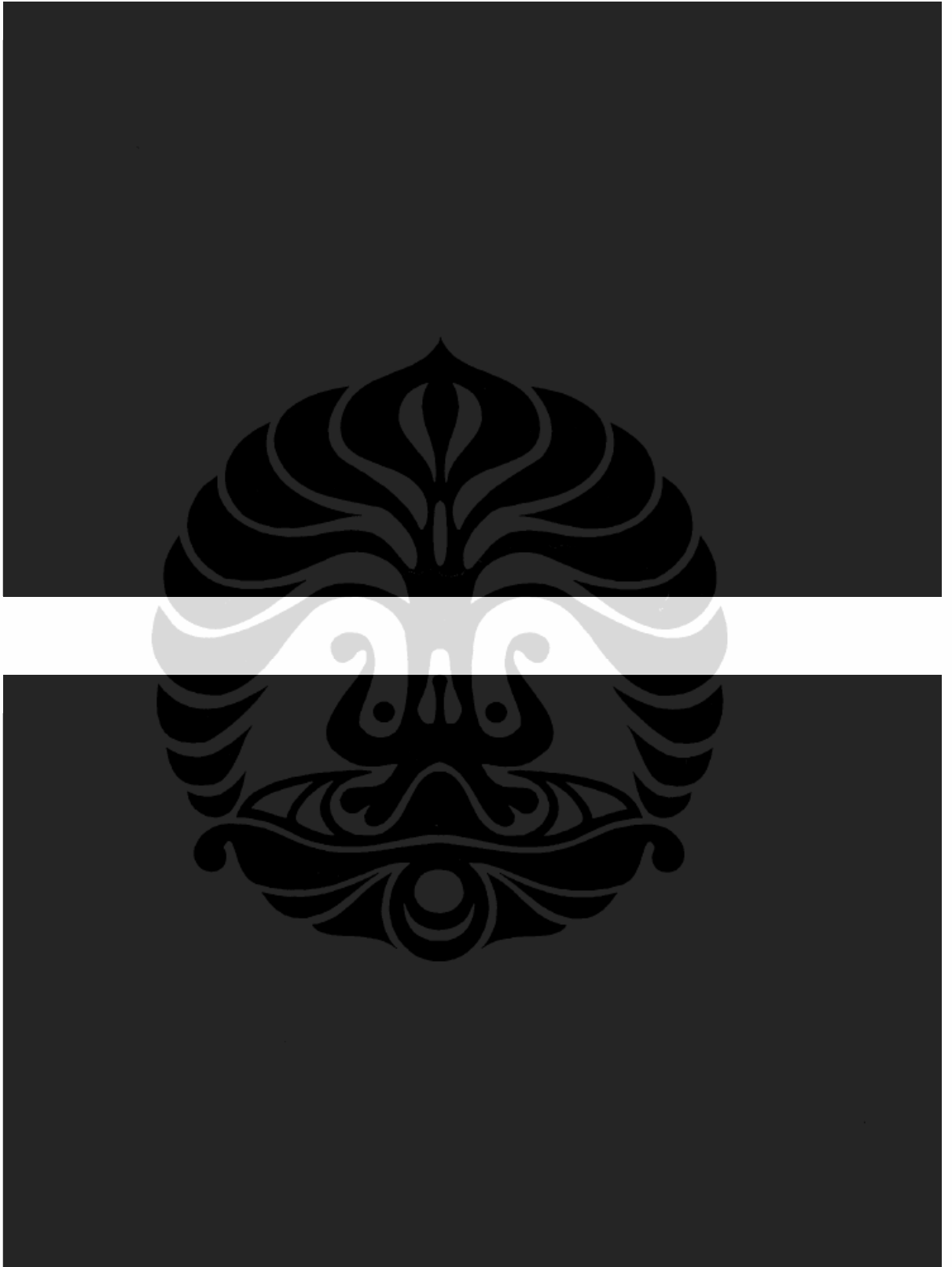
- Alam, Jaoharul (2006). *Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencapaian IPM di Kabupaten Bekasi*. Tesis MPKP, Tidak Dipublikasikan
- Albert O. Hirschman (1958). *The Strategy of Economics Growth*, New Haven Yale
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2008). *Jabar Dalam Angka. Beberapa Tahun Terbitan*.
http://www.bappeda-jabar.go.id/dokumen_informasi.php?t=22
- Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2003-2007). *Penyusunan Data Basis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat. Beberapa Tahun Terbitan*.
http://www.bappeda-jabar.go.id/dokumen_informasi.php
- Badan Pusat Statistik (2008). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota. Beberapa Tahun Terbitan*.
- Cahyadi, Putu Eka (2005). *Pelacakan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Bali)*. Tesis MPKP, Tidak Dipublikasikan
- Departemen Dalam Negeri (1999). *Undang-undang RI No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Panca Usaha.
- Departemen Dalam Negeri (1999). *Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah*. Jakarta: Panca Usaha.
- Dirjen Perimbangan Keuangan (Mei 2009). *Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah 2009, Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2002). *Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia*. Jakarta
- Debraj Ray (1999). *Economics Development*. 1999 hal 170
- Gujarati, Damodar (2005), *Ekonomika Dasar*, Alih Bahasa Soemarno Zein, Jakarta : Erlangga
- Jinghan, M.L. (2007), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, penerjemah D. Guritno, Edisi Sebelas, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Khaleghian, Peyvand (2003). *Decentralization and Public Services : The Case of Immunization*. World Bank.

- Khusaini (2002). *Analisis disparitas Antar Daerah Kabupaten/Kota dan pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Banten*. Tesis MPKP UI
- Machfud Sidik (2002). *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional*. Disampaikan dalam Seminar Nasional: *Public Sector Scorer Card*. Jakarta..
- Mahi, Raksaka (1998). *Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari Pemerataan antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi*. Jakarta: LPEM FEUI. November1998.
- Musgrave, Richard A dan Musgrave, Peggy B (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. 5th edition. Mc Graw Hill, USA. .
- Susanti, Hera, Moh. Ikhsan dan Widyanti (2007). *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta :LPFE Universitas Indonesia.
- Tambunan, Tulus TH. (2001). *Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori dan Penemuan Empiris*. Salemba Empat. Jakarta.
- Tambunan, Tulus TH (2003). *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003.
- The World Bank (2006). *Laporan Pembangunan Dunia 2006, Kesetaraan dan Pembangunan*. Penerjemah Dono Sunardi. Jakarta :Salemba Empat
- Williamson, Jeffrey G. (1977). *Ketidaksamaan regional dan Proses Pembangunan Nasional: Penggambaran Polanya (terjemahan)*. Jakarta: LP FE UI.
- World Bank Institute (2001). *Decentralization Briefing Notes*. <http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37142.pdf>

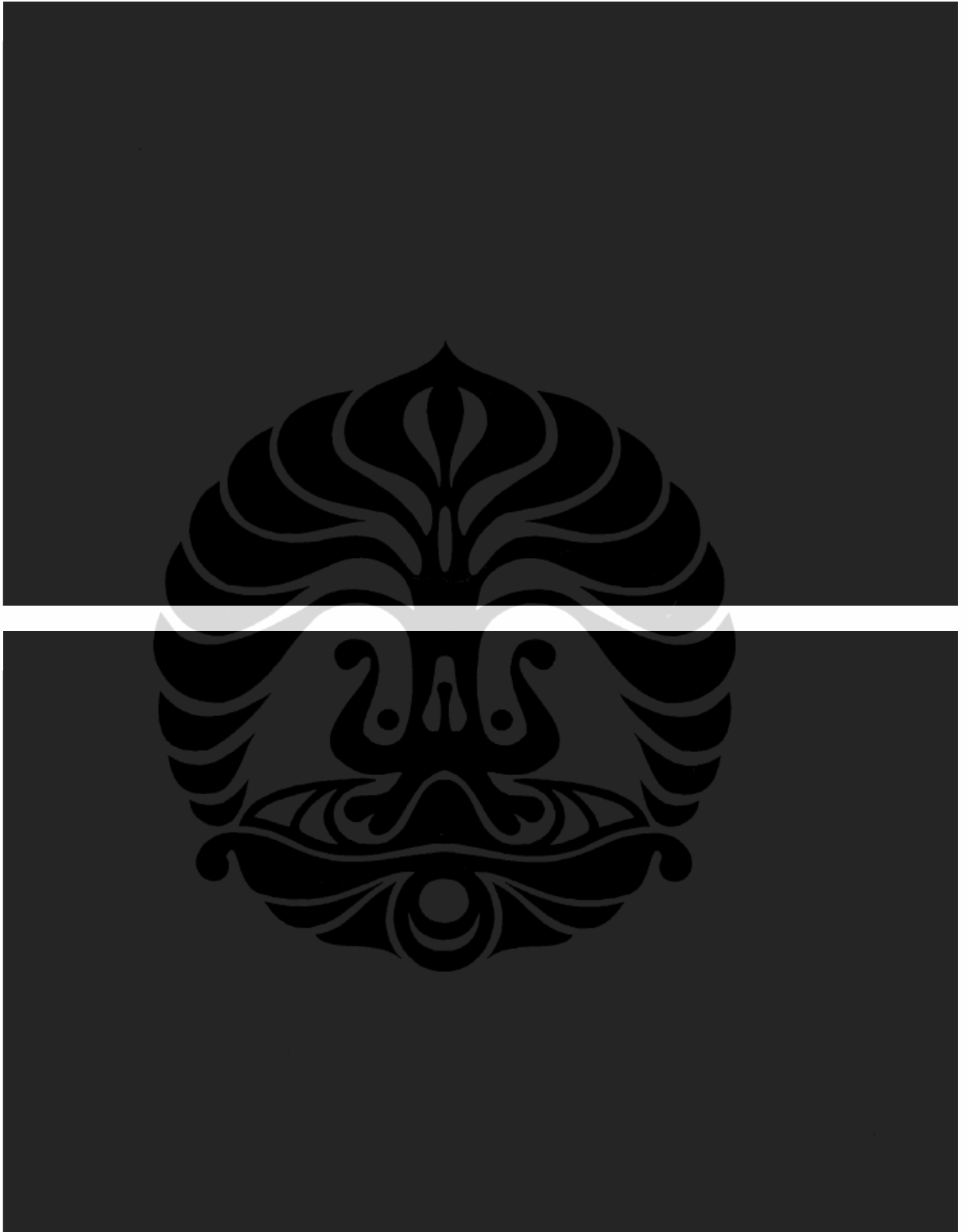
Lampiran 1 : Perhitungan Indeks Williamson (CVw)



(Lanjutan)



(Lanjutan)



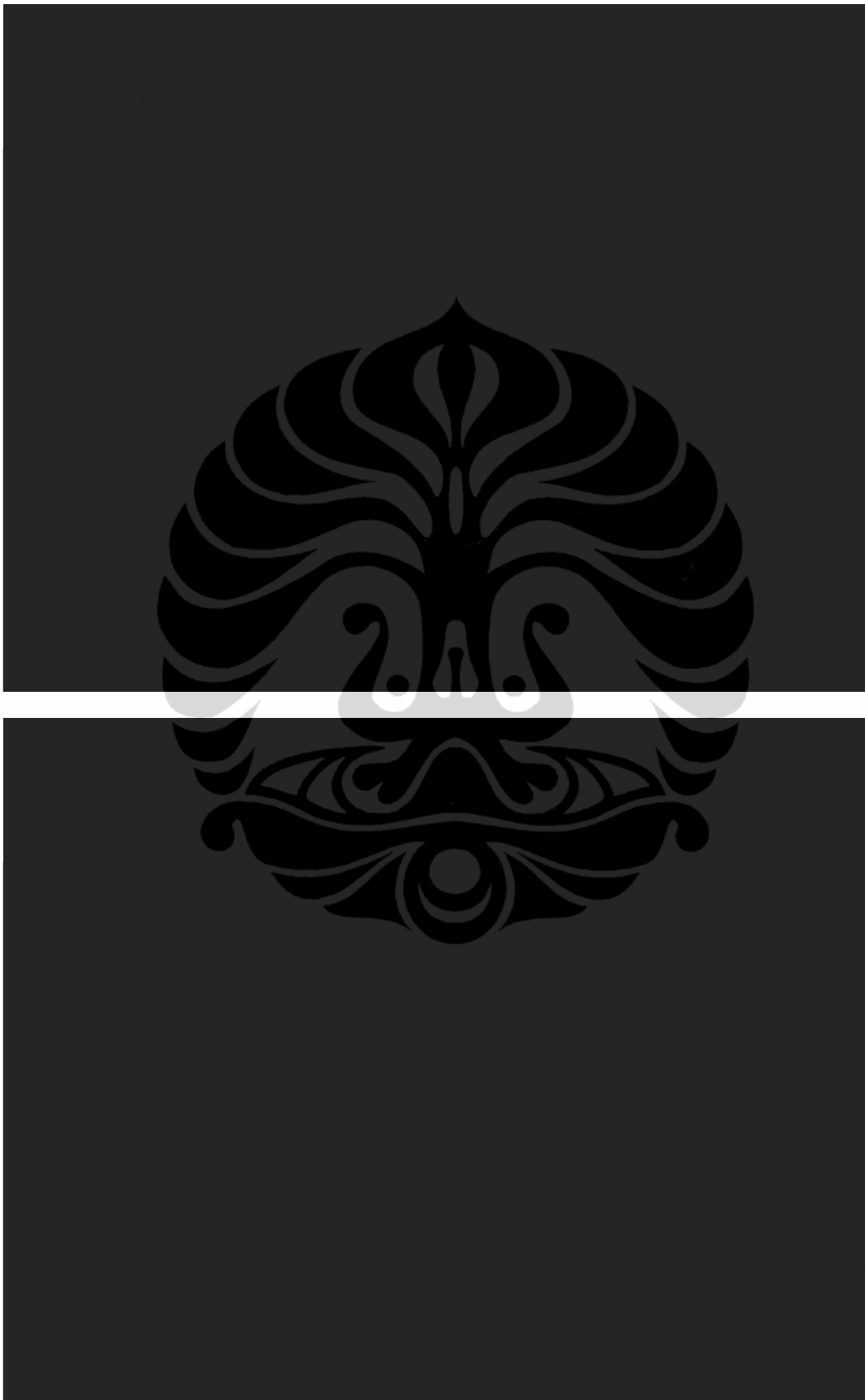
(Lanjutan)

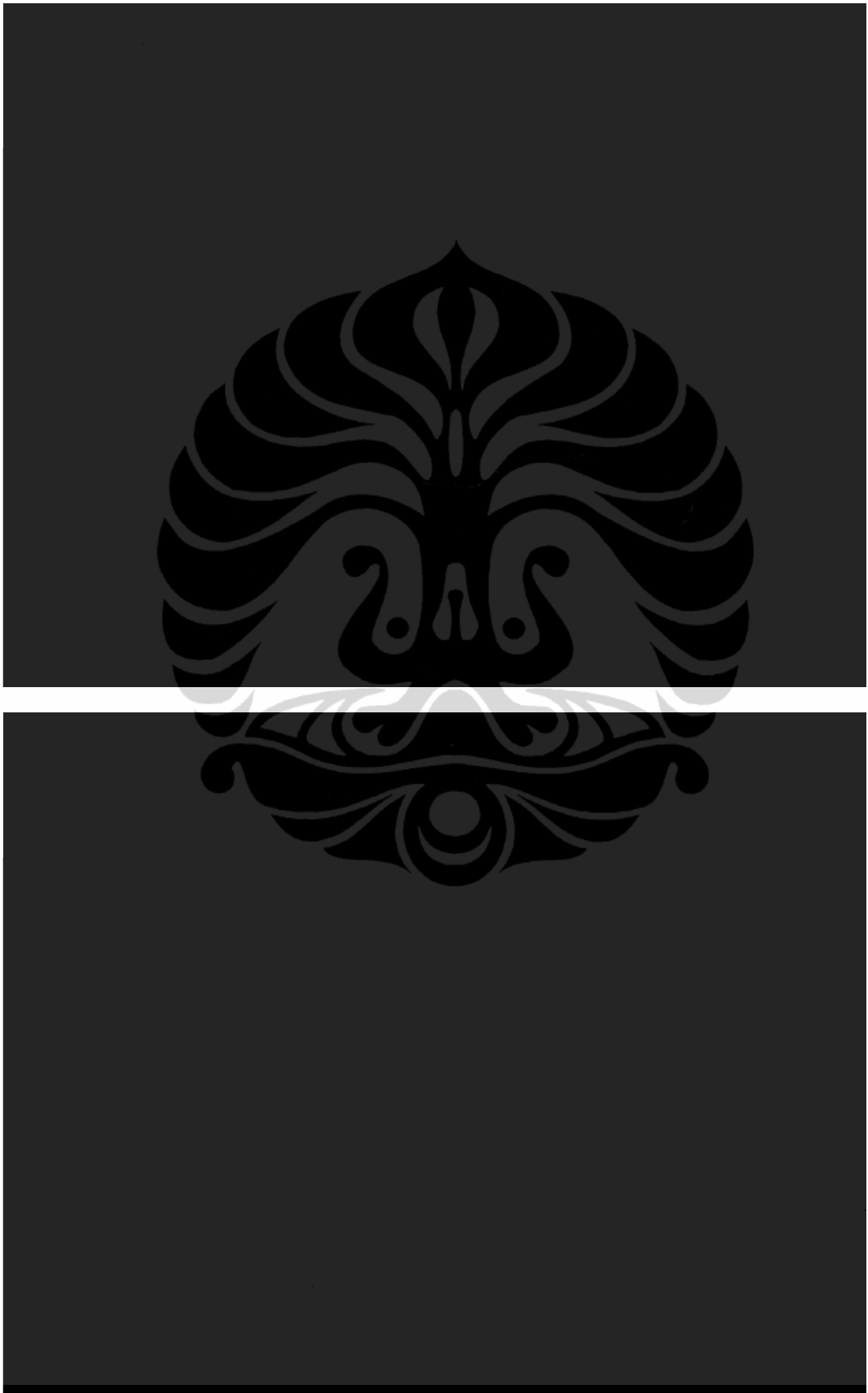


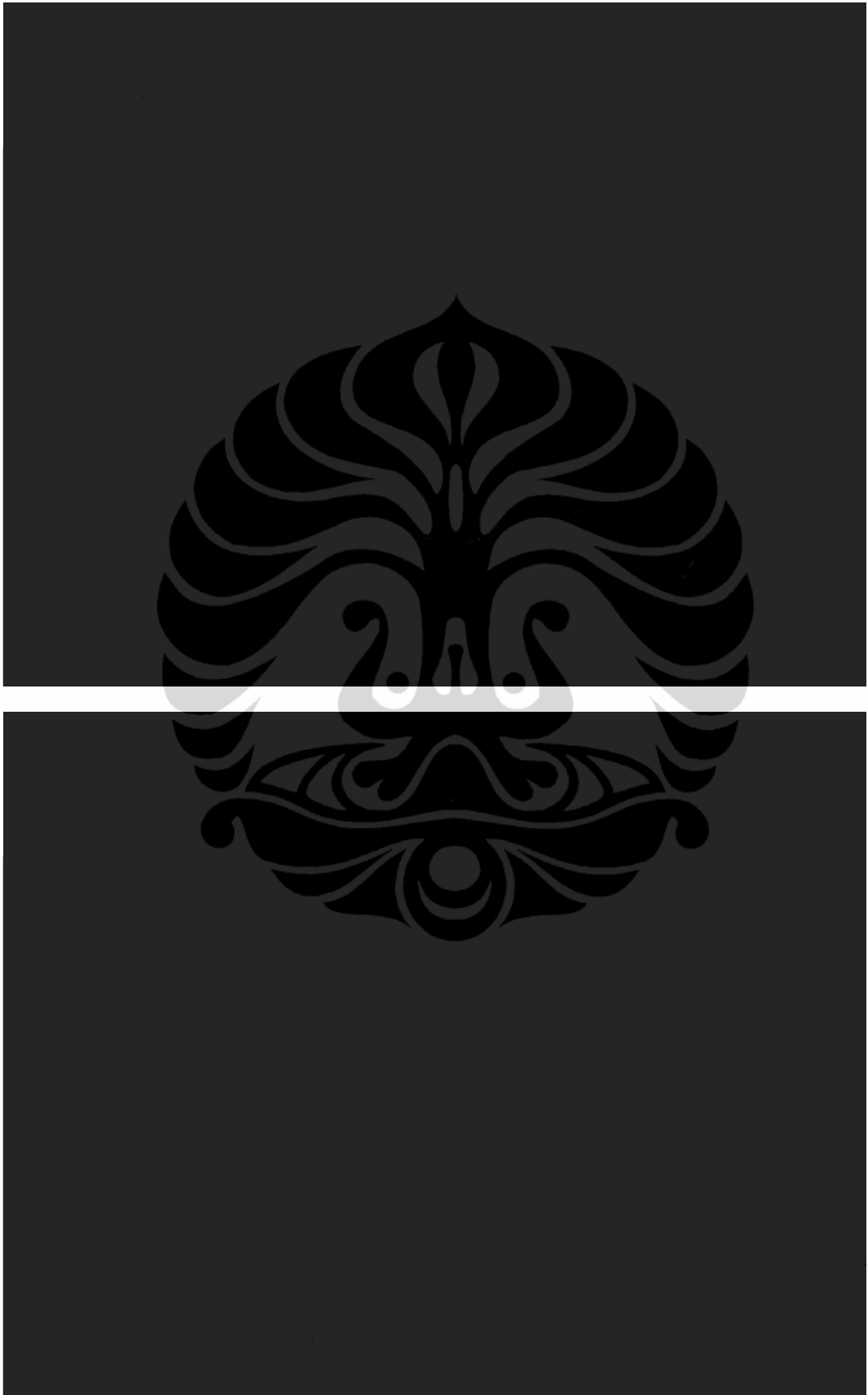
(Lanjutan)

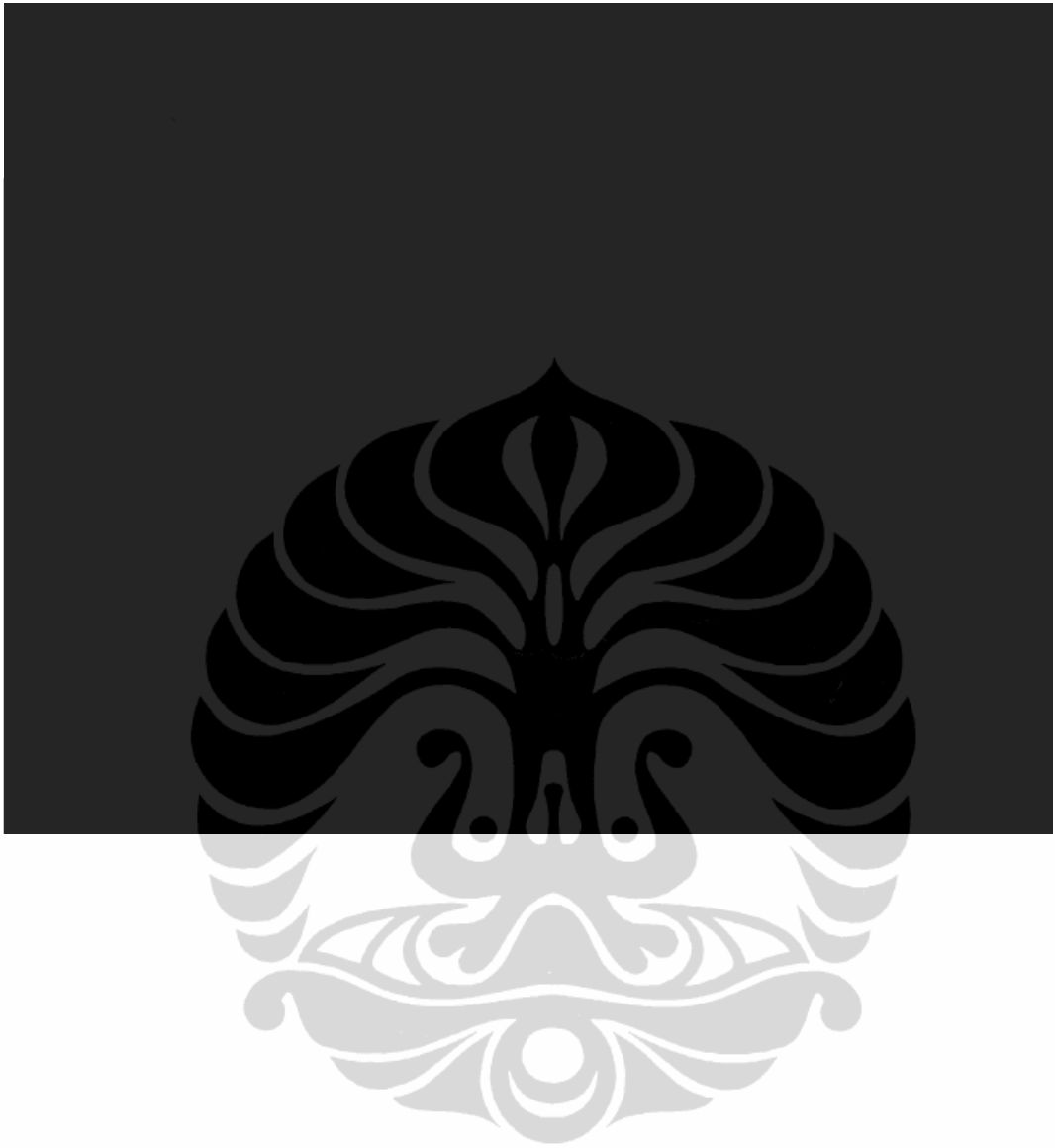


Lampiran 2 : Perhitungan Tipologi Klassen









Lampiran 3 : Output Software Eviews Metode *Pooled Least Squares*

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 11/21/09 Time: 08:14
 Sample: 2003 2007
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 25
 Total pool (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.11550	1.022196	66.63640	0.0000
SARSD?	-0.002499	0.001313	-1.903144	0.0595
SARSLP?	0.034424	0.006653	5.174021	0.0000
MRGSD?	23.19931	9.775277	2.373263	0.0193
MRGSLP?	25.48509	8.906104	2.861531	0.0050
PUSKES?	-0.009973	0.008531	-1.168956	0.2448
DOKPUS?	-0.008555	0.006070	-1.409373	0.1614
BIDPUS?	-0.004687	0.001537	-3.049967	0.0028
PDRBKP?	1.79E-08	4.29E-08	0.417930	0.6768
DTPDK?	0.000273	7.20E-05	3.789333	0.0002
R-squared	0.720236	Mean dependent var	70.24392	
Adjusted R-squared	0.698341	S.D. dependent var	3.406783	
S.E. of regression	1.871124	Akaike info criterion	4.167574	
Sum squared resid	402.6272	Schwarz criterion	4.393840	
Log likelihood	-250.4734	F-statistic	32.89557	
Durbin-Watson stat	0.636500	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 4 : Output Software Eviews Metode *Fixed Effect*

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 11/21/09 Time: 11:24
 Sample: 2003 2007
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 25
 Total pool (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.36275	4.206809	16.01279	0.0000
SARSD?	-0.003339	0.004206	-0.793766	0.4294
SARSLP?	0.022457	0.006765	3.319679	0.0013
MRGSD?	-0.537008	7.652773	-0.070172	0.9442
MRGSLP?	16.25659	6.661967	2.440209	0.0166
PUSKES?	0.022555	0.014530	1.552340	0.1241
DOKPUS?	0.003001	0.004505	0.666237	0.5069
BIDPUS?	-0.000487	0.001316	-0.370248	0.7121
PDRBKP?	5.77E-07	3.16E-07	1.824147	0.0714
DTPDK?	-0.001150	0.000764	-1.506418	0.1354
Fixed Effects (Cross)				
_KBOG--C	-6.226386			
_KSUK--C	-4.561132			
_KCIN--C	-4.774654			
_KBDG--C	-4.929956			
_KGAR--C	-4.064636			
_KTAS--C	-3.350260			
_KCIM--C	-2.620322			
_KKUN--C	-2.085263			
_KMAJ--C	-2.338028			
_KSUM--C	-1.418144			
_KIND--C	-8.008938			
_KSUB--C	-2.603843			
_KPUR--C	-3.641471			
_KKAR--C	-6.072926			
_KBEK--C	-10.24122			
_BOGR--C	10.07139			
_SUKB--C	7.275783			
_BDNG--C	13.57322			
_CRBN--C	1.539788			
_BKSI--C	10.72728			
_DPOK--C	11.39482			
_CMHI--C	12.68623			
_TSKM--C	3.461523			
_BNJR--C	1.423399			

(Lanjutan)

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.933187	Mean dependent var	70.24392
Adjusted R-squared	0.908958	S.D. dependent var	3.406783
S.E. of regression	1.027933	Akaike info criterion	3.119522
Sum squared resid	96.15476	Schwarz criterion	3.888824
Log likelihood	-160.9701	F-statistic	38.51555
Durbin-Watson stat	1.231172	Prob(F-statistic)	0.000000



(Lanjutan)

Dependent Variable: IPM?
Method: Pooled Least Squares
Date: 11/21/09 Time: 11:31
Sample: 2003 2007
Included observations: 5
Cross-sections included: 25
Total pool (balanced) observations: 125
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.64927	2.177334	29.69194	0.0000
SARSLP?	0.021442	0.005202	4.121975	0.0001
MRGSLP?	15.95254	4.656012	3.426224	0.0009
PUSKES?	0.022276	0.010505	2.120503	0.0366
DOKPUS?	0.002520	0.003556	0.708622	0.4803
PDRBKP?	5.89E-07	2.26E-07	2.610650	0.0105
DTPDK?	-0.001155	0.000353	-3.270357	0.0015
Fixed Effects (Cross)				
_KBOG--C	-8.867844			
_KSUK--C	-5.728203			
_KCIN--C	-6.254299			
_KBDG--C	-9.367492			
_KGAR--C	-6.506555			
_KTAS--C	-4.279447			
_KCIM--C	-3.626121			
_KKUN--C	-1.803530			
_KCIR--C	-5.714023			
_KMAJ--C	-2.526172			
_KSUM--C	-0.834756			
_KIND--C	-8.363169			
_KSUB--C	-2.923665			
_KPUR--C	-2.511388			
_KKAR--C	-6.998554			
_KBEK--C	-10.29087			
_BOGR--C	11.82683			
_SUKB--C	9.575664			
_BDNG--C	13.30111			
_CRBN--C	3.548036			
_BKSI--C	11.45411			
_DPOK--C	13.07785			
_CMHI--C	14.80834			
_TSKM--C	5.215121			
_BNJR--C	3.789030			

(Lanjutan)

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.932682	Mean dependent var	70.24392
Adjusted R-squared	0.911197	S.D. dependent var	3.406783
S.E. of regression	1.015216	Akaike info criterion	3.079060
Sum squared resid	96.88231	Schwarz criterion	3.780482
Log likelihood	-161.4413	F-statistic	43.41164
Durbin-Watson stat	1.196322	Prob(F-statistic)	0.000000



(Lanjutan)

Dependent Variable: IPM?
Method: Pooled Least Squares
Date: 11/21/09 Time: 11:33
Sample: 2003 2007
Included observations: 5
Cross-sections included: 25
Total pool (balanced) observations: 125
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.60664	2.013087	32.09332	0.0000
SARSLP?	0.021613	0.004957	4.360065	0.0000
MRGSLP?	15.67295	4.301784	3.643361	0.0004
PUSKES?	0.023004	0.009041	2.544420	0.0126
PDRBKP?	5.84E-07	2.27E-07	2.573574	0.0116
DTPDK?	-0.001096	0.000331	-3.312208	0.0013
Fixed Effects (Cross)				
_KBOG--C	-8.468012			
_KSUK--C	-5.591812			
_KCIN--C	-6.181584			
_KBDG--C	-9.094921			
_KGAR--C	-6.423986			
_KTAS--C	-4.285465			
_KCIM--C	-3.566697			
_KKUN--C	-1.776148			
_KCIR--C	-5.667305			
_KMAJ--C	-2.511288			
_KSUM--C	-0.785111			
_KIND--C	-8.259924			
_KSUB--C	-2.843578			
_KPUR--C	-2.384827			
_KKAR--C	-6.854372			
_KBEK--C	-10.09895			
_BOGR--C	11.60619			
_SUKB--C	9.375873			
_BDNG--C	12.98412			
_CRBN--C	3.397475			
_BKSI--C	11.22111			
_DPOK--C	12.95973			
_CMHI--C	14.29933			
_TSKM--C	5.163617			
_BNJR--C	3.786540			

Effects Specification

(Lanjutan)

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.932444	Mean dependent var	70.24392
Adjusted R-squared	0.911821	S.D. dependent var	3.406783
S.E. of regression	1.011643	Akaike info criterion	3.066591
Sum squared resid	97.22496	Schwarz criterion	3.745386
Log likelihood	-161.6619	F-statistic	45.21484
Durbin-Watson stat	1.180227	Prob(F-statistic)	0.000000



Lampiran 5 : Output Software Eviews Metode *Random Effects*

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 02/08/10 Time: 02:32
 Sample: 2003 2007
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 25
 Total pool (balanced) observations: 125
 Swamy and Arora estimator of component variances
 White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.95128	1.370061	51.05704	0.0000
SARSD?	-0.004463	0.001111	-4.018017	0.0001
SARSLP?	0.027858	0.004801	5.802701	0.0000
MRGSD?	0.001491	0.013491	0.110479	0.9122
MRGSLP?	-0.011804	0.003280	-3.599456	0.0005
PUSKES?	0.002247	0.011124	0.201977	0.8403
DOKPUS?	-0.001756	0.001680	-1.045408	0.2980
BIDPUS?	0.001098	0.004289	0.256073	0.7984
PDRBKP?	2.73E-08	4.18E-08	0.651920	0.5158
DTPDK?	0.000326	7.42E-05	4.386013	0.0000
Random Effects				
(Cross)				
_KBOG--C	-1.155837			
_KSUK--C	-0.414819			
_KCIN--C	-0.515170			
_KBDG--C	2.541741			
_KGAR--C	0.659421			
_KTAS--C	0.891899			
_KCIM--C	2.326483			
_KKUN--C	-0.228243			
_KCIR--C	-3.486356			
_KMAJ--C	0.288686			
_KSUM--C	1.086696			
_KIND--C	-4.727496			
_KSUB--C	0.492657			
_KPUR--C	-0.486778			
_KKAR--C	-1.489763			
_KBEK--C	-0.170690			
_BOGR--C	0.569082			
_SUKB--C	1.059988			
_BDNG--C	-0.410128			
_CRBN--C	-0.128493			
_BKSI--C	0.120271			
_DPOK--C	2.930644			
_CMHI--C	-0.815280			

_TSKM--C	0.950511
_BNJR--C	0.110974

(Lanjutan)

Effects Specification

Cross-section random S.D. / Rho	1.635180	0.7090
Idiosyncratic random S.D. / Rho	1.047604	0.2910

Weighted Statistics

R-squared	0.452975	Mean dependent var	19.34743
Adjusted R-squared	0.410164	S.D. dependent var	1.419898
S.E. of regression	1.090493	Sum squared resid	136.7551
F-statistic	10.58090	Durbin-Watson stat	0.978121
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.659707	Mean dependent var	70.24392
Sum squared resid	489.7379	Durbin-Watson stat	0.273132
